

kenari

Komunikasi Edukasi Wana Lestari

WANA LESTARI:
APRESIASI DAN
MOTIVASI
TELADAN LHK
PEMBANGUN
NEGERI

TANTANGAN
PENYULUH KEHUTANAN
DALAM MENDUKUNG
INDONESIA SEBAGAI
PRESIDENSI G20

EDISI: 2022

MAJALAH PENYULUHAN KEHUTANAN

ISSN: 0853-7542



0853 7546



KEBIJAKAN:
Pendaftaran Kampung Iklim Pada Sistem
Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim

SELAMAT ATAS PELANTIKAN



Dr. Ir. Mariana Lubis, MM.
sebagai
Penyuluh Kehutanan Ahli Utama

4 Februari 2022

SELAMAT ATAS PELANTIKAN



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si.
sebagai
Kepala Pusat Penyuluhan

20 Mei 2022

MAJALAH PENYULUHAN KEHUTANAN



TIM REDAKSI

PENGARAH
Drs. A. Palguna Ruteka

PENANGGUNG JAWAB
Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si

KETUA REDAKTUR
Fery Huston, SH

ANGGOTA REDAKTUR
Indri Puji Rianti, S.Hut, M.S
Dyah Ekaprasetya M.R, S.Hut, M.Si
Niken Probo Laras, S.Hut, M.Si
Cucu Setiawati, S.Hut

PENYUNTING/EDITOR
Ir. Endang Dwi Hastuti, MM
Dr. Hendro Asmoro, SST, M.Si
Budi Budiman, S.Hut, M.Sc
Firmansyah, S.Hut, M.Si
Nden Rissa Hadikusumah, S.Si, M.Si

SEKRETARIAT
Sutarno
Atu Badariah Fauziah, S.Hut
Birowo Aji Wicaksono, S.Hut

ALAMAT REDAKSI
Pusat Penyuluhan, BP2SDM KLHK
Gedung Manggala Wanabakti
Blok 7 Lantai 8, Jl. Gatot Subroto,
Jakarta 10270

Telp : 021 – 57903075

Website :
<http://pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>

Email Redaksi :
majalahkenari.pusluh@gmail.com

Dari Redaksi,

Salam Sejahtera,

Majalah KENARI selalu hadir menyajikan informasi menarik seputar penyuluhan dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada edisi kali ini KENARI memuat tema utama tentang Presidensi G20 Indonesia dengan judul artikel Tantangan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Indonesia Sebagai Presidensi G20. Presidensi G20 menjadi momentum Indonesia untuk memperkuat komitmen global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus menunjukkan kontribusi lebih pada global dan saat bersamaan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan tentunya dapat mengambil peran dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui berbagai aksi seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan, banjir dan longsor, pendampingan Proklamasi dan sebagainya. Aksi tersebut juga diiringi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis komoditas produk maupun jasa lingkungan dan wisata alam.

Tulisan lain yang masih senada dengan tema Presidensi G20 Indonesia yaitu tentang Pembangunan Ekonomi Hijau Sektor Mikro LHK. Lebih lanjut, KENARI juga menampilkan tulisan dengan tema ASN BerAKHLAK dimana akronim ini sejak 2021 telah ditetapkan sebagai core values ASN di Indonesia tidak terkecuali penyuluh kehutanan. Masih terkait tema BerAKHLAK, KENARI juga memuat cerita keteladanan salah satu ASN terkemuka di lingkungan Kementerian LHK.

KENARI edisi kali ini juga menyajikan tulisan yang memuat cerita pendampingan oleh penyuluh kehutanan di tingkat tapak diantaranya pendampingan di kawasan mangrove, KHDTK Hutan Diklat, kampung ramah lingkungan, pendampingan RHL serta bentuk pengembangan pendampingan di Taman Nasional. Untuk lebih mengenal beberapa kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan, KENARI juga menampilkan artikel terkait FOLU Net Sink 2030, Kemitraan Konservasi dan SRN PPI yang dikemas dengan ringan dan mudah dipahami. Selain itu, KENARI juga berbagi informasi tentang bambu, cascara, dan inovasi kopi belut. Cerita menarik dari berbagai daerah juga turut mewarnai ragam artikel KENARI edisi kali ini, termasuk cerita kearifan lokal, pelestarian penyu dan kegiatan ekowisata.

KENARI tanpa cerita Wana Lestari bagaikan sayur tanpa garam. Bagaimana penyelenggaraan Temu Karya Wana Lestari kali ini dan seperti apa kisah admin dibalik kesuksesan lomba Wana Lestari? Siapa saja penerima Penghargaan dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2022? Mari disimak beragam informasi seputar Wana Lestari serta informasi menarik lainnya yang sayang jika dilewatkan.

Semoga Majalah KENARI menjadi bacaan yang bermanfaat dan dapat memotivasi para penyuluh kehutanan untuk terus berkiprah bersama masyarakat. Selamat membaca!!!

Redaksi

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

- Tantangan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Indonesia Sebagai *Presidensi Group of 20(G20)* [06-10]
- Penyuluh Kehutanan BerAKHLAK [11-14]
- Membangun Ekonomi Hijau Sektor Mikro LHK Melalui Pendampingan Usaha Produktif KTH [15-19]
- Keteladanan Pak Wiratno, Inspirasi bagi Penyuluh Kehutanan [20-22]
- Memantik Motivasi Penyuluh Kehutanan dalam Mencegah Karhutla, Banjir dan Longsor [23-26]
- Wana Lestari: Apresiasi dan Motivasi Teladan LHK Pembangun Negeri [27-30]

DAFTAR PEMENANG LOMBA
WANA LESTARI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2022

[31-34]

DAFTAR PENERIMA APRESIASI
WANA LESTARI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2022

[35-36]

PRESTASI

- Tri Andik Setyawan, S.Hut: Berkhidmat pada Alam untuk Peradaban Lebih Baik [37-40]
- Kiprah Jais dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan [41-44]
- KTH Kepuh, Pelestari Hutan Mendiرو [45-47]

KEBIJAKAN

- Mengenal *Indonesia's Forest And Other Land Use Net Sink 2030* [48-51]
- Pendaftaran Kampung Iklim Pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) [52-58]
- Merencanakan Pendampingan KTH [59-62]

INOVASI

- CASCARA: Potensi Baru Penghasil Cuan [63-65]
- Kopi Belut, Kopi Unik Racikan KTH Srikandi [66-68]



HHBK DAN JASA LINGKUNGAN

- Bambu Sebagai Sumber Ekonomi Masyarakat [69-70]
- Potensi Kaliandra Merah Untuk Pembangunan Kebun Energi [71-73]
- Mamake Bapake: Destinasi Paralayang dan Gantole [74-76]
- Tiwoho Mangrove Trail: Ekowisata Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemulihan Perekonomian Pasca COVID-19 [77-80]
- Micil: Asa Wisata di Pantura Jawa [81-83]

UMUM

- Mangrove: Benteng Kota Bontang [84-87]
- Cerita Pendampingan Kelembagaan KTH di KHDTK Hutan Diklat Sisimeni Sanam [88-91]
- Pendampingan Kampung Ramah Lingkungan "Berani Sejuk" [92-95]
- Kearifan Lokal Lubuk Larangan, Salah Satu Upaya Mengatasi Perubahan Iklim [96-98]
- Marekisi Nung: Pelestari Penyu Di Ujung Timur Indonesia [99-101]
- Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pendampingan Kegiatan RHL [102-105]
- Kemitraan Konservasi dalam rangka Pelestarian Ekosistem Mangrove di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai [106-111]
- Pengendalian Karhutla Ala Penyuluh Kehutanan [112-115]
- Penyuluh Kehutanan Padamkan Api di Areal Kebakaran Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai [116-118]
- Wanacarita di Bumi Welahan [119-124]
- Serba serbi Admin Dibalik Kesuksesan Lomba Wana Lestari [125-127]
- Makna Logo PKSM [128-129]
- GALERI [130-137]



MARS PENYULUH KEHUTANAN

*Kita Penyuluh Kehutanan
Terus berjuang tanpa henti
Kita membina, mendampingi
Jadikan hutan tetap lestari*

*Reff: Bersatu padu, bergandeng tangan
Untuk tunaikan tugas kita
Halang rintangan, segala tantangan
Hadapi dengan suka cita
Karna kita mengabdikan bagi ibu pertiwi
Agar rakyat sejahtera
Tingkatkan semangat berkarya*

*Kita penyuluh yang sejati
Menyuluh rakyat dengan hati
Kita bekerja dengan jujur
Jadikan rakyat makin makmur*

TANTANGAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG INDONESIA SEBAGAI PRESIDENSI G20

Suksesnya Indonesia sebagai presidensi G20 memerlukan peran para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyuluh Kehutanan memiliki tantangan peran dalam mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan untuk memastikan masa depan hijau yang berkelanjutan dan menangani perubahan iklim. Kerja nyata Arif Mustofa mendampingi Kelompok Tani Hutan (KTH) Sri Makarti Dusun Banyudono, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjadi bukti Penyuluh Kehutanan berperan dalam pendampingan kelompok masyarakat yang mendukung pengendalian perubahan iklim.



Pelaksanaan 3rd EDM-CSWG Presidensi G20 Bali.

Sejak 1 Desember 2021, Indonesia memegang Presidensi *Group of 20* (G20). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memimpin forum kerjasama 20 negara ekonomi utama dunia yang berfokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Saat kepemimpinan Indonesia, kondisi

dunia sedang berada pada masa krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. G20 yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*”. Tema ini diangkat oleh Indonesia, dengan pertimbangan untuk



Kontribusi penanaman pohon oleh KTH menurunkan angka deforestasi.

mengatasi tekanan akibat pandemi COVID-19, memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia.

Untuk mencapai target tersebut, Presidensi Indonesia fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. Tiga sektor prioritas tersebut adalah penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi.

Sektor penguatan arsitektur kesehatan global dimaksudkan agar dunia tidak hanya mampu menanggulangi pandemi saat ini, namun juga untuk mempersiapkan dunia agar dapat memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya. Sektor Transformasi digital merupakan salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian saat pandemi, yakni berfokus pada peningkatan kemampuan digital (*digital skills*) dan literasi digital (*digital literacy*) guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh negara. Sedangkan pada sektor transisi energi, Presidensi Indonesia mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas dan keterjangkauan. Hal ini berguna untuk memastikan masa depan hijau yang berkelanjutan dan menangani perubahan iklim secara nyata.

Untuk mendukung suksesnya Indonesia sebagai presidensi G20, tentunya

memerlukan peran para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran para pihak tidak hanya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pertemuan G20, namun juga peran para pihak yang secara tidak langsung mendukung implementasi tiga sektor prioritas pemulihan yang kuat dan berkelanjutan.

Tantangan Peran dan Kinerja Penyuluh Kehutanan

Dalam konteks dukungan terhadap Indonesia sebagai presidensi G20 tantangan peran aktif Penyuluh Kehutanan sangat besar, terutama dalam pencapaian sektor prioritas transisi energi. Dalam amanat Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir serta Tanah Longsor tanggal 15 Juni 2022, Menteri LHK menegaskan bahwa Penyuluh Kehutanan sebagai bagian dalam elemen petugas dan ujung tombak pembangunan LHK di tingkat tapak memiliki peran sangat penting dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengendalian perubahan iklim. Upaya bersama antara aparat pemerintah (termasuk Penyuluh Kehutanan di dalamnya) dengan masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon untuk mengurangi potensi banjir dan longsor telah dianggap berhasil. Pada tahun 2020 Indonesia telah menurunkan angka deforestasi (*deforestation rate*) sampai dengan 78%. Angka deforestasi ini merupakan titik terendah sejak tahun 1990,

yaitu sebesar 115 ribu ha. Sebelumnya pada tahun 2018-2019 deforestasi terjadi pada areal seluas 460 ribu ha, tahun 2014-2015 seluas 1,09 juta ha, sementara pada periode tahun 1996-2000 mencapai 3,51 juta ha.

Kerjasama antara Penyuluh Kehutanan dan aparat pemerintah lainnya, dengan masyarakat dalam penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagaimana kita ketahui bahwa emisi GRK sektor kehutanan terbesar bersumber dari Karhutla. Sebagai gambaran pada tahun 2019, emisi GRK sekitar 600 juta ton CO₂ eq, angka tersebut diperkirakan sekitar 66-70 % dari emisi GRK tahun 2019. Pada tahun 2020 emisi GRK sebesar 39-41 juta ton CO₂ eq, menurun 93% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena luas areal hutan dan lahan yang terbakar menurun tajam di tahun 2020 yaitu 82 %.

Penurunan angka deforestasi dan berkurangnya luas areal hutan dan lahan yang terbakar hendaknya tidak menjadikan Penyuluh Kehutanan berbangga diri. Peran Penyuluh Kehutanan yang lebih besar masih diharapkan, terutama dalam pemenuhan komitmen perubahan iklim yakni penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim.

Upaya pemenuhan komitmen perubahan iklim merupakan bagian dari agenda *Forest and Land Use /FOLU Net*



Sink 2030 yang tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Dalam agenda tersebut Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK (29% tanpa syarat dan hingga 41% dengan bantuan internasional) dan meningkatkan ketahanan iklim pada tahun 2030 dengan visi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim tahun 2050 dan menuju NZE (*Net Zero Emission*) tahun 2060 atau lebih awal. Selanjutnya komitmen tersebut dijabarkan dalam *Updated Nationally Determined Contribution (NDC)* dan *Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050*.

Pencapaian target tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rencana operasional FOLU Net Sink 2030. Implementasi rencana operasional FOLU Net Sink 2030 memerlukan peran berbagai pihak, termasuk diantaranya Penyuluh Kehutanan. Kegiatan-kegiatan dalam rencana operasional FOLU Net Sink 2030 yang memerlukan keterlibatan Penyuluh Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanganan dan penang-

gulan Karhutla dengan penekanan pada kebijakan preventif Karhutla melalui: monitoring *hot spots* dan modifikasi cuaca (hujan buatan), tata kelola gambut, patroli dan partisipasi masyarakat dengan sistem paralegal/ kesadaran hukum masyarakat serta penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap areal konsesi bisnis dan pelanggaran oleh masyarakat.

2. Tata kelola gambut melalui kegiatan pembasahan lahan (*reweting*) serta kegiatan rehabilitasi dan pembinaan pengelolaan gambut pada areal masyarakat dengan infrastruktur dan sistem penanaman *paludiculture*.

3. Mengurangi emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut dengan meningkatkan restorasi lahan gambut dan perbaikan pengelolaan lahan gambut.

4. Rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk rehabilitasi hutan mangrove.

5. Partisipasi publik pada kegiatan perhutanan sosial dan masyarakat adat.

6. Penegakkan hukum melalui operasi lapangan, penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan dan penerapan sanksi administratif, serta pengajuan gugatan perkara melalui pengadilan.

Peran Penyuluh Kehutanan dalam upaya

menurunkan emisi GRK juga masih terus diharapkan. Target penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 314 juta ton CO₂ eq (11%) pada tahun 2030 akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan efisiensi energi, energi baru dan terbarukan (EBT), energi bersih, pengalihan bahan bakar (*fuel witching*) dan reklamasi lahan pasca tambang. Kegiatan-kegiatan yang berada pada sektor perindustrian tersebut telah masuk ke dalam target 11%, sedangkan kegiatan-kegiatan pada sektor transportasi selain penggunaan bahan bakar B30, belum masuk ke dalam target 11% penurunan emisi GRK. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan dilakukannya penghentian (*retirement*) penggunaan batubara sebagai sumber energi.

Penurunan emisi GRK dari limbah dan sampah ditargetkan sebesar 11 juta ton CO₂ eq (0,38%), yang dikontribusikan dari pengelolaan limbah padat domestik, limbah cair domestik, limbah padat industri dan dari pengelolaan limbah cair industri. Contoh kegiatan pengurangan emisi GRK dari limbah dan sampah adalah pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA), daur ulang kertas, pengomposan (*composting*),

pengolahan sampah menjadi sumber energi (*waste to energy*), pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), pengomposan limbah padat industri, biogas limbah cair sawit (Biogas POME), serta biogas IPAL pulp dan kertas. Dalam upaya penurunan emisi GRK ini Kementerian LHK bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perindustrian.

Tantangan kerja nyata Penyuluh Kehutanan dalam aksi iklim dapat dilakukan dalam lintas sektor yang bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendampingan kelompok masyarakat dalam kegiatan penataan kawasan, Program Kampung Iklim (Proklam), tata kelola sampah dan limbah, pengembangan ekonomi sirkuler (*circular economy*) serta pengembangan nilai ekonomi karbon dapat dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan. Penyuluh kehutanan juga diharapkan dapat membangun ketahanan iklim dengan upaya restorasi. Diantaranya melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut serta ekosistem mangrove.

Kerja Nyata di Gedong Banyubiru

Kerja nyata Penyuluh Kehutanan dalam pendampingan kelompok masyarakat yang mendukung pengendalian perubahan iklim dapat terlihat di Dusun Banyudono, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru Kabu-



Sistem instalasi air dan drainase di Dusun Banyudono, Desa Gedong.



paten Semarang, Jawa Tengah. Adalah seorang Arif Mustofa yang sejak tahun 2019 mendampingi Kelompok Tani Hutan (KTH) Sri Makarti.

Wilayah Desa Gedong merupakan hulu dari Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawapening, dengan topografi berupa lereng dengan ketinggian tempat berkisar 600-1.140 mdpl. Daerah ini dulunya sering mengalami kekeringan pada musim kemarau. Menyadari hal tersebut warga Dusun Banyudono bersepakat membentuk KTH Sri Makarti pada tahun 1980.

Mujiyono, ketua KTH Sri Makarti menjelaskan pada awal berdirinya KTH, seluruh anggota bersepakat untuk melakukan penanaman pohon. Berbagai jenis pohon berkayu ditanam di lahan kosong sekitar dusun. Selain itu mereka juga menanam berbagai jenis pohon buah-buahan seperti alpukat, lemon, pepaya, kopi, kelapa, aren dan merica. Lahan bawah tegakan pun tak luput dimanfaatkan dengan menanam berbagai jenis hijauan pakan ternak dan empon-empon.

Dengan pendampingan Arif Mustofa, KTH ini menjadi motor perubahan di Desa Gedong. Tak hanya berhenti pada upaya rehabilitasi lahan dengan tanam menanam pohon, KTH ini memulai berbagai upaya konservasi tanah dan air. Mereka mengembangkan instalasi pemanenan air hujan (IPAH), sumur resapan, biopori, IPAL biogas, sistem penyediaan air minum, dan tandon air komunal.

Atas berbagai aktifitas tersebut, Dusun



Instalasi pemanenan air hujan (IPAH) dan IPAL Biogas di Dusun Banyudono, Desa Gedong.



Pendampingan Penyuluh Kehutanan pada peningkatan kapasitas SDM KTH Sri Makarti

Banyudono ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai lokasi Program Kampung Iklim (Proklam) kategori Utama pada tahun 2020. Dusun Banyudono juga ditetapkan sebagai Kampung Ramah Air Hujan (KRAH) oleh Kementerian LHK. Selain itu Desa Gedong meraih juara 1 Lomba Desa Peduli Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Jawa Tengah. Disamping capaian-capaian tersebut berbagai prestasi perorangan maupun kelompok telah diraih yakni Juara I Lomba Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan Kabupaten Semarang, Juara I Lomba Wana Lestari kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Juara I Lomba Wana Lestari kategori Penyuluh Kehutanan CDK wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Juara II Lomba Wana Lestari kategori KTH Provinsi Jawa Tengah, dan Juara II Lomba Wana Lestari kategori Penyuluh Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Arif Mustofa menjelaskan bahwa kunci sukses dalam pendampingan kelompok

masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim adalah dengan fokus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan kegiatan yang tengah dilaksanakan oleh kelompok. Arif Mustofa sadar bahwa keberhasilan koordinasi dengan pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten, provinsi dan pusat (UPT), swasta dan akademik akan menjadi daya dorong dan daya dukung yang besar sehingga proses perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan masyarakat dapat berlangsung dengan cepat.

Tantangan peran Penyuluh Kehutanan dalam pemenuhan komitmen perubahan iklim masih terbuka lebar. Tantangan bagi Penyuluh Kehutanan untuk menyesuaikan paradigma terkini. Bahwa Penyuluh Kehutanan harus membuka diri tidak hanya menjadi pendamping KTH saja tapi pendampingan kelompok masyarakat peduli perubahan iklim pun harus dilakukan. Arif Mustofa sudah menjadi contoh nyata, tidak hanya menjawab tantangan Penyuluh Kehutanan yang sudah menyesuaikan paradigma. Lebih dari itu

membuktikan bahwa nun jauh diujung sana ada Penyuluh Kehutanan yang ikut menyokong suksesnya Indonesia sebagai presidensi G20. ●

Budi Budiman, S.Hut, M.Sc

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan, Badan P2SDM, Kementerian LHK

PENYULUH KEHUTANAN BerAKHLAK

Presiden RI Joko Widodo, pada tanggal 27 Juli 2021 secara resmi telah melakukan pencanangan nilai-nilai dasar (*corevalues*) ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa'. Nilai-nilai dasar (*Core Values*) ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Harapannya nilai-nilai dasar tersebut menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Nilai-nilai dasar tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Bagaimana implementasi nilai-nilai dasar tersebut pada penyuluh kehutanan?

BerAKHLAK **#bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



SUMBER : PUSRENANG, 2021



Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan dalam rangka Perlindungan Satwa Liar dan Pencegahan Karhutla, Banjir serta Longsor.

Perilaku dan budaya kerja ASN yang berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat yang meliputi: 1). memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, 2) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; 3). melakukan perbaikan tiada henti. Budaya kerja ASN yang akuntabel adalah bertanggungjawab

atas kepercayaan yang diberikan. Hal tercermin pada perilaku yang meliputi: 1) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; 2) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan 3) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Selanjutnya, budaya kerja ASN yang

kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, tercermin pada perilaku yang meliputi: 1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; 2) membantu orang lain belajar; dan 3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sedangkan budaya kerja ASN yang harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Kondisi ini tercermin pada perilaku yang meliputi: 1) menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; 2) suka menolong orang lain; dan 3) membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Kemudian, budaya kerja ASN yang Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara yang tercermin dalam perilaku yang meliputi: 1) memegang teguh ideologi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; 2) menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, Pimpinan, instansi, dan negara; dan 3) menjaga rahasia jabatan dan negara. Cerminkan perilaku dan budaya kerja ASN yang adaptif terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan meliputi: 1) cepat menyesuaikan



Penyuluh Kehutanan bersama masyarakat menyerukan stop karhutla.

kan diri menghadapi perubahan; 2) terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan 3) bertindak proaktif. Terakhir, cerminan perilaku dan budaya kerja ASN yang kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi: 1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; 2) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Penyuluh Kehutanan yang BerAKHLAK

Perilaku dan budaya kerja Penyuluh Kehutanan yang BerAKHLAK dapat tercermin dari pelaksanaan tugas pada persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Berorientasi Pelayanan

Perilaku Penyuluh Kehutanan yang berorientasi pelayanan tercermin dari penyiapan materi penyuluhan yang disesuaikan



Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM.

dengan kebutuhan sasaran penyuluhan. Informasi materi yang dibutuhkan oleh sasaran penyuluhan diperoleh dari aktivitas identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data potensi wilayah. Materi yang disusun dan disampaikan umumnya memberikan alternatif solusi

atas masalah-masalah yang dihadapi oleh sasaran penyuluhan. Pilihan alternatif solusi yang terbaik akan ditentukan oleh sasaran penyuluhan baik oleh perorangan maupun kelompok secara bersama-sama. Dalam penerapan metode penyuluhan berupa penyebaran informasi baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung ataupun melakukan kegiatan penyuluhan lainnya seperti konsultasi dengan berbagai pihak dan memfasilitasi kemitraan, penyuluh kehutanan senantiasa bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada sasaran penyuluhan, dapat diandalkan dan cekatan sehingga sasaran penyuluhan dan pihak lain merasakan manfaat dari keberadaan Penyuluh Kehutanan.

Kompeten

Sejalan dengan perkembangan waktu, situasi dan kondisi yang dinamis, setiap Penyuluh dituntut untuk dapat meningkatkan potensi dan kompetensi diri. Menurut Prof. Sumardjo, guru besar penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat IPB, seseorang dikatakan sebagai Penyuluh yang kompeten apabila penyuluh mampu: 1) mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan penyuluhan dengan terampil untuk memberdayakan orang-orang dalam upaya meraih kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya; 2) mengorganisasikan sistem penyuluhan sehingga efektif memfasilitasi masyarakat dengan cermat agar masyarakat dapat



Penyuluh Kehutanan Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menanggulangi karhutla.



Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air.



DOKUMENTASI SL. PUSLUH 2022

Sinergitas Penyuluh Kehutanan dengan Berbagai Pihak.

memenuhi kebutuhannya secara mandiri; 3) melakukan tindakan yang tepat bila-mana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana penyuluhan semua; 4) menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh meski dengan kondisi yang berbeda (lokal spesifik; dan 5) mampu mensinergikan kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

Perilaku Penyuluh Kehutanan yang akuntabel tercermin dari upayanya dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri melalui berbagai aktivitas untuk bisa menjawab dinamika perubahan dan kebutuhan sasaran penyuluhan. Salah satu kegiatan yang efisien dalam peningkatan kompetensi adalah mengikuti seminar, workshop dan lain sebagainya secara on-line baik sebagai fasilitator, penyelenggara maupun sebagai peserta.

Harmonis

Perilaku Penyuluh Kehutanan yang harmonis tercermin dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang menghargai setiap perbedaan ataupun masukan dalam setiap diskusi maupun pertemuan kelompok. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Penyuluh Kehutanan selalu melakukan konsultasi, koordinasi dan interaksi lainnya dengan berbagai pihak. Hal ini juga dilakukan dalam rangka menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang

konduktif dan bersinergi dengan berbagai pihak, elemen masyarakat dan sasaran penyuluhan sehingga mampu menghasilkan kegiatan atau sesuatu yang lebih produktif.

Loyal

Loyalitas dan kesetiaan Penyuluh Kehutanan sebagai ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah dan tidak pada satu sosok atau pihak tertentu. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Salah satu contoh perilaku Penyuluh Kehutanan yang loyal tercermin dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan yang selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pada surat penugasan dan pedoman atau petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari setiap kegiatan.

Adaptif

Perilaku Penyuluh Kehutanan yang adaptif dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat tercermin pada berbagai upaya, inovasi dan pengembangan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas, memenuhi kebutuhan sasaran penyuluh-

an dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh sasaran penyuluhan. Untuk menghasilkan inovasi baru selain melalui pengamatan, percobaan dan kajian-kajian, Penyuluh Kehutanan terkadang termotivasi dari upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh sasaran penyuluhan.

Kolaboratif

Perilaku Penyuluh Kehutanan yang kolaboratif dalam pelaksanaan tugas, salah satunya tercermin dari aktifitas mendampingi KTH binaannya. Penyuluh Kehutanan cenderung selalu terbuka, bekerja sama dan mencari solusi bersama untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, menghasilkan nilai tambah atau keberhasilan pelaksanaan kegiatan, dan mempercepat pencapaian tujuan bersama. Menumbuhkembangkan sinergitas dan partisipasi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam kegiatan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dalam proses pendampingan sasaran penyuluhan.

Semoga Penyuluh Kehutanan semakin BerAKHLAK dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat. ●

Dr. Hendro Asmoro, SST, MSI

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan BP2SDM, Kemneterian LHK

MEMBANGUN EKONOMI HIJAU SEKTOR MIKRO LHK MELALUI PENDAMPINGAN USAHA PRODUKTIF KTH

Ekonomi hijau menjadi isu yang dibahas pada rangkaian gelaran presidensi G20 Tahun 2022 terutama dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai unit bisnis UMKM skala mikro menjadi salah satu sector yang potensial dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau. Dalam melaksanakan usahanya tak sedikit KTH yang mempraktekan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga hutan dari kerusakan, melindungi mata air dan menjaga keanekaragaman hayati. Pendampingan secara terus menerus oleh Penyuluh Kehutanan terhadap usaha produktif KTH dalam mewujudkan ekonomi hijau mutlak diperlukan.



Tradisi Merti Dusun Saparan di Desa Ngelinggo, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kegiatan Merti Dusun Saparan yaitu membersihkan induk sumber air.



Ekonomi Hijau, apa dan mengapa?

Mainstreaming ekonomi hijau telah dilakukan oleh PBB pada Tahun 2012 melalui Konferensi Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan Rio +20 di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi tersebut merupakan tindak lanjut atas Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) yang dikenal juga sebagai KTT Bumi yang dilaksanakan 20 tahun sebelumnya pada tahun 1992 di kota yang sama. Pada Rio+20, pemerintah negara sepakat untuk membingkai ekonomi hijau sebagai alat penting untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, tanpa meninggalkan kelestarian ekosistem bumi.

United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai “ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Dalam bentuk yang paling sederhana, ekonomi hijau dapat dikatakan sebagai ekonomi yang rendah karbon, menggunakan sumber daya dengan efisien, serta inklusif secara sosial. “Eko-

nomi hijau merupakan pengembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Transformasi Indonesia dan dunia menuju ekonomi hijau akan menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak penerapan ekonomi ekstraktif sebelumnya dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial dan tetap menjaga kualitas lingkungan. Terdapat 5 prinsip dalam konsep ekonomi hijau berdasarkan laporan ilmiah berjudul “Principles, Priorities and Pathways for Inclusive Green Economies” yang disampaikan pada Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan di New York Tahun 2020. Kelima prinsip tersebut meliputi:

- 1) Prinsip kesejahteraan, yaitu memungkinkannya semua orang untuk mewujudkan dan menikmati kesejahteraan;
- 2) Prinsip keadilan, yaitu mempromosikan kesetaraan dalam satu generasi dan antar generasi;
- 3) Prinsip batas planet, yaitu menjaga, merestorasi, dan berinvestasi pada alam;

4) Prinsip efisiensi dan kecukupan, yaitu diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab;

5) Prinsip *good governance*, yaitu dipandu oleh institusi-institusi yang akuntabel dan tangguh.

Perkembangan Ekonomi Hijau di Indonesia

Kebijakan ekonomi hijau di Indonesia telah dimulai saat Indonesia ikut menyepakati Agenda 21 bersama 177 negara lain pada KTT Bumi. Agenda 21 merupakan program aksi dunia untuk lingkungan dan pembangunan serta pernyataan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundangan dan meratifikasi berbagai kesepakatan terkait yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, antara lain: UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change*; Perubahan UU No. 4 Tahun 1982 menjadi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Adapun perkembangan dalam 5 tahun terakhir, pemerintah menerbitkan UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change*; UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir yaitu terbitnya Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Ekonomi hijau juga termuat dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Dalam gelaran presidensi G20 Tahun 2022, ekonomi hijau selalu menjadi isu yang dibahas pada rangkaian pertemuan teru-

tama dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Salah satu dari lima pilar Presidensi G20 Indonesia 2022 mengangkat isu pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif dengan tujuan menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ekonomi hijau dianggap sebagai kunci keberhasilan Implementasi kebijakan *Net Zero Emission* melalui Pembangunan Rendah Karbon sebagaimana yang tercantum pada UU No. 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Indonesia menetapkan target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional.

UMKM, KTH dan Peranannya Terhadap Ekonomi Hijau

Apabila menilik pada pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi hijau, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang tepat untuk dikembangkan ke arah kebijakan ekonomi hijau. Unit mikro kecil dan menengah merupakan salah unit-unit ekonomi terkecil yang bersinggungan dengan rumah tangga dan berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) Tahun 2021 menyebutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 61,07% atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. UMKM menjadi penyerap tenaga kerja terbesar karena mampu menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada, Selain itu, UMKM dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia yang akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) berdasarkan Permen LHK No. 89 Tahun 2019 didefinisikan sebagai kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan baik yang ada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Selain mengembangkan usaha produktif, KTH juga berfungsi sebagai media pembelajaran masyarakat, wadah kerja sama dan gotong royong serta media masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Berdasarkan klasifikasi UMKM menurut UU No.20 Tahun 2008, KTH sebagai unit bisnis tergolong ke dalam UMKM skala mikro dengan kriteria kepemilikan aset kurang dari 50 Juta dan omset pendapatan kurang dari 300 Juta. KTH sebagai unit bisnis memiliki ciri-ciri, yaitu:

- Melakukan kegiatan di bidang kehutanan.
- Sedikitnya terdiri dari 15 anggota yang mengelola usaha secara bersama-sama.
- Umumnya mengembangkan lebih dari satu jenis usaha, misalnya: hutan rakyat, agroforestry, agrosilvopastura, agrosilvofishery, pembibitan, pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan dan lain-lain.
- Terdapat unsur pelaku utama yang berdomisili dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan.

KTH yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan telah diberikan izin atau hak perhutanan sosial disebut Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Pembentukan KUPS oleh pemerintah dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan hutan untuk diolah dan diambil manfaatnya dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Bergerak dalam bisnis mengelola sumber daya alam, KTH harus memahami konsep daya dukung dan daya tampung. Pada prakteknya, konsep daya dukung dan daya tampung sudah melekat dalam nilai-nilai keseharian anggota KTH beriringan dengan proses bisnis KTH. Tidak sedikit KTH yang mempraktekan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga hutan dari kerusakan, melindungi mata air dan menjaga

keanekaragaman hayati.

Sebagai contoh, KTH Mekar Tani yang berlokasi di Perbukitan Menoreh, Dusun Nglinggo, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. KTH Mekar Tani memiliki usaha kehutanan agroforestri hutan rakyat, budidaya kapulaga, aren dan pengembangan jasa wisata.

Nilai kearifan lokal yang dianut oleh KTH Mekar Tani yaitu menjaga dan melindungi mata air. Dalam upaya menjaga sumber mata air, KTH terus berusaha untuk menghijaukan Perbukitan Menoreh. Setiap bulan safar dalam kalender jawa, anggota KTH melakukan kegiatan “Merti Dusun Saparan” yang salah satu kegiatannya adalah bergotong royong membersihkan induk sumber mata air.

Contoh lain adalah KTH Agni Mandiri yang berlokasi di Desa Sruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. KTH Agni Mandiri mengembangkan usaha hutan rakyat silvopastura dengan produk yang dihasilkan yaitu hasil hutan kayu dan non kayu. KTH Agni Mandiri mengolah kotoran ternak menjadi produk biogas. Kearifan lokal yang dilakukan oleh KTH Agni Mandiri yaitu melakukan penanaman sebelum menebang kayu dari hutan rakyat. Kelompok Tani Hutan Agni Mandiri menjadikan sumber mata air sebagai suatu hal penting yang harus selalu dijaga. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan KTH yang lakukan penanaman bambu di kanan kiri sungai.

Kelompok Tani Hutan yang mengembangkan usaha kerakyatan di bidang kehutanan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal pelestarian hutan dan alam menjadi sangat selaras dengan tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Diversifikasi usaha yang umum dilakukan oleh KTH menjadi kelebihan tersendiri bagi ketahanan ekonomi terhadap guncangan sebagaimana yang terjadi pada Tahun 2008 saat UMKM menjadi salah satu sektor yang menyelamatkan Indonesia dalam guncangan krisis global.

Pendampingan Ekonomi Hijau Usaha Produktif KTH

Peran KTH dalam mendukung terwu-



KTH Agni Mandiri melakukan penanaman sebelum menebang kayu.

judnya ekonomi hijau masih memerlukan dukungan berbagai pihak. Kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan penyuluh Kehutanan pendamping KTH masih sangat diperlukan untuk memastikan semua aspek bisnis hijau KTH terpenuhi.

Penyuluh Kehutanan pendamping tentu saja memegang peranan yang sangat penting sebagai fasilitator, motivator sekaligus memberikan bimbingan teknis kepada KTH. Penyuluh Kehutanan pendamping menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam membina kegiatan dan usaha KTH sekaligus menjadi jembatan antara KTH dan pihak swasta serta stakeholder lainnya.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama oleh pemerintah, penyuluh/pendamping dan stakeholder lainnya agar dapat mengawal dan mendampingi KTH mengembangkan kegiatan usahanya kearah ekonomi hijau antara lain:

1. Pendanaan Hijau

Modal umumnya menjadi permasalahan yang sering dihadapi dalam mengembangkan usaha KTH. Keterbatasan modal membuat petani sulit untuk berinovasi dan mengembangkan skala bisnisnya. Dalam proses produksi, modal menjadi salah satu

faktor input yang sangat penting untuk menentukan tinggi rendahnya pendapatan, meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor yang berpengaruh.

Saat ini, sudah banyak sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh usaha berbasis kelompok seperti KTH. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 51/POJK.03/2017 telah mewajibkan kepada Lembaga Jasa Keuangan seperti perbankan untuk mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan yakni dukungan sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Sebagai contoh BRI telah menyediakan skema pinjaman yang dapat diakses oleh KTH melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Kemitraan.

Dari APBN, Kementerian LHK telah menyediakan berbagai fasilitasi untuk meningkatkan kelola usaha, kelola kelembagaan dan kelola kawasan. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau KTH yang telah diberikan izin pengelolaan, dapat mengakses bantuan pengembangan usaha perhutanan sosial nusantara atau yang biasa dikenal dengan “Bang PeSoNa” dalam bentuk bantuan keuangan dan bantuan

alat ekonomi produktif. Sedangkan untuk KTH yang mengelola hutan rakyat atau hutan di tanah hak milik, Kementerian LHK memfasilitasi pengembangan KTH Mandiri bagi KTH yang telah memiliki kelembagaan dan usaha yang berkembang (Kelas Madya) dalam bentuk bantuan keuangan.

Pembiayaan melalui APBN ini masih sangat bergantung dengan ketersediaan anggaran. Menghadapi keterbatasan tersebut, Kementerian LHK memfasilitasi kemitraan lingkungan antara kelompok perhutanan sosial dengan stakeholder mengusung prinsip saling menguntungkan dan memperhatikan aspek konservasi dan kelestarian hutan.

Penambahan modal alat ekonomi produktif juga dapat diusulkan melalui skema dana transfer daerah DAK Fisik Kehutanan melalui menu Alat Ekonomi Produktif baik untuk KTH yang mengelola kawasan hutan maupun KTH yang mengelola hutan di luar kawasan. Kekurangannya adalah arah kebijakan DAK yang tematik dan terbatas pada lokasi prioritas menyebabkan bantuan tidak dapat diakses oleh seluruh provinsi.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memiliki skema pembiayaan

usaha untuk petani KTH dalam bentuk pinjaman tanpa anggunan dengan syarat pengajuan : petani merupakan anggota KTH, memiliki/menguasai lahan secara legal, melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau memiliki tegakan pohon yang ditanam di areal miliknya.

Hal yang masih menjadi catatan adalah pemberian insentif bagi KTH yang telah berhasil mengelola hutan dan usahanya secara berkelanjutan yang masih belum banyak diatur. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup baru memiliki rencana ke depan untuk melakukan pemberian insentif melalui program *Green Climate Fund*.

2. Produksi Hijau

Produksi hijau didefinisikan sebagai proses menghasilkan produk/ barang/ jasa dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan antara nilai ekonomi dan manfaat yang dihasilkan dengan kelestarian fungsi lingkungan. Prinsip dalam mencapai produksi hijau selaras dengan penerapan produksi bersih (cleaner production) pada industri yaitu dengan meminimalkan penggunaan bahan baku dan bahan pendukung serta meminimalisasi terbentuknya limbah yang akan menjadi beban pencemar bagi lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai produksi hijau antara lain:

- Efisiensi penggunaan bahan baku, air dan energi dalam setiap tahapan produksi, pengolahan, pengemasan hingga penyimpanan.
- Mengurangi atau menghilangkan bahan berbahaya dan beracun.
- Penggunaan teknologi yang mencakup modifikasi proses dan modernisasi peralatan dengan tujuan mengurangi limbah dan emisi.
- Penerapan operasional yang baik (good house keeping) yang meliputi unsur-unsur pengawasan prosedur, pencegahan penggunaan bahan baku secara boros, segregasi limbah, penjadwalan produk dan lain sebagainya.
- Penggunaan kembali bahan-bahan yang masih bisa dimanfaatkan melalui proses daur ulang.
- Melakukan pengolahan limbah hasil

buangan sesuai standar.

Pada KTH yang mengelola hutan rakyat dengan hasil hutan kayu sebagai produknya, produksi hijau diterapkan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan mengacu pada Standar Khusus Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat atau standar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang diterbitkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Adapun pada KTH yang memiliki usaha pengelolaan jasa lingkungan, produksi hijau diarahkan untuk mengacu pada SNI Pengelolaan Pariwisata Alam atau SNI Pengelolaan Pendakian Gunung apabila terdapat jasa wisata pendakian.

Pemerintah pada konteks produksi hijau berperan dalam menyediakan standar-standar produksi hijau berbagai komoditas yang dikembangkan oleh KTH. Selain itu, peran pemerintah dalam hal pengawasan perlu lebih ditingkatkan. Pemberian insentif dan disintensif terhadap KTH yang telah melakukan produksi hijau dapat ditempuh untuk mendorong percepatan penerapan produksi hijau di tingkat tapak.

3. Transformasi Digital

Transformasi digital memang menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah unit organisasi, terlebih pada KTH yang SDMnya masih relatif rendah. Indonesia, pada dasarnya masih dalam tahap awal transformasi digital. Namun demikian, transformasi digital telah menjadi keharusan untuk setiap wirausaha yang ingin memasuki pasar persaingan saat ini. Produk KTH saat ini dihadapkan pada persaingan yang sangat ramai dan kompetitif baik skala lokal maupun global. Apabila KTH tidak dapat mengikuti era digitalisasi sebagaimana saat ini, usaha KTH akan sulit menghadapi tantangan kedepan.

Transformasi digital pada KTH tidak hanya sebatas memasarkan produk secara online saja. Penggunaan teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien perlu diterapkan untuk setiap penanganan pekerjaan. Penggunaan buku kas digital, pemasaran digital, penggunaan media digital untuk kolaborasi penyelesaian pekerjaan menjadi hal dasar dari transformasi digital yang perlu dikuasai oleh KTH.

Terkait aspek pemasaran, Kementerian LHK melalui Ditjen PSKL dan Badan P2SDM menyediakan Pesona Mart yang berfungsi sebagai jendela atau etalase produk KUPS dan *Forestamart* yang menyediakan etalase digital produk-produk KTH. Namun, sejauh ini Pesona Mart dan *Forestamart* belum optimal dalam mempromosikan produk-produk KTH dikarenakan pengetahuan masyarakat sebagai pasar produk KTH pada dua aplikasi tersebut masih kurang. Selain memiliki jendela etalase sendiri, pada Tahun 2019, KLHK bekerjasama dengan *e-commerce shopee* memasarkan produk-produk HHBK melalui Kanal Kreasi Nusantara.

Pada dasarnya peran pemerintah saat ini lebih diharapkan untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih melek terhadap teknologi, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat penetrasi digital dan penyediaan sarana prasarana dasar IT. Hal ini dilakukan, kaitannya dengan penelitian Forbes yang menyebutkan bahwa 62% kegagalan transformasi digital banyak dipengaruhi oleh ketidaksiapan karyawan/pelaku usaha untuk menghadapi perubahan. Kementerian LHK telah memiliki nota kesepahaman dengan Kemenkoinfo yang ditandatangani Tahun 2020 dalam lingkup fasilitasi penyediaan infrastruktur, pengembangan konten aplikasi informatika dan fasilitasi digitalisasi serta peningkatan kapasitas SDM. Namun hingga saat ini, tindak lanjut terhadap nota kesepahaman tersebut masih belum terlaksana.

Terakhir, Pembangunan sektor mikro LHK melalui KTH kearah ekonomi hijau diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja tanpa mengabaikan fungsi lingkungan. Namun demikian, mengubah pola pikir dan pola konsumsi masyarakat untuk lebih peduli dan ramah terhadap lingkungan menjadi kunci pendorong pembangunan ekonomi hijau dapat berhasil. ●

Niken Probo Laras, S.Hut, M.Si

Analisis Anggaran Ahli,
Pusat Penyuluhan BP2SDM, Kementerian LHK

KETELADANAN PAK WIRATNO,

INSPIRASI BAGI PENYULUH KEHUTANAN

Keteladanan Wiratno bisa menginspirasi Penyuluh Kehutanan dalam menjalankan perannya sebagai pendamping masyarakat. Menurut Wiratno, penyuluh kehutanan diakui keteladannya oleh masyarakat karena perannya sebagai *leader* atau pemimpin yang memotivasi, mendorong, mengajak masyarakat serta mempunyai visi jangka panjang. Penyuluh Kehutanan sebagai pemimpin juga harus memberikan contoh (*leading by example*), salah satunya melalui demplot atau percontohan penyuluhan, mampu membantu masyarakat, berorientasi solusi serta menciptakan inovasi.



Ir. Wiratno, M.Sc
(Tenaga Ahli Menteri Bidang Restorasi dan Kemitraan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Aktifitas, keberhasilan dan prestasi Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak dalam pemberdayaan masyarakat dan pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Namun demikian, belum seluruhnya para Penyuluh Kehutanan memberikan performa terbaiknya di lapangan. Untuk itu diperlukan dorongan dan motivasi yang dapat meningkatkan kinerja para penyuluh terutama Penyuluh Kehutanan ASN, terlebih sejak Juli 2021 lalu Presiden RI telah meresmikan ASN Berakhlak sebagai *Core Values* ASN seluruh Indonesia. Untuk itu, Majalah Penyuluhan Kehutanan “Kenari” Edisi Tahun 2022, salah satu artikelnya mengangkat tema

“Internalisasi ASN Berakhlak dalam Kegiatan Penyuluhan Kehutanan”. Sehubungan dengan hal tersebut, redaksi Kenari menyajikan hasil liputan dan bincang-bincang dengan Bapak Ir. Wiratno, M.Sc Tenaga Ahli Menteri Bidang Restorasi dan Kemitraan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan tiga terbaik Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan pada Anugerah ASN Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian PAN RB. Berikut adalah wawancara dengan beliau.

Apakah Bapak berkenan menceritakan awal karir Bapak menjadi ASN sampai ditetapkannya Bapak sebagai tiga terbaik Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan pada Anugerah ASN Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian PAN RB?

“Tahun 1989-1992 sebagai Instruktur pada Balai Latihan Kehutanan Manokwari. Kemudian tahun 1992-1993 sebagai Instruktur pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan di Bogor. Tahun 1994-1999 sebagai Kepala Seksi Pemolaan Konservasi Wilayah I Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Tahun 1999-2001 sebagai Kepala Unit Konservasi Sumberdaya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Tahun 2001-2004 diperbantukan sebagai Analis Kebijakan di Conservation Internasional Indonesia. Tahun 2005-2007 sebagai Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser, Ditjen PHKA. Tahun 2007-2011 sebagai Kepala Sub Direktorat Pemolaan dan Pengembangan, Direktorat Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA. Tahun 2012-2013 sebagai

Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Nusa Tenggara Timur, Ditjen PHKA. Tahun 2014-2015 sebagai Direktur Bina Perhutanan Sosial, Ditjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial. Tahun 2015-2017 sebagai Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Tahun 2017-2022 sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Saya ditetapkan menjadi tiga terbaik Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan pada Anugerah ASN Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian PAN RB dengan inovasi “Kemitraan Konservasi sebagai Solusi Jalan Tengah Perambahan di Kawasan Konservasi”. Tugas saya adalah mengelola 27,14 juta hektare kawasan konservasi. Oleh karena itu pada tahun 2018 saya mengembangkan Kebijakan Kemitraan Konservasi sesuai dengan Perdirjen KSDAE No 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yaitu memberikan akses kelola kepada masyarakat yang lahannya sempit untuk diberikan hak kelola dan diberi kewajiban untuk membantu KSDAE dalam menjaga kawasan, mencegah perburuan atau perambahan kawasan hutan. Sampai dengan Oktober 2021 tercapai 176.584 hektare yang tersebar di 57 UPT KSDAE di 260 desa dengan masyarakat petani yang

terlibat 1.261 Kepala Keluarga”.

Dari sudut pandang Bapak, bagaimana kegiatan penyuluhan kehutanan yang sudah berlangsung sejauh ini? Idealnya seperti apa?

“Model penyuluhan tidak *one way communication* tetapi lebih kepada latihan dan kunjungan serta model penyuluhan berbasis sekolah lapangan. Dalam teori ada *farmers to farmers* dimana petani harus belajar dari petani lainnya yang lebih maju dan Penyuluh Kehutanan sebagai fasilitator. Disitu akan terjadi saling berkomunikasi sehingga lebih efektif. Penyuluhan di era digital, petani sudah banyak yang memiliki android sehingga Birokrat harus mengubah budaya kerja untuk lebih merespon perkembangan di tingkat publik. Indonesia mempunyai sekitar 74.000 desa, di kawasan hutan negara ada sekitar 27.000 desa, 6.700 desa berada di sekitar kawasan konservasi. Jika kawasan hutan bisa lestari maka masyarakat akan sejahtera. Maka bekerja dengan desa penyangga itu penting. Masyarakat/KTH diposisikan sebagai pelaku utama/sebagai subyek juga berimplikasi bahwa manfaat hutan diupayakan sebesar-besarnya untuk masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan itu, dengan tetap berpegang pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologi/lingkungan/kelestarian hutan dan sosial-budaya. Sehingga peran penyuluhan besar. Dimana prinsip pem-

berdayaan petani ada tiga “K” yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Penyuluhan saat ini sudah bagus dan harus terus berlanjut. Dari sisi pemasaran, sudah ada keterlibatan atau kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki sosio entrepreneurship untuk mendukung petani usaha contohnya madu, kopi, dan jamur. Kemudian dari sisi kelembagaan, adanya Koperasi itu bagus. Karena sokoguru kita adalah Koperasi. Keberhasilan perhutanan sosial juga karena pendampingan Penyuluh Kehutanan.

Terkait ASN berakhlak, menurut Bapak bagaimana internalisasi nilai-nilai Berakhlak bagi pegawai Kementerian LHK? Bagaimana nilai-nilai Berakhlak ini dapat menjadi indikator keteladanan bagi ASN lainnya?

“Pertama berorientasi pelayanan bahwa dalam publik services budaya kerja harus melayani, mendampingi dan mendorong *public literasi* (harus melek aturan pemerintah) masyarakat. Kedua akuntabel bahwa yang dilakukan bisa diukur dan dipertanggungjawabkan. Hasilnya ada yang mudah diukur ada yang sulit diukur. Misalkan menyelamatkan satwa itu ukurannya dengan dilepas tetapi nilainya berapa tidak bisa seperti manusia atau existence value, tapi kita mendekatinya jika ada harimau maka hutannya berarti masih bagus, pakan masih cukup. Ketiga kompeten bahwa ASN



Wawancara Penulis KENARI dengan Ir. Wiratno, M.Sc di Ruang Kerja.

harus memiliki kompetensi atau keahlian yang bisa diukur dari *knowledge*, *skill* dan *attitude* (kompeten berarti profesional di bidangnya). Keempat harmonis dapat internal dan eksternal, meliputi membangun kekompakan, tata kelola keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dan harus bisa dirasakan manfaatnya di tingkat bawah. Kelima loyal bahwa dalam memberikan masukan pada pimpinan berdasar data dan informasi yang akurat. Loyal bisa diartikan dengan 5 prinsip sebagai *regulation based* yaitu berbasis regulasi/aturan, *scientific based* berbasis keilmuan, *evidence based* berdasar fakta di lapangan, *experience based* berdasar pengalaman dan *precautionary principle based* berbasis prinsip kehati-hatian. Keenam adaptif bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan selalu berubah dinamis. Makanya perencanaan harus selalu dilihat secara adaptif. Harus melakukan adaptasi atau penyesuaian, menemukan masalah di lapangan dan mencari solusi serta mengembangkan inovasi. Inovasi itu harus berasaskan kebaruan dan kemanfaatan. Ketujuh kolaboratif keterlibatan dengan multipihak baik pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat atau *participatory learning* melalui monitoring evaluasi melibatkan banyak pihak dan harus ada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan bersama”.

Menurut Bapak, apa saja yang harus dilakukan para Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah kerjanya sehingga bisa menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak?

“Pertama Penyuluh Kehutanan harus mempunyai jaringan atau *networking* baik dengan pengusaha, praktisi kehutanan, bermitra dengan local champion dan akademisi. Kedua Penyuluh Kehutanan harus mempunyai modal *open mind* harus terbuka pikirannya terhadap sesuatu yang baru. Ketiga Penyuluh Kehutanan harus proaktif. Sifat proaktif bukan sekedar mengambil inisiatif. Proaktif adalah suatu perilaku fungsi dari keputusan, bukan kondisi atau situasi. Penyuluh yang proaktif selalu mempunyai inisiatif dan



Penulis KENARI berfoto bersama Ir. Wiratno, M.Sc.

tanggungjawab untuk membuat semua yang diimpikan, dicita-citakan dapat terjadi. Keempat Penyuluh Kehutanan harus mampu menguasai lapangan. Kelima Penyuluh Kehutanan harus menjadi penghubung atau *connector*. Contohnya saat membentuk Koperasi KTH maka Penyuluh Kehutanan harus mendampingi KTH, menghubungkan dengan pihak lainnya”.

Sebagai informasi, Pusat Penyuluhan BP2SDM setiap tahunnya menyelenggarakan Lomba Wana Lestari yang salah satu kategorinya yaitu Penyuluh Kehutanan PNS teladan. Terkait hal tersebut, apa pesan-pesan Bapak untuk memotivasi para Penyuluh Kehutanan di seluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan pendampingan agar dapat meningkatkan kinerja sehingga bisa menjadi penyuluh teladan?

“Menjadi Penyuluh Teladan itu karena keteladanan. Penyuluh Kehutanan harus berperan sebagai leader atau pemimpin yang memotivasi, mendorong, mengajak masyarakat serta mempunyai visi jangka

panjang. Sebagai Penyuluh Kehutanan juga harus mempunyai demplot penyuluhan atau percontohan. Istilahnya *leading by example* yaitu memimpin dengan memberi contoh. Menjadi Penyuluh Teladan itu yang mengakui adalah masyarakat. Masyarakat yang mengetahui tingkah laku Penyuluh Kehutanan dalam membantu masyarakat, berorientasi solusi serta menciptakan inovasi”.

Dyah Ekaprasetya Manggala Rimbawati, S.Hut, MSI

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan, Badan P2SDM, Kementerian LHK

MEMANTIK MOTIVASI PENYULUH KEHUTANAN DALAM MENCEGAH KARHUTLA, BANJIR DAN LONGSOR

Apel Siaga Penyuluh Kehutanan bertujuan untuk mensiagakan Penyuluh Kehutanan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan serta banjir dan longsor melalui peran pendampingannya di tengah masyarakat. Apresiasi dan arahan yang disampaikan Ibu Menteri LHK pada apel siaga ini mampu memantik motivasi sekaligus menjadi tantangan bagi Penyuluh Kehutanan agar selalu siap siaga dalam menjalankan tugas dalam segala bidang termasuk dalam pencegahan bencana kebakaran hutan, banjir dan longsor. Untuk membekali Penyuluh Kehutanan dalam menjalankan tugasnya diselenggarakan juga kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dalam menghadapi karhutla banjir dan longsor. Harapannya Penyuluh Kehutanan dapat meningkatkan perannya dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, banjir dan longsor.



Sejak Covid 19 melanda Indonesia kurang lebih 2 tahun lalu, akhirnya Penyuluh Kehutanan bisa berkumpul kembali dalam sebuah pertemuan besar yang diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan. Pertemuan besar tersebut adalah Apel Siaga dan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dalam rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan La-

han, Banjir Serta Longsor. Kurang lebih 300 orang Penyuluh Kehutanan yang berasal dari Jawa Barat, Banten dan beberapa UPT Kementerian LHK hadir secara langsung pada acara yang digelar di Plaza Ir. Soedjono Suryo, Manggala Wanabakti, Jakarta pada Rabu, 15 Juni 2022. Apel siaga dipimpin langsung oleh Menteri Menteri LHK serta dihadiri juga

oleh Wakil Menteri LHK, Sekjen KLHK, Staf Ahli Menteri, Tenaga Ahli Menteri, Ketua Umum IPKINDO, dan Plt.Kepala BP2SDM, serta diikuti oleh seluruh instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan provinsi yang hadir secara virtual.

Kehadiran Menteri LHK, Siti Nurbaya memberikan kesan tersendiri bagi para Penyuluh Kehutanan. Terlebih lagi



Menteri LHK Memberikan Sambutan pada Apel Siaga.

Menteri LHK menyampaikan apresiasi dan motivasi bagi Penyuluh Kehutanan untuk terus berkiprah bersama masyarakat membangun lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak. Dalam sambutannya, Menteri LHK menyampaikan apresiasi, dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada para penyuluh Kehutanan di seluruh penjuru tanah air, atas kerja keras, dan karya nyata Penyuluh Kehutanan dalam memberikan kinerja terbaik di wilayah kerjanya masing-masing dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta memberdayakan masyarakat baik di dalam dan di luar kawasan hutan termasuk dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta banjir dan longsor.

Lebih lanjut, Menteri LHK mengungkapkan bahwa upaya pengendalian dan pencegahan Karhutla kemudian penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi banjir dan longsor, pada dasarnya merupakan upaya bersama antara aparat dan masyarakat. Peran dan kinerja Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak sangat penting untuk memberikan edukasi dan mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut. Menurut Menteri LHK, Apel Siaga Penyuluh Kehutanan ini

merupakan wujud nyata Penyuluh Kehutanan yang selalu antisipatif, siapsiaga dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan fungsi hutan serta tanggap terhadap perubahan iklim dalam upaya membangun soliditas, memperkuat *in-group feeling* dalam jajaran KLHK.

Selanjutnya Ibu Menteri juga berpesan kepada para penyuluh kehutanan untuk terus melakukan konsolidasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan dengan berbagai elemen di masyarakat dan instansi terkait. Penyuluh Kehutanan diharapkan terus meningkatkan peran dan upaya memotivasi dan memberdayakan masyarakat. Selain itu Menteri LHK juga mengajak secara khusus kepada Penyuluh Kehutanan bersama Barisan Muda KLHK untuk semakin aktif memberikan bakti kepada negara melalui kerja-kerja dalam lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing seraya “berjenjang naik, bertangga turun”. Penyuluh Kehutanan juga diharapkan bersama bekerja dalam tatanan birokrasi dalam prinsip AKHLAK dan prinsip kepemimpinan “Didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”. Pesan dan ajakan Menteri LHK tersebut tentunya menjadi pemantik semangat sekaligus menjadi tantangan bagi para penyuluh kehutan-

an dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai tatanan birokrasi sebagai aparatur sipil negara sekaligus juga harus mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan kelestarian fungsi hutan dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Diakhir sambutannya Menteri LHK mengucapkan yel-yel yang diikuti oleh seluruh peserta Apel Siaga yaitu: Penyuluh Kehutanan.... HEBAT!, Masyarakat..... SEJAHTERA!, Hutan dan Lingkungan..... TERJAGA!. Selain itu, pada apel siaga ini juga seluruh peserta Apel Siaga mengucapkan ikrar yang dipandu oleh petugas. Ikrar apel siaga berisi:

- Kami penyuluh kehutanan siap menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, banjir dan longsor
- Kami penyuluh kehutanan siap bekerjasama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, banjir dan longsor
- Kami penyuluh kehutanan, siap menjadi garda terdepan untuk mewujudkan kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Pada kesempatan Apel Siaga tersebut Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, Sekjen KLHK dan beberapa Staf Ahli Menteri menyapa, menyampaikan salam dan memotivasi peserta yang hadir secara virtual.

Tugas berat yang diemban Penyuluh Kehutanan dalam meningkatkan peran dan kolaborasi dengan para pihak dalam mencegah karhutla, banjir dan longsor menuntut Penyuluh Kehutanan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Terkait dengan hal tersebut Pusat Penyuluhan membekali Penyuluh Kehutanan dengan pengetahuan, informasi dan sharing pengalaman tentang pencegahan dan penanganan karhutla, banjir dan longsor melalui acara Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dalam menghadapi karhutla banjir dan longsor. Acara ini dilaksanakan secara faktual di ruang Rimbawan II Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta dan disiarkan secara virtual. Acara ini digelar setelah Apel Siaga dilaksanakan.

Kegiatan Temu Teknis terdiri dari 2 sesi yaitu sesi I berisi pemaparan, sharing

pengalaman dan diskusi yang membahas tema Pencegahan dan SOP Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Narasumber sesi 1 adalah Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Manggala Agni dari DAOPS Muara Bulian (Sumatera 10). Sesi 2 berisi pemaparan, sharing pengalaman dan diskusi yang membahas tema Pencegahan dan SOP Penanggulangan Banjir dan Tanah Longsor. Narasumber sesi 2 adalah Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS yang hadir secara virtual, didampingi oleh Kasubdit Evaluasi pada Direktorat tersebut yang hadir faktual. Sesi sharing pengalaman disampaikan oleh Penyuluh Kehutanan CDK Malang Jawa Timur yang berpengalaman melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan kegiatan lain dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor.

Dalam paparannya, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyampaikan bahwa karhutla merupakan bencana yang sebagian besar timbul karena ulah manusia, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran, pemahaman masyarakat agar kejadian karhutla dapat diminimalisir.



Kepala Pusat Penyuluhan memimpin Apel Siaga.

Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan peran Penyuluh Kehutanan yang dapat bekerjasama dengan manggala agni dan personil lain yang ada di setiap Daops untuk melakukan patroli bersama. Beberapa langkah yang dapat dilakukan Penyuluh Kehutanan dalam patroli karhutla yaitu:

- Monitoring kawasan (sumber air,

kedalaman gambut, tinggi muka air, penumpukan bahan bakaran, cuaca, aktivitas masyarakat yang berisiko terjadinya karhutla)

- Sosialisasi (anjangsana, penyuluhan dll)
- Pencarian informasi dan pemetaan masalah
- Melakukan *groundcheck hotspot* apa-



Ikrar Apel Siaga Penyuluh Kehutanan dibacakan oleh petugas.



bila terdeteksi muncul *hotspot* di wilayah kerja

- Pemadaman dini apabila terjadi kebakaran, meminta bantuan posko daops apabila membutuhkan dukungan

Sama halnya dengan pencegahan dan penanganan bencana karhutla, Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS juga menyampaikan bahwa dalam mencegah dan menangani bencana banjir dan longsor memerlukan peran dan kontribusi Penyuluh Kehutanan. Menurutnyanya selama ini telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) untuk mencegah banjir dan longsor melalui penanaman, kegiatan konservasi tanah dan air (KTA) dan lainnya. Namun demikian ilmu pengetahuan dan keterampilan terkait KTA dan kegiatan sipil teknis bagi Penyuluh Kehutanan masih perlu ditingkatkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Penyuluh Kehutanan yang memiliki pengetahuan tentang KTA dan sipil teknis banyak yang memasuki masa pensiun. Lebih lanjut, dalam paparannya, beliau juga menyampaikan

beberapa langkah yang dapat dilakukan Penyuluh Kehutanan secara spesifik dalam pencegahan dan penanggulangan banjir dan longsor yaitu:

1. Pada kegiatan mitigasi bencana banjir dan tanah longsor
 - Mesosialisasikan lokasi-lokasi rawan bencana kepada masyarakat dan stakeholder terkait
 - Memberikan informasi teknik pengelolaan lahan rawan bencana
 - Pemetaan partisipatif desa rawan bencana
2. Pada saat kejadian bencana
 - Melaporkan lokasi kejadian (koordinat lokasi banjir/titik longsor)
 - Informasi umum kondisi lokasi kejadian bencana (adanya material kayu, bendungan jebol, isu penggunaan lahan)
 - Informasi dampak banjir (korban jiwa, areal terdampak)
 - Memberikan data dan informasi klimatologi (Curah hujan)
 - Memberikan informasi kondisi hidrologi (Tinggi muka air sungai/debit)

- Dokumentasi di lokasi kejadian
3. Pasca kejadian bencana
 - Pendampingan dalam rangka pembangunan konservasi tanah dan air secara vegetatif dan sipil teknis
 - Mengkampanyekan daerah rawan bencana dan pengelolaannya secara rutin

Dengan Apel Siaga dan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dalam menghadapi Karhutla, banjir dan longsor diharapkan Penyuluh Kehutanan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan karhutla, banjir dan longsor. Peran aktif Penyuluh Kehutanan dalam upaya pencegahan Karhutla, banjir dan longsor, dapat dijadikan bukti nyata bahwa Penyuluh Kehutanan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. ●

Indri Puji Rianti, S.Hut, M.S

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan, Badan P2SDM,
Kementerian LHK



WANA LESTARI: APRESIASI DAN MOTIVASI TELADAN LHK PEMBANGUN NEGERI

Semangat dan upaya terus menerus dalam melestarikan lingkungan telah mengantarkan para sosok pejuang kehutanan dan lingkungan menjadi Teladan Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2022 dan memperoleh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemberian Penghargaan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari merupakan salah satu wujud apresiasi atas inisiatif, prestasi dan kinerja serta darma bakti para Teladan dalam mendukung suksesnya program lingkungan hidup dan kehutanan.



Marilah kita semua meningkatkan peran masing-masing untuk membangun dan menyelamatkan hutan menuju cita-cita mulia yaitu Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Alue Dohong

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Teladan Wana Lestari merupakan Teladan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, yang dijamin melalui penilaian Lomba dan Apresiasi Wana Lestari. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan delapan kategori lomba dan empat kategori apresiasi. Kategori lomba meliputi Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani Hutan, Kader Konservasi Alam, Kelompok Pecinta Alam, Pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hak Pengelolaan Hutan Desa dan Pengelola Hutan Adat. Sedangkan kategori apresiasi meliputi Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api. Berdasarkan hasil penilaian lomba dan apresiasi,

telah ditetapkan 45 orang Teladan Wana Lestari Tahun 2022 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor SK.822/MEN-LHK/P2SDM/PEG.7/8/2022 tentang Penerima Penghargaan Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2022 dan SK.821/MENLHK/P2SDM/PEG.7/8/2022 tentang Penerima Penghargaan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2022.

Temu Karya Teladan Wana Lestari merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan apresiasi kepada Teladan Wana Lestari, yang kegiatannya diselenggarakan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tidak seperti tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual karena kondisi Covid-19 di Indonesia, pada tahun 2022 kegiatan Temu Karya dilaksanakan secara faktual atau tatap muka. Rangkaian Temu Karya dimulai dengan acara Pembukaan

di Hotel Santika Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2022, Pemberian Penghargaan, Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD secara virtual dan *Sharing* Teladan di Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc pada tanggal 16 Agustus 2022, Upacara Kemerdekaan RI di Gedung Manggala Wanabakti dan Rekreasi, serta Penutupan di Ancol pada tanggal 17 Agustus 2022.

Spesialnya Temu Karya Tahun 2022

Ada yang berbeda dan spesial dari kegiatan Puncak Pemberian Penghargaan kepada Teladan Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2022, yaitu hadirnya enam Menteri Kabinet Indonesia Maju pada pembukaan acara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono,



Enam Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Wakil Menteri LHK.



Teladan Wana Lestari Tahun 2022 mengikuti Upacara Peringatan Kemerdekaan RI di Manggala Wanabakti.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyempatkan hadir diantara waktu istirahat Sidang Tahunan di Gedung MPR, DPR dan DPD. Sebelum melanjutkan agenda rapat, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mewakili lima Menteri lainnya sempat memberikan dukungan terhadap program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kolaborasi antar Kementerian.

Acara Pemberian Penghargaan kemudian dilanjutkan kembali dengan dipandu oleh Desmona Chandra dan dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, serta Para Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Acara juga disiarkan secara *live* melalui Kanal Youtube Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan"

Dalam arahnya, Wakil Menteri menyampaikan bahwa pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tidak dapat dipisahkan dari partisipasi berbagai pihak dan berbagai elemen masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional serta visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Wakil Menteri juga berpesan agar jangan pernah berhenti untuk mendedikasikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi suri tauladan, pendamping dan penggerak masyarakat untuk lebih berdaya dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan bersama. Diharapkan bahwa para Teladan dapat bekerja cerdas, mengembangkan inisiatif dan kreatifitas, meningkatkan kompetensi, memperluas dan meningkatkan kualitas karya nyata di bidang masing-masing. Wakil Menteri juga berpesan agar selalu menumbuhkembangkan jejaring kerja,

berkolaborasi serta bersinergi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Marilah kita semua meningkatkan peran masing-masing untuk membangun dan menyelamatkan hutan menuju cita-cita mulia yaitu Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan." tutup Wakil Menteri.

Sharing Pengalaman Teladan

Usai dilaksanakannya kegiatan pemberian penghargaan, acara dilanjutkan dengan *Sharing* Pengalaman Teladan yang dipandu oleh Dyah Ekaprastya Manggala Rimbawati, Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Pusat Penyuluhan. Peraih gelar Terbaik I dari delapan kategori lomba dan perwakilan empat kategori penerima apresiasi membagikan pengalamannya dalam aktifitas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang selama ini telah dilakukan. Dengan dilaksanakannya *sha-*

ring pengalaman, diharapkan para teladan dapat berbagi informasi dan memperluas jejaring kolaborasi.

Pameran Komoditas Usaha Kelompok Tani Hutan

Bersamaan dengan kegiatan pemberian penghargaan, Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyelenggarakan Pameran Komoditas Usaha Kelompok Tani Hutan di area Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc. Peserta pameran berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Kelompok Tani Hutan, Dinas Kehutanan/Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO) Provinsi, SMK Kehutanan, sampai Asosiasi dengan komoditas kehutanan. Produk yang ditampilkan sangat menarik dan beragam, diantaranya produk madu dan turunannya, kopi, gula aren, anyaman

bambu, anyaman pandan, kerajinan kayu, olahan jamur, olahan empon-empon, dan berbagai produk lainnya

Upacara HUT RI dan Keliling Jakarta bersama Teladan

Pada tanggal 17 Agustus 2022, 45 orang Teladan berkesempatan mengikuti Upacara Peringatan Kemerdekaan HUT RI ke-77 di Plaza Manggala Wanabakti. Upacara dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono. Teladan Wana Lestari berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, sehingga usai upacara bendera, Teladan kemudian diajak untuk berkeliling Ibukota Jakarta. Mulai dari mencoba moda transportasi MRT (Mass Rapid Transit) sampai berkunjung ke Ocean Dream, Ancol, Jakarta. Dengan rekreasi singkat yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kenangan dan kesegaran untuk para teladan.

Maju Bersama Teladan Wana Lestari

Pemberian penghargaan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirasakan menjadi sebuah pengakuan atas pengabdian untuk lingkungan yang telah dilakukan. Dengan diberikannya Penghargaan Wana Lestari, diharapkan dapat menciptakan rasa bangga dan meningkatkan motivasi para Teladan dalam aktifitas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kebanggaan sebagai pemegang gelar Pemenang Lomba dan Penerima Apresiasi Wana Lestari juga disampaikan oleh perwakilan teladan pada acara Penutupan.

Bersama Teladan Wana Lestari, Membangun Indonesia Maju, Wujudkan Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera!!

Cucu Setiawati, S.Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan, Badan P2SDM,
Kementerian LHK



Booth Pameran KTH Citra Unggul Sejahtera.

DAFTAR PEMENANG LOMBA WANA LESTARI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022

1. PENYULUH KEHUTANAN PNS

TERBAIK I



Tri Andik Setyawan, S.Hut
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

TERBAIK II



Yanti Dwisulistyo Rahayu, S.Hut
Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur

TERBAIK III



Murni, S.P
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta

HARAPAN I



Mulyanah, S.P
Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung

HARAPAN II



M. Saferiansyah, S.Hut
Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan

HARAPAN III



Asri Muliawati, S.Hut
Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Barat

2. PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT (PKSM)

TERBAIK I



Jais
Prov. Jawa Timur

TERBAIK II



Achmad Rif'an
Prov. Jawa Tengah

TERBAIK III



Tri Joko Laksono
Prov. Kalimantan Selatan

HARAPAN I



Andi Subagyo
Prov. Lampung

HARAPAN II



Rustandi, A.Md
Prov. Jawa Barat

HARAPAN III



Susiyanti
Prov. Banten

3. KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)

TERBAIK I



KTH KEPUH
Prov. Jawa Timur

TERBAIK II



KTH AGNI MANDIRI
Prov. Jawa Tengah

TERBAIK III



KTH SADAR TANI MUDA
Prov. Jawa Barat

HARAPAN I



KTH BARU MUNCUL
Prov. Kalimantan Selatan

HARAPAN II



KTH MITRA MANDALA
Prov. Banten

HARAPAN III



KTH MARGO RUKUN VI
Prov. Lampung

> DAFTAR PEMENANG LOMBA WANA LESTARI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022

4. KADER KONSERVASI ALAM (KKA)

TERBAIK I



Slaman
Prov. Jawa Timur

TERBAIK II



Basir Baesuni
Prov. Jawa Barat

TERBAIK III



Badia Roy Ricardo Nababan
Prov. Lampung

5. KELOMPOK PECINTA ALAM (KPA)

TERBAIK I



GEMPA ADVENTURE
Prov. Jawa Timur

TERBAIK II



LAWALATA IPB
Prov. Jawa Barat

TERBAIK III



MAHAPALA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
Prov. Jawa Tengah

6. IZIN USAHA PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKm)

TERBAIK I



GAPOKTAN SUMBER KAHURIPAN
Prov. Kalimantan Selatan

TERBAIK II



GAPOKTAN SUMBER SARI
Prov. Lampung

TERBAIK III



KTH RAMAH LINGKUNGAN
SALO SUMBALA
Prov. Kalimantan Timur

7. HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD)

TERBAIK I



LPHD WAY KALAM
Prov. Lampung

TERBAIK II



LPHD LAUK BERSATU
Prov. Kalimantan Barat

TERBAIK III



LPHD PANGlima JERRUNG
KAMPUNG DUMARING
Prov. Kalimantan Timur

8. PENGELOLA HUTAN ADAT

TERBAIK I



MHA UMA SAUREINU
Prov. Sumatera Barat

TERBAIK II



MHA MULUI
Prov. Kalimantan Timur

TERBAIK III



MHA JALAWASTU
Prov. Jawa Tengah

DAFTAR PENERIMA APRESIASI WANA LESTARI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022

1. POLISI KEHUTANAN (POLHUT)



POLISI KEHUTANAN TRENGGINAS
Sutomo
Balai Pengamanan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wilayah Kalimantan



POLISI KEHUTANAN TANGGUH
Maulana Ustadz
Balai Konservasi Sumber Daya
AlamNusa Tenggara Barat



POLISI KEHUTANAN INOVATIF
Rudi Windra Darusman
Balai Pengendalian Perubahan Iklim
Kebakaran Hutan dan Lahan Wiyaha
Kalimantan

2. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)



Suharno Eka Saputra, S.H
Balai Pengamanan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Sumatera



Arifin Simbolon, SH
Balai Pengamanan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Sumatera



Donni S. Engka, S.P
Balai Pengamanan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Sulawesi

3. MANGGALA AGNI



Decha Sera Mahardhika
Balai Pengendalian Perubahan Iklim,
Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah
Kalimantan



Alijal
Balai Pengendalian Perubahan
Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Sumatera



Azwar
Balai Pengendalian Perubahan
Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Sumatera

4. MASYARAKAT PEDULI API (MPA)



Sudiro
Balai Pengendalian Perubahan
Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Jawa Bali dan
Nusa Tenggara



Richo Andry Pratama
Balai Pengendalian Perubahan
Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Sumatera



Marthen Wabia
Balai Pengendalian Perubahan
Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Maluku dan Papua

Kontributor:

Indri Puji Rianti, S.Hut, M.S (Penyuluh Kehutanan Ahli)
dan Cucu Setiawati, S.Hut (Penyuluh Kehutanan Ahli)
Pusat Penyuluhan Badan P2SDM, Kementerian LHK

PRESTASI

TRI ANDIK SETYAWAN, S.HUT BERKHIDMAT PADA ALAM UNTUK PERADABAN LEBIH BAIK



Tri Andik Setyawan, S.Hut, Penyuluh Kehutanan Ahli Muda di CDK Wilayah II-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi Terbaik I Nasional Lomba Wana Lestari Tahun 2022 kategori Penyuluh Kehutanan PNS. Bagi Andik, menjadi penyuluh kehutanan adalah sebuah panggilan dan kebanggaan karena bisa berbagi ilmu dan peran dengan petani yang notabene merupakan mitra dan objek pembangunan kehutanan. Selain itu, merupakan sebuah kehormatan jika petani mau, tahu dan mampu untuk mengubah perilaku, sikap dan keterampilannya dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan mengenakan seragam penyuluh kehutanan dan motor dinas, berangkat ke posko penyuluhan kehutanan CDK Wilayah II-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, beliaulah Tri Andik Setyawan, S.Hut yang biasa dipanggil Andik yang merupakan penyuluh kehutanan ahli muda. Menurut beliau, menjadi penyuluh kehutanan adalah sebuah panggilan dan kebanggaan karena bisa berbagi ilmu dan peran dengan petani yang notabene merupakan mitra dan objek pembangunan kehutanan. Selain itu juga merupakan sebuah kehormatan jika petani mau, tahu dan mampu untuk mengubah perilaku, sikap dan keterampilannya dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Wilayah kerja Tri Andik meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Keling (123,12 km²), kecamatan Donorojo (108,64 km²) dan kecamatan Karimunjawa (48,47 km²) yang meliputi 24 desa. Wilayah binaan tersebut dari pesisir sampai dengan pegunungan dengan tantangan yang beragam mulai dari topografi hingga terbatasnya aksesibilitas. Permasalahan yang dihadapi berupa abrasi lahan, alih fungsi lahan menjadi tambak budidaya ikan, tingginya lahan kritis, penjarahan hutan, daerah rawan bencana longsor dan banjir, gangguan satwa liar, kurangnya pemahaman kelompok tani dalam pengelolaan hutan secara lestari serta kurangnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Di samping peran aktif dalam pembangunan kehutanan, penyuluh kehutanan juga memberi perhatian di bidang pengelolaan lingkungan dengan terlibat dalam penyusunan regulasi pelestarian lingkungan di wilayah kerja dan mendorong terbentuknya bank sampah. Penyuluh kehutanan juga telah membuat inovasi berupa pembuatan pupuk dan obat dengan berbasiskan bahan alam yang ramah lingkungan.

Awalnya pada tahun 1999, terjadi penjarahan hutan di wilayah Desa Tempur, Kecamatan Keling, kemudian dampaknya terjadi banjir bandang pada tahun 2006. Oleh karena itu, Andik melakukan beberapa kegiatan bersama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) binaannya. KTH

binaan Andik berjumlah 21 KTH yaitu 10 KTH di kecamatan Keling, 9 KTH di kecamatan Donorojo dan 1 KTH di kecamatan Karimunjawa. Dari 21 KTH tersebut terdapat 3 KTH yang sudah menjadi KTH kelas madya yaitu KTH Sido Makmur VII Desa Tempur Kecamatan Keling, KTH Sido Mukti VII Desa Blingoh kecamatan Donorojo dan KTH Ngudi Sampurno III Desa Jugo Kecamatan Donorojo. Komoditas yang dibudidayakan adalah mangrove, agroforestri dengan komoditas kehutanan antara lain sengon, jati, mahoni, bambu, porang, lebah madu yang dikombinasikan dengan komoditas perkebunan antara lain kopi, cengkeh, kelapa, randu, kakao, vanili dll serta pertanian seperti padi, palawija, pisang, jeruk pamel, pepaya, tanaman obat dan lain-lain.

Rehabilitasi Mangrove

Andik mendorong masyarakat untuk melakukan rehabilitasi mangrove pada kawasan pesisir. Beliau bersama masyarakat dan *stakeholder* telah melaksanakan rehabilitasi mangrove seluas 60 Ha selama 10 tahun terakhir. Walaupun rehabilitasi mangrove belum membuahkan secara maksimal, namun Andik telah mengubah perilaku masyarakat untuk lebih peduli

terhadap kelestarian kawasan pesisir, hal ini dibuktikan dengan penyulaman secara swadaya oleh masyarakat.

Agroforestry Kopi

Sejak Tahun 2010, Andik mengajak KTH bersama Pemerintah Desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pola agroforestry. Pola ini terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat dan Alhamdulillah konservasi tanah dan air tetap terjaga dan di sisi lain kesejahteraan masyarakat meningkat. Masyarakat Desa Tempur sangat bersyukur karena rehabilitasi hutan sudah menunjukkan hasil, kali ini terlihat meningkatnya tutupan lahan dan terjaganya sumber mata air dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dari keberhasilan agroforestry tanaman kehutanan dengan kopi serta HHBK seperti madu, porang, vanili dan empon-empon mendorong Desa Tempur menjadi desa wisata berbasis alam. Awal tahun 2022, tanaman kopi seluas 20 Ha, sekarang menjadi 40 Ha dengan produktifitas rata-rata 25 ton/tahun dengan potensi pendapatan Rp.800.000.000,- per tahun. Produksi yang di pasarkan berupa *green*

bean dan bubuk kopi meliputi lingkup nasional. “Mas Andik merupakan teladan bagi petani karena orangnya aktif, energik dan kreatif” ujar Syaiful Anwar, Ketua Gapoktan Sido Makmur.

Agroforestry Porang

Tanaman porang merupakan tanaman baru bagi petani. Hadirnya Andik selaku penyuluh kehutanan memberikan penyuluhan budidaya porang. Porang sebagai salah satu komoditas yang dapat ditanam dengan pola tumpang sari. Salah satunya dengan tanaman sengon yang memiliki nilai potensi ekonomi tinggi dan fungsi konservasi karena pada musim hujan, air hujan tidak langsung hilang karena diserap tanaman. Saat ini di Desa Tunahan terdapat petani porang sebanyak 82 orang dengan luasan kisaran 35 Ha. Menurut Marilan Ketua Gapoktan Karya Utama “Tanaman porang menjadi tabungan tahunan sedangkan tanaman sengon menjadi deposito”.

Silvopastur

Banyak Peran yang telah dilakukan Andik dalam menyadarkan masyarakat terutama dalam penyediaan rumput pakan ternak dengan pola tumpang sari. De-

ngan rumput tersebut, banyak keuntungan yang dirasakan terutama kebutuhan pakan ternak tercukupi, saat ini kelompok tani hutan mengelola sapi sebanyak 65 ekor dalam kandang koloni dengan pola bagi hasil, selain itu tanah tegalan menjadi lebih subur karena pupuk kandang.

Agroforestry MPTS Alpukat

Andik telah membimbing dan membina KTH Sidodadi III dalam pengelolaan lahan tidur seluas 50 Ha. Saat ini, lahan tidur tersebut dapat ditanami alpukat sebanyak 10.000 batang dan sudah berproduksi sekitar 2000 batang. Selain alpukat, lahan tersebut telah ditanami tanaman cengkeh 1000 batang dan sudah berproduksi 500 batang. Untuk satu pohon alpukat dapat menghasilkan kurang lebih Rp2.500.000,- per pohon sedangkan cengkeh Rp.400.000,- per pohon. “Terimakasih kami sampaikan kepada Mas Andik yang telah membimbing dan membina KTH dalam pengelolaan lahan tidur, sehingga kami bisa naik haji dari hasil tersebut. Pergi ke Watuaji makan ketupat, bila ingin naik haji tanamlah alpukat”, ujar H. Sartam, Ketua KTH Sidodadi III sambil berpantun.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

(SVLK)

Setelah adanya SVLK tahun 2018, terlihat perubahan perilaku petani terutama dalam pengelolaan hutan rakyat. “KTH sangat berterimakasih kepada Mas Andik yang dengan susah payah mendampingi kelompok kami dan adanya SVLK sedikit banyak mendorong peningkatan ekonomi anggota kelompok tani kami dan terutama konservasi yang sangat besar. Pada tahun 2018 luas hutan rakyat sekitar 10 Ha dan sekarang menjadi 20 Ha. Adapun komoditas yang ada di hutan rakyat adalah sengon, jati, mahoni, salam dan komoditas agroforestry yang lain”, tegas M. Masyruri, Ketua Gapoktan Langgeng Makmur.

Bank Sampah

Andik juga berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan sampah, dengan mendorong pembentukan bank sampah dengan *stakeholder* terkait. Bank Sampah Darling Surip Desa Jugo merupakan bukti tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup. Keberadaan bank sampah ini telah mengubah perilaku masyarakat sehingga Desa Jugo mendapat predikat Desa Mandiri Sampah.

Inovasi

Hasil karya inovasi teknologi terapan dalam bidang kehutanan yang dihasilkan Andik adalah inovasi Pupuk AKAL (Dari Alam kembali ke Alam) yang berbiaya sangat rendah karena memakai bahan dari alam sekitar kita. Formula pupuk AKAL diantaranya pupuk pembenah tanah AKAL yang menetralkan salinitas berlebih, residu kimia dan merangsang pertumbuhan akar, pupuk organik cair (POC) AKAL, bahan perekat atau pembasah AKAL, ramuan pengendali hama dan penyakit sulfur AKAL, ramuan pengendali hama dan penyakit AKAL dari buah bintaro. Untuk mencoba pupuk AKALnya ini, Andik Memiliki demplot percontohan sendiri di halaman rumahnya yang terdiri dari Vanili, Porang dan Agroforestry sengon dengan talas Beneng. Dengan aplikasi pupuk pembenah tanah dan pupuk organik cair menjadikan sulur vanili lebih besar, daun lebih hijau dan penampakan



Agroforestry Kopi di Desa Tempur.





Tri Andik menerima penghargaan Terbaik I Kategori Penyuluh Kehutanan PNS pada Temu Karya Wana Lestari Tahun 2022

fisik tanaman vanili lebih sehat. Selain itu pupuk AKAL dapat dipergunakan untuk seluruh jenis tanaman.

Selain manfaat yang dirasakan oleh KTH, peran Andik juga dirasakan oleh para pihak lainnya. “Peran Andik sangat membantu pemerintah desa dalam menjaga dan melestarikan alam Desa Tempur. Dengan mengusung program rehabilitasi hutan sangat berguna bagi masyarakat kami, Alhamdulillah Desa Tempur aman”, jelas Kepala Desa Tempur. Selain itu, Andik adalah penyuluh yang aktif, sangat membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya pohon dan hutan untuk menanggulangi bencana longsor dan banjir.

“Selama ini Andik sudah membantu desa dalam penyusunan perdes pelestarian lingkungan maupun dalam membantu desa untuk mengupayakan bibit-bibit tanaman keras dan tanaman kehutanan sehingga pengelolaan air di Desa Jugo selama ini

bisa terjaga dengan baik dan sehingga tidak ada sumber mata air mati atau pun berkurang pada musim kemarau”, tutur Sekretaris Desa Jugo. Budi Santoso, M.Si, KPHK pati Barat-BKSDA Jawa Tengah menjelaskan bahwa Tri Andik turut memperkuat kapasitas masyarakat di sekitar kawasan cagar alam keling 23, wilayah kerja Andik yang beirisan dengan kawasan secara langsung memperkuat ekonomi masyarakat dengan pendampingan KTH dan secara tidak langsung ikut memperkuat keamanan di kawasan cagar alam.

Semua usaha pasti memiliki hasil, menjadi istilah yang kini dirasakan oleh Tri Andik. Berkat keaktifan, inovasi, dan keuletannya dalam mendampingi masyarakat melakukan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Mulai dari rehabilitasi hutan lahan, konservasi, penanaman, pengembangan hutan rakyat dengan pola agroforestry, silvopasture, rehabilitasi mangrove, pengembangan ke-

lompok dan usaha kelompok, kemitraan, pendampingan bank sampah dan mendirikan Desa Jugo menjadi Desa mandiri sampah. Berkat kerja kerasnya tersebut Tri Andik menjadi pemenang Terbaik I Nasional pada Lomba Wana Lestari Tahun 2022 kategori Penyuluh Kehutanan PNS.

Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil dan jadilah manfaat bagi orang lain dan alam. Pelajari alam, cintai alam, bersahabat dengan alam untuk peradaban yang lebih baik. Hal tersebut menjadi salah satu moto hidup Tri Andik sebagai seorang penyuluh kehutanan. Semoga keteladanan Tri Andik dapat menjadikan KTH binaannya semakin berdaya dan mandiri selanjutnya hutan dan alam semakin lestari dan masyarakat sejahtera. ●

Ida Gusti Nurul Nuryudaida, S.Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan, Badan P2SDM, Kementerian LHK

KIPRAH JAIS DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

“Bermula dari keprihatinan terhadap kondisi di wilayah Desa Rejosari tempat tinggalnya yang tandus, jauh dari jangkauan sumber mata air, kesulitan mendapatkan air bersih, sering terjadinya bencana kekeringan serta tanah longsor, mendorong Jaiz untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan”



PKSM Jais

Menjadi seorang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Teladan Wana Lestari tidak pernah terlintas dibenak dan diri Jais, karena kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukannya selama ini hanya atas dasar keikhlasan, gagasan, inisiatif dan kreativitas sendiri, serta hanya mengandalkan kemampuan seadanya. Filosofi hidup bagi seorang Jais adalah menjadikan sebuah tantangan bagi dirinya untuk menitik masa depan yang lebih baik bagi masyarakat desa tempat tinggalnya di zaman yang penuh perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga menjadikan perubahan pengetahuan, perilaku dan keterampilan serta kemandirian masyarakat di desanya dalam pengelolaan suatu kawasan dan lingkungan. Berbekal filosofi hidup itu, Jais berharap dapat menjaga keseimbangan antara produktifitas dan kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di desa tempat kelahirannya.

Profil PKSM Jais

Pria yang bernama Jais ini lahir di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada

tanggal 5 November 1970.. Jais diangkat dan disahkan sebagai PKSM pada tahun 2020 dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jais, yang terlahir sebagai putra daerah sejak usia muda sudah aktif melakukan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sejak tahun 2007, Jais mulai berkiprah dalam keorganisasian kelompok tani hutan, kelompok verifikasi legalitas kayu dan kelompok kelompok keagamaan serta organisasi sosial, dari level desa sampai level provinsi. Untuk level kabupaten dan provinsi sering ditunjuk sebagai penggiat dan narasumber dalam momen-momen penting hari peringatan lingkungan hidup dan kehutanan. Atas inovasi, kreativitas dan aktifitas nyata dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi Jawa Timur. Tahun 2022, Jais menerima Penghargaan Wana Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai PKSM Terbaik Pertama Tingkat Nasional

Rekam Jejak PKSM Jais dalam Pembangunan Lingkungan



Jais berbagi pengalaman di lapangan pada kegiatan Temu Karya Teladan Wana Lestari Tahun 2022.

Hidup dan Kehutanan

Sejak kiprahnya Jais dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2007 hingga sampai dengan saat ini, sudah banyak karya nyata yang dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat

Desa Rejosari Kecamatan Bantur Provinsi Jawa Timur. Beberapa aksi dan karya nyata jaiz dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diantaranya yaitu berhasil membangun hutan rakyat (HR) seluas 300 ha di Desa Rejosari Kecamatan Bantur



PKSM Jais Menerima Kunjungan Kepala Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemen LHK.



Jais Bersama Kadishut Provinsi Jawa Timur dalam Kegiatan Penyuluhan Melalui Siaran Radio Suara Surabaya.



Juara Perunggu Penghargaan Prima Wana Mitra Tahun 2013



Penghargaan program Kampung Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017



Penghargaan Kategori Penyelamat Lingkungan Tahun 2018

dimana sebelumnya Desa Rejosari sangat tandus dan gersang. Pola agroforestri dipilih Jais untuk mengembangkan potensi ekonomi Hutan Rakyat dengan menanam tanaman empon-empon, dan porang di bawah tegakkan Hutan Rakyat. Selain itu, Jais juga terlibat aktif dan menjadi aktor utama dalam kegiatan pembangunan embung yang dinamakan Embung Kutukan di Desa Rejosari.

Sebagai PKSM, Jais menjalin jejaring kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta untuk membantunya

mensukseskan aktifitas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Jais bersama BPDAS-HL Brantas Sampean bekerjasama dalam kegiatan agroforestri, pemberian bibit produktif, pembangunan KBR, pembuatan bangunan sipil teknis seperti IPA, Dam Penahan serta Gullyplug. Untuk peningkatan dan pengembangan usaha, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan fisik berupa mesin pengolahan porang yang meliputi: pencucian porang, pembuatan chip porang, pengovenan porang, pembuatan tepung porang, serta kegiatan SVLK

Hutan Hak dan memberikan bantuan alat pembuatan meuble kepada KPHR Alam Makmur yang diketuai oleh Jais. Untuk menghidupkan Desa Rejosari melalui kegiatan reboisasi, rehabilitasi dan penghijauan, Jais melakukan MoU kerjasama dengan Perum Jasa Tirta 1 Malang dan PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkitan Brantas.

Manfaat Nyata Kegiatan PKSM Jais

Saat ini, berbagai kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah dilakukan Jais tanpa mengenal

lelah, memberikan banyak manfaat dan dampak positif terutama masyarakat di desa kelahirannya. Secara ekologi yaitu meningkatnya tutupan lahan baik tanaman pokok maupun tanaman dibawahnya, serta terciptanya iklim mikro lingkungan. Selain itu, dengan adanya Hutan Rakyat seluas 300 ha yang dibangun Jais, kini Desa Rejosari tidak lagi mengalami kekeringan dan bencana longsor serta menciptakan sumber mata air baru yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.

Secara ekonomi, melalui pemanfaatan lahan dan pengolahan tanaman porang dan empon empon sebagai tanaman bawah tegakan, kini beberapa Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibentuk dan dibinanya dapat menghasilkan pendapatan rutin sekitar 15 – 20 juta per bulan selama

3 tahun terakhir. Sebagian pendapatan tersebut masuk ke dalam kas dana desa. Hal tersebut berdampak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat binaannya

Sedangkan manfaat sosial, kini masyarakat Desa Rejosari dan sekitarnya tumbuh kesadaran untuk pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai kegiatan menanam tanaman keras maupun tanaman bawah tegakan untuk penghijauan ataupun reboisasi kini marak dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rejosari dan sekitarnya.

Prestasi dan Penghargaan PKSM Jais

Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh Jais atas pengabdianya dalam pem-

angunan lingkungan hidup dan kehutanan, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diantaranya adalah: 1) Penghargaan Kalpataru Tahun 2018 sebagai Penyelamat Lingkungan; 2) Penghargaan Wana Lestari Tahun 2022 Kategori PKSM sebagai Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Terbaik Pertama Tingkat Nasional, 3) Penghargaan Program Kampung Iklim Tahun 2017, dan 4) Prima Wana Mitra Perunggu atas keberhasilan Kelompok Tani Hutannya membangun Hutan Rakyat. ●

Firmansyah, S.Hut, M.Si

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan, Badan P2SDM, Kementerian LHK



Jais menerima penghargaan Terbaik I Kategori PKSM pada Temu Karya Wana Lestari Tahun 2022.

PRESTASI



Agroforestry KTH Kepuh.

KTH KEPUH, PELESTARI HUTAN MENDIRO

“Hutan negara di Dusun Mendiro, Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang masuk dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Carang Wulung, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur ini mengalami kerusakan dan menjadi gundul, akibat pembalakan liar yang terjadi pada tahun 1998-1999. Dengan kerusakan hutan itu saya punya prinsip “Jika alas ini rusak padahal statusnya hutan lindung, yang rugi bukan orang jauh tapi masyarakat setempat”, ujar Wagisan, Ketua KTH Kepuh. Berbekal kepedulian bahwa hutan gundul akan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat maka ia bersama beberapa orang di Dusun Mendiro berinisiatif membentuk Kelompok Pelindung Hutan dan Pelestari Mata Air (KEPUH). Berbuah manis, kini Hutan di Dusun Mendiro kembali hijau. Perjuangan KTH KEPUH juga diakui dan diapresiasi hingga meraih Juara Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Kategori Kelompok Tani Hutan Tahun 2022”

Profil Singkat KTH KEPUH

Kelompok Tani Hutan (KTH) KEPUH dibentuk atas inisiatif sendiri yang diketuai oleh Bapak Wagisan. Saat dibentuk KTH KEPUH hanya beranggotakan 18 orang dan saat ini telah bertambah menjadi 40 orang. KTH KEPUH dibentuk berdasarkan Berita Acara Pembentukan tanggal 3 Maret 2015 dan diperkuat dengan SK Kepala Desa No. 145/368/415.73.03/2015 tanggal 3 Maret 2015. Hingga saat ini lahan yang dikelola oleh KTH KEPUH adalah hutan

rakyat seluas 20 ha yang merupakan lahan milik masing-masing anggota kelompok. Di samping itu, anggota KTH KEPUH juga merupakan anggota LMDH yang menjadi mitra Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Carang Wulung, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dalam mengelola hutan negara di Dusun Mendiro. Kolaborasi dengan berbagai pihak yang dilakukan oleh KTH KEPUH, diantaranya dengan Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat, Pemerintah desa

hingga Kabupaten setempat serta LSM, menjadi salah satu kunci sukses dalam mengatasi masalah lingkungan dan sosial di Dusun Mendiro.

Konservasi Hutan Mendiro

Pada awalnya masyarakat melakukan penanaman secara sederhana, yang diawali dengan menanam tanaman kemiri. Pohon kemiri yang ditanam berhasil tumbuh dan berkembang, sehingga banyak anggota kelompok ikut menanam tanaman

tersebut dan berhasil. Akhirnya, KTH KEPUH kompak untuk membuat pembibitan dimana kurang lebih 10.000 bibit tanaman seperti kemiri, jengkol, nangka, petai, durian dan lain-lain ditanam di lahan hutan di Dusun Mendiro secara swadaya. Pada musim kemarau, para anggota KTH KEPUH secara bergiliran menyiram tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan tidak mati sehingga kegiatan reboisasi hutan di Dusun Mendiro berhasil dilakukan. Melalui gerakan penanaman hutan, Wagisan berpendapat bahwa keberadaan pohon-pohon berkayu seperti kayu bendho, durian, kemiri, trembesi, gondang, pucung serta tanaman bambu seperti bambu apus dan bambu petung, akan mampu menahan serta menyimpan air, mencegah bahaya longsor dan banjir bandang. Bukan hanya itu, debit air yang sempat hilang akan kembali.

Selain kegiatan penanaman, KTH KEPUH secara rutin melakukan perawatan hingga monitoring tanaman agar tidak ada yang melakukan kerusakan. Selain melakukan kegiatan konservasi di lahan yang dimiliki oleh masing-masing anggota, KTH KEPUH turut mengelola lahan garapan milik perhutani sekitar 32 Ha dan melakukan kegiatan konservasi di dalamnya dengan melakukan penanaman dan peninjauan lokasi mata air dan hutan yang rusak akibat pembalakan liar dan pengalihfungsian hutan lindung menjadi hutan produksi di Kesatuan Pengelolaan Hutan Carang Wulung, Wonosalam, Jombang pada tahun 2015. Selain itu juga melakukan pemasangan tanda di lokasi titik-titik mata

air, tidak boleh ada penebangan pohon dalam jarak radius 200 Meter dari titik mata air, permohonan hutan Carang Wulung sebagai laboratorium alam, dan peninjauan kembali aktivitas di Selo Lapis sebagai ekowisata.

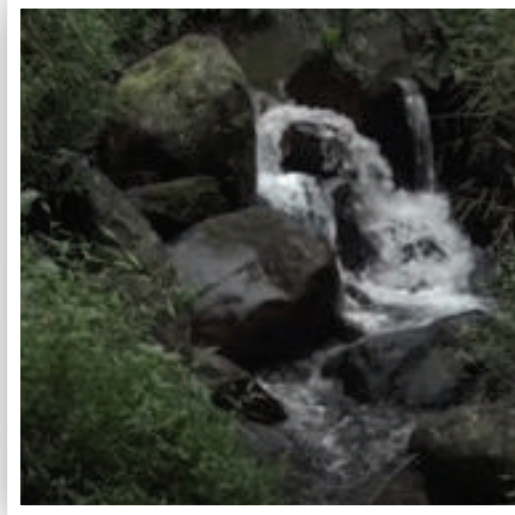
Dampak Ekologi, Ekonomi dan Sosial

Setiap hari masyarakat di Dusun Mendiro berinteraksi di hutan dan menggantungkan hidupnya disana. Fungsi hutan baik secara ekologi, ekonomi dan sosial, menjadikan hutan sebagai ekosistem yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Melalui konservasi yang dilakukan oleh KTH KEPUH bersama masyarakat di Dusun Mendiro, banyak sekali dampak secara ekologi yang dihasilkan, diantaranya tutupan lahan hutan di Dusun Mendiro yang semakin bertambah, sumber mata air Selo Ringgit yang telah mati kini hidup dan berfungsi kembali, begitu juga dengan sumber mata air yang lainnya yang rusak telah berfungsi kembali dan bahkan bertambah, yang berawal dari 7 buah menjadi 11 buah sumber mata air, meningkatnya debit dan kualitas air sungai di wilayah Dusun Mendiro, terjaganya kawasan hutan negara baik di kawasan Perhutani maupun TAHURA Raden Soerjo yang berbatasan dengan wilayah Dusun Mendiro. Tidak hanya mengembalikan kondisi hutan seperti semula, upaya yang telah dilakukan oleh KTH KEPUH juga telah berhasil menjaga satwa serta ekosistem yang ada sebelumnya. Saat ini dapat ditemui berbagai satwa liar seperti

lutung, kancil, kijang, berbagai jenis burung salah satunya burung rangkong, bahkan macan kumbang.

Selain telah memberikan dampak secara ekologi, kegiatan konservasi yang dilakukan oleh KTH KEPUH juga mampu meningkatkan pendapatan anggotanya dua kali lipat per tahun dibandingkan dengan pendapatan pada saat dibentuk kelompok. Meningkatnya pendapatan kotor anggota KTH pertahunnya secara keseluruhan dihasilkan dari beragam usaha yang diusahakan oleh para anggota KTH KEPUH yang sebagian besar merupakan hasil hutan bukan kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan di Hutan Mendiro. Ragam usaha dan produk yang dihasilkan tersebut antara lain madu dari lebah Apis cerana maupun Apis dorsata, kegiatan ekowisata, kopi, durian, buah kemiri, porang, pisang, gadung, talas dan kapulaga. Usaha gadung dan kopi yang dihasilkan bahkan mampu meraup pendapatan kotor yang tinggi per tahunnya, hingga dapat mencapai Rp.240.000.000 untuk kopi dan Rp.430.000.000 untuk gadung. Selain itu, anggota kelompok juga mengelola usaha peternakan kambing dan sapi. Melimpahnya sumber pakan dan sumber air akibat aktivitas konservasi yang telah dilakukan, dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan usaha peternakan tersebut sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha yang dimiliki. Saat ini, jumlah kambing dan sapi yang diternakkan oleh anggota KTH KEPUH telah bertambah jumlahnya dibanding saat merintis menjadi masing-masing 120 dan 80 ekor. Selain meningkatnya pendapatan, lapangan kerja yang terbentuk juga semakin luas dimana kini anak-anak muda di Dusun Mendiro, turut digalakkan untuk membangun desa melalui usaha dan produk yang dihasilkan oleh KTH KEPUH. Kaum muda milenial tak perlu merantau lagi karena kini Dusun Mendiro telah memiliki dan menjanjikan banyak peluang usaha yang luar biasa.

Konservasi yang dilakukan oleh KTH KEPUH juga telah memberikan dampak secara sosial antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat sekitar dan luar Desa Panglungan, Kec. Wonosalam,



Dampak kegiatan pelestarian sumber mata air.



Produk unggulan KTH Kepuh: Kemiri, kopi dan madu.

Kab. Jombang untuk menjaga hutan dan sumber mata air yang ditandai dengan terbentuknya beberapa kelompok yang memiliki usaha dan kegiatan sejenis dengan KTH KEPUH, meningkatnya kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga hutan dan lingkungan hidup dengan terbentuknya kelompok Pelestarian alam dan lingkungan di sekolah-sekolah dan karang taruna baik di Desa Panglungan atau sampai ke luar desa, pencurian kayu di hutan Mendiro sudah tidak ditemukan lagi, berkurangnya pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja akibat aktivitas usaha khususnya usaha kehutanan di Dusun Mendiro, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak merusak hutan dan menjaga kelestariannya karena telah merasakan dampak dari kelestarian alam yang sudah terbentuk baik karena sumber mata air yang hidup kembali, kesuburan tanah dan manfaat lainnya.

Prestasi KTH KEPUH, apresiasi perjuangan dan kerja keras konservasi

Perjuangan panjang dan kerja keras yang telah dilakukan oleh KTH KEPUH dalam melakukan pelestarian Hutan Mendiro perlu diapresiasi. KTH KEPUH telah berjasa dalam membangun lingkungan hidup dan kehutanan di wilayahnya serta mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di dalam dan

Juara III Lomba Duta Hari Air Sedunia 2019 di Wilayah Sungai Brantas dalam rangka Memperingati Hari Air Sedunia Tahun 2019 serta Juara 1 Lomba Penghijauan Lingkungan kategori Kelompok Tani Hutan dalam rangka Peringatan Hari Bakti Rimbawan Tahun 2022 Lingkup CDK Wilayah Nganjuk. Apresiasi terhadap kegiatan yang positif dan memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas perlu banyak dilakukan untuk menjadi pendorong bagi masyarakat agar lebih bersemangat dalam menebar kebaikan. Berbagai penghargaan ini pada dasarnya bukan merupakan tujuan utama dari KTH KEPUH, melainkan sebagai pendorong untuk mencapai pembangunan kehutanan yang dicita-citakan yaitu masyarakat khususnya di Dusun Mendiro yang sejahtera dan hutan yang lestari secara berkelanjutan. ●

"JAGALAH ALAM, MAKA ALAM MENJAGAMU"

- WAGISAN, KETUA KTH KEPUH-

Rian Ristia Wulandari, S. Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli, Pusat Penyuluhan, Badan P2SDM, Kemneterian LHK



Wagisan, Ketua KTH Kepuh menerima penghargaan Terbaik I Kategori KTH pada Temu Karya Wana Lestari Tahun 2022

MENGENAL INDONESIA'S FOREST AND OTHER LAND USE NET SINK 2030

Forest and Other Land Use Net (FOLU) Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sama (Net Sink) atau lebih tinggi dari tingkat emisi. Keberhasilan pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink (IFNET) 2030 diperlukan kerjasama semua pihak, lintas generasi, lintas disiplin maupun lintas sektor, untuk secara kolektif ikut memikirkan inovasi dan solusi di seluruh bidang kehidupan.

Gas Rumah Kaca

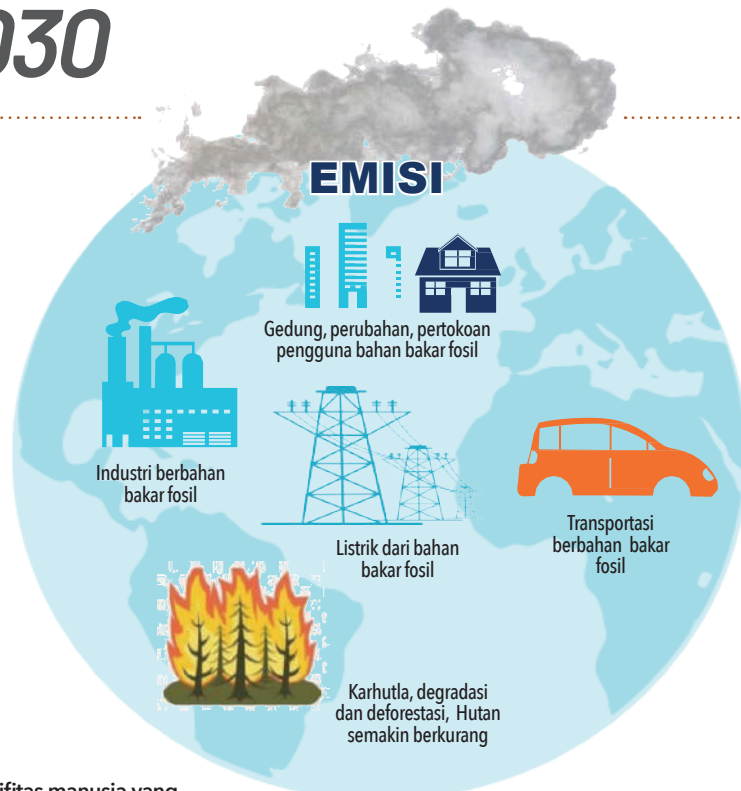
Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas manusia telah menimbulkan emisi/gas buangan pada tingkat abnormal yang disebut Gas Rumah Kaca (GRK). GRK terdiri dari Gas metan (CH₄), Hidrofluoro karbon (HFCs), Karbon dioksida (CO₂), Nitrogen oksida (N₂O), Sulfur hexafluoride (SF₆), dan Perfluoro karbon (PFCs). Adapun aktifitas-aktifitas tersebut diantara adalah penggunaan kendaraan, listrik, industri, dan ekspansi lahan untuk pembangunan gedung-gedung. Selain itu, adanya bencana kebakaran hutan dan lahan, degradasi dan deforestasi hutan mengakibatkan luasan hutan dan penyerapan emisi GRK semakin kecil.

Akibat dari emisi GRK telah dirasakan pada beberapa tahun belakangan ini, dengan munculnya iklim ekstrim dimana suhu bumi semakin panas, curah hujan

Aktifitas manusia yang menimbulkan emisi gas rumah kaca.

yang tidak menentu, gelombang tinggi/naiknya permukaan air laut, bencana banjir, kekeringan, produktifitas tanaman pangan, dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu berdampak bagi kehidupan makhluk hidup di bumi jika dibiarkan berlangsung terus menerus.

Perubahan iklim itu sendiri merupakan isu global yang harus segera ditangani bersama dengan melibatkan semua lapisan masyarakat hingga tingkat tapak. Hal ini karena dampak perubahan iklim sudah nyata dirasakan dan berbagai persoalan perubahan iklim berasal dari keseharian masyarakat.



Dampak negatif perubahan iklim diantaranya :

1. Kehutanan
 - a. Kebakaran hutan dan lahan
 - b. Perubahan tata guna hutan
 - c. Konversi hutan
2. Pertanian
 - a. Luas areal pertanian berkurang
 - b. Produktifitas lahan menurun
3. Pesisir dan pulau kecil akan tenggelam
4. Penyakit berbasis lingkungan mewabah (DB, Malaria)
5. Kepunahan spesies dan kerusakan habitat

Komitmen dan Kontribusi Sektor Kehutanan Indonesia dalam Penurunan Emisi

Berawal dari *Paris Agreement* pada November 2015, Indonesia menindaklanjutinya dengan menghadiri *High-level Signature Ceremony of the Paris Agreement* di New York, USA pada bulan April 2016, dilanjutkan dengan diterbitkannya UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada Oktober 2016. Setelah terbit Undang-undang tersebut Indonesia menyusun *The First Nationally Determined Contribution* (NDC) pada November 2016, *NDC Roadmaps* (2019), Dokumen *Updated NDC* dan *LTS-LCCR* 2050 pada Juli 2021.

FOLU merupakan salah satu dari 5 (lima) sektor proyek mitigasi krisis iklim yang tercantum dalam NDC. Adapun 5 (lima) sektor yang ada dalam NDC adalah energi, industri, limbah, pertanian, dan kehutanan. Dimana Sektor Kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi GRK yaitu sebesar 60 %. Untuk mencapai target tersebut, perlu disusun strategi berupa skenario dalam proyek mitigasi sektor FOLU. *Low Carbon Scenario Compatible* (LCCP) with Paris

Agreement target dipilih sebagai skenario mitigasi sektor FOLU. Dengan LCCP diharapkan akan tercapai *Net Sink* pada tahun 2030.

Untuk mewujudkan Indonesia FOLU *Net Sink* (IFNET) 2030, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. Dimana IFNET 2030 merupakan pendukung utama dari pengurangan emisi GRK Nasional. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor 168 tahun 2022 pada tanggal 24 Februari 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim dan tersusunnya Rencana Operasional IFNET 2030. Adapun tahapan implementasi IFNET 2030 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Dalam pelaksanaannya, IFNET 2030 mempunyai 3 (tiga) dasar pijakan yaitu *Sustainable Forest Management*, *Environmental Governance*, dan *Carbon Governance*. Adapun operasionalisasi aksi mitigasi sektor FOLU yaitu :

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral

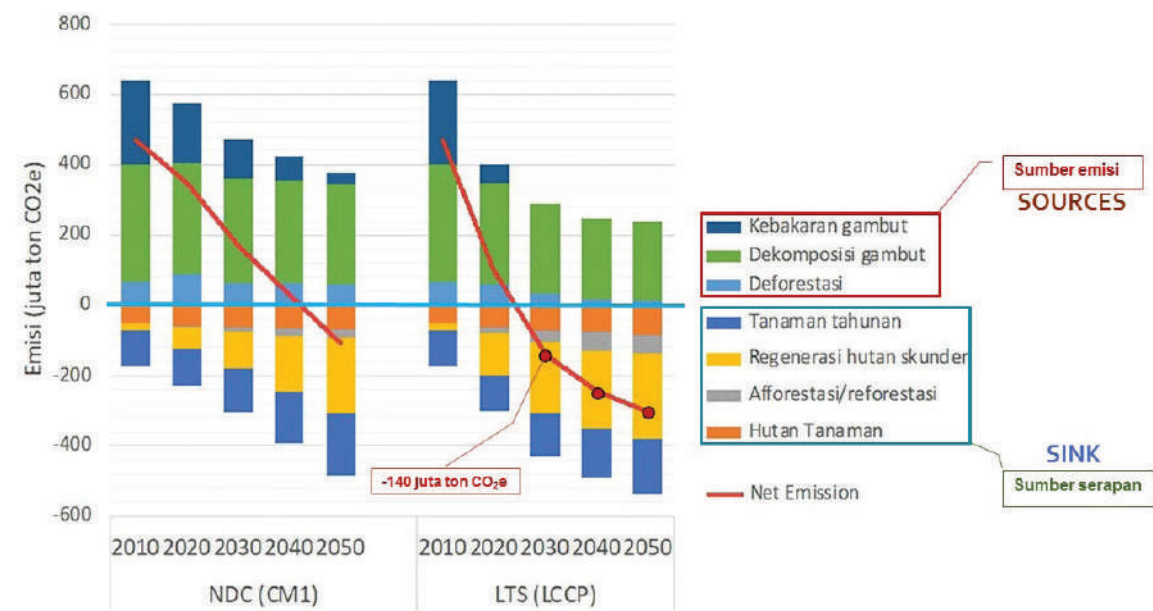


Rencana Operasional IFNET 2030

2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut
3. Pengurangan laju degradasi hutan dan lahan mineral
4. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut
5. Pembangunann hutan tanaman
6. *Sustainable Forest Management*
7. Rehabilitasi dengan rotasi
8. Rehabilitasi non rotasi
9. Restorasi gambut
10. Perbaikan tata air gambut
11. Konservasi keanekaragaman hayati



Tahapan implementasi IFNET 2030



Trajektori Emisi GRK pada skenario NDC CM1 dan LTS-LCCP

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional IFNET 2030 adalah tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030 seperti terlihat pada gambar 4.

Untuk mencapai target tersebut ditetapkan sasaran kerja IFNET 2030 yaitu :

1. Aksi pengurangan emisi dengan cara pengurangan emisi dari deforestasi lahan mineral dan gambut, termasuk penanggulangan karhutla.

2. Aksi Peningkatan serapan dengan cara :
 - a. Restorasi dan perbaikan tata air gambut
 - b. Peningkatan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon (melalui pengurangan degradasi dan meningkatkan regenerasi).
 - c. Restorasi, rehabilitasi hutan dan perbaikan tata air gambut (pengayaan tanaman/peningkatan serapan karbon)
 - d. Pengelolaan hutan lestari

- e. Optimalisasi lahan tidak produktif untuk pembangunan hutan tanaman dan tanaman perkebunan
3. Aksi mempertahankan serapan dengan cara mempertahankan tutupan lahan hutan yang ada seperti area hutan konservasi.
4. Pengembangan kelembagaan dengan cara :
 - a. Pengembangan berbagai instrument kebijakan baru
 - b. Pengendalian sistem monitoring
 - c. Evaluasi dan pelaksanaan komunikasi publik

Selain sasaran kerja di atas, diperlukan juga data potensi sektor lahan untuk menyerap GRK dengan melakukan integrasi antara sektor FOLU dengan pertanian. Hal ini akan menjadi kunci sukses tercapainya netral karbon/*net-zero emission* apabila dikelola dengan tepat dan hati-hati.

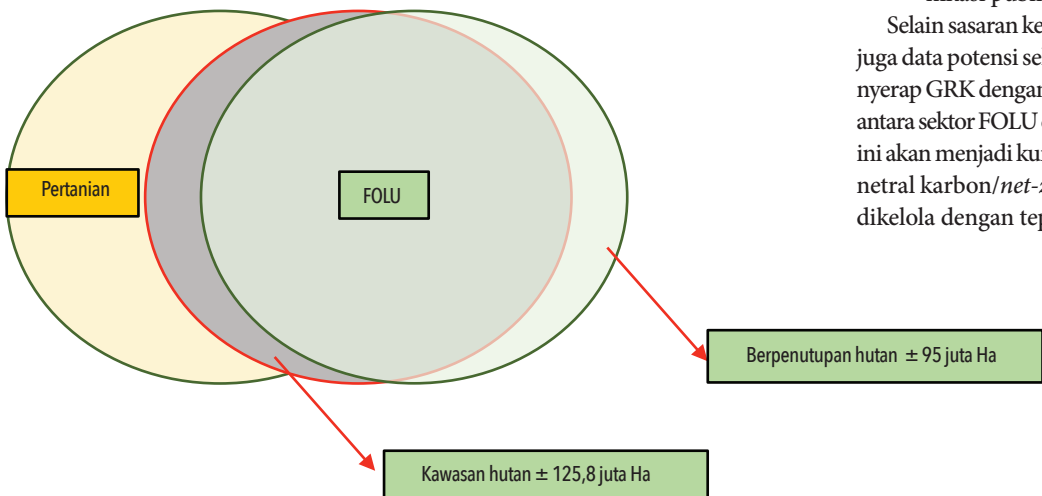
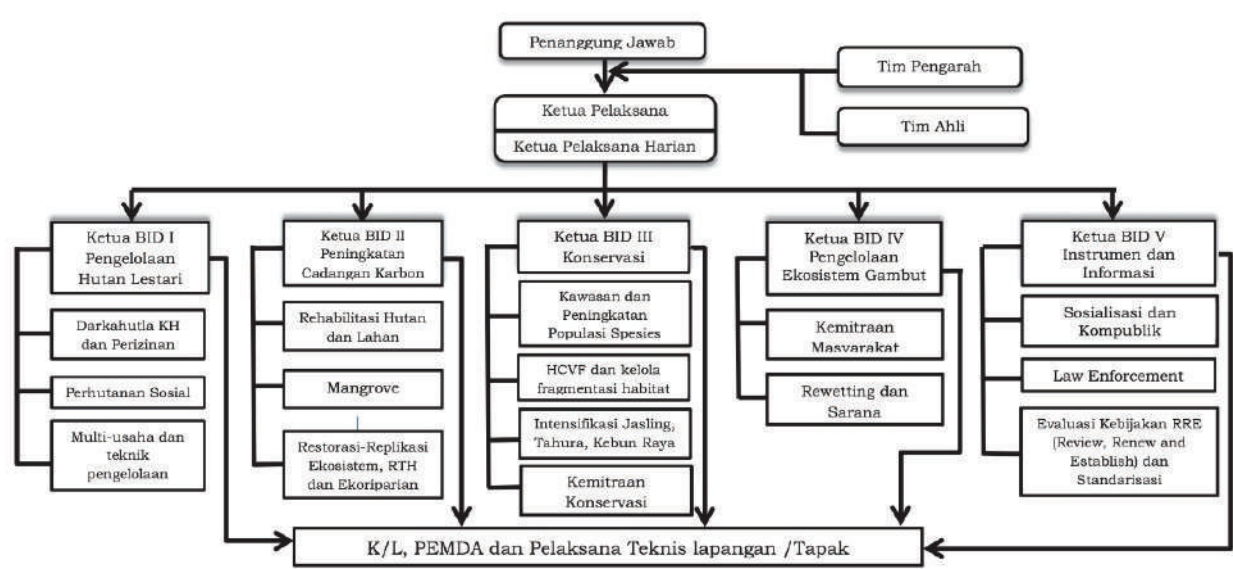


Diagram Integrasi Sektor Kehutanan dan Pertanian dalam mencapai target *net-zero emission*



Struktur Organisasi Tim FOLU Net Sink 2030

Peran Para Pihak dalam Mencapai Target IFNET

Secara terstruktur untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030, telah disusun organisasi pengelolaan kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 sesuai gambar di atas.

Pada struktur organisasi kegiatan FOLU Net Sink 2030 di atas dapat dilihat bahwa keberhasilan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 membutuhkan kolaborasi antara Kementerian LHK dengan Kementerian/Lembaga lain, dan pelaksana teknis lapangan/tapak. Semua kebijakan yang diambil

baik pada pemerintah pusat maupun daerah harus mendukung tercapainya target FOLU Net Sink 2030.

Keberhasilan target IFNET 2030, tidak lepas dari seluruh kegiatan yang tertuang dalam Renop IFNET 2030 yang dilaksanakan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan target kinerja yang terus meningkat. Apabila Kerjasama berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan IFNET berjalan dengan baik maka akan tercapai tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030. Selain itu, untuk mencapai keberhasilan IFNET 2030, dalam pelaksanaannya harus selalu berdasar

pada pijakan utamanya yaitu *Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance*.

Keberhasilan pencapaian IFNET 2030 memerlukan dukungan dan partisipasi berbagai pihak dengan berbagai kegiatan dalam rangka pengurangan emisi GRK Nasional. Mari bersama kita bahu membahu untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target IFNET 2030. ●

Handari Karmelita, S.Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan BP2SDM, Kementerian LHK

PENDAFTARAN KAMPUNG IKLIM PADA SISTEM REGISTRASI NASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Program Kampung Iklim (ProKlim) bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan ketahanan iklim, menurunkan emisi atau meningkatkan serapan Gas Rumah Kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Mengenal ProKlim

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan salah satu program pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dasar pelaksanaan program ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MEN-LHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim dan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim.

Beberapa tujuan khusus dari kegiatan ProKlim antara lain : a). Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. b). Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak yang telah dilakukan kelompok masyarakat. c). Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan ProKlim. d). Memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka fasilitasi pembentukan dan pengembangan ProKlim. e). Mendorong penyebaran kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Program kampung iklim merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menangani dampak perubahan iklim seperti yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada acara pembukaan *Climate Adaptation Summit* (CAS) 2021 tanggal 25 Januari 2021. Beliau menyampaikan statmen bahwa: “Seluruh potensi masyarakat harus digerakkan. Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim yang mencakup 20.000 desa di tahun 2024”. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. Pelaksana kegiatan kampung iklim adalah kelompok masyarakat (Kelompok Tani Hutan) binaan di lokasi kampung iklim. Adapun yang dapat menjadi pendamping kegiatan ProKlim antara lain: Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Penyuluh Kehutanan Swasta dan lainnya.

Kegiatan dalam ProKlim

Dampak dari pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terha-

dap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir, longsor, rob, gagal panen, serta meningkatnya wabah penyakit terkait iklim seperti demam berdarah dan diare.

Menghadapi perubahan iklim, partisipasi dan peranserta seluruh pihak termasuk masyarakat dalam melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK dapat melalui penerapan pola hidup rendah emisi dalam melakukan aktivitas sehari-hari misalnya menghemat pemakaian listrik, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Upaya adaptasi dapat dilakukan antara lain dengan cara menyiapkan kebijakan dan peraturan yang adaptif terhadap perubahan iklim, infrastruktur yang tahan terhadap bencana terkait iklim, memperkuat kemampuan ekonomi dan kapasitas sosial, mening-

katkan pendidikan, serta menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi lokal.

Upaya adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim untuk menurunkan tingkat emisi atau meningkatkan serapan GRK, melalui antara lain pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, menggunakan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, melakukan budidaya pertanian rendah emisi GRK, meningkatkan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, dan mencegah kebakaran hutan lahan.

Mengenal Sistem Registri Nasional (SRN)

Sistem Registri Nasional (SRN) merupakan sistem pendataan dan pelaporan mobilisasi dukungan dan atau aksi pengendalian perubahan iklim yang konsisten dengan unsur-unsur data aksi pengendalian perubahan iklim yang terukur. Dengan ketersediaan dan sinergi dari data-data tersebut maka SRN dapat menjadi alat pemantau pencapaian komitmen penurunan emisi yang dikomitmenkan oleh Pemerintah Indonesia.

SRN dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut : 1. Pendataan aksi dan

sumber daya Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia. 2. Pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. 3. Penyediaan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi serta capaiannya. 4. Menghindari penghitungan ganda (*double counting*) terhadap aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi sebagai bagian pelaksanaan prinsip *clarity, transparency* dan *understanding* (CTU).

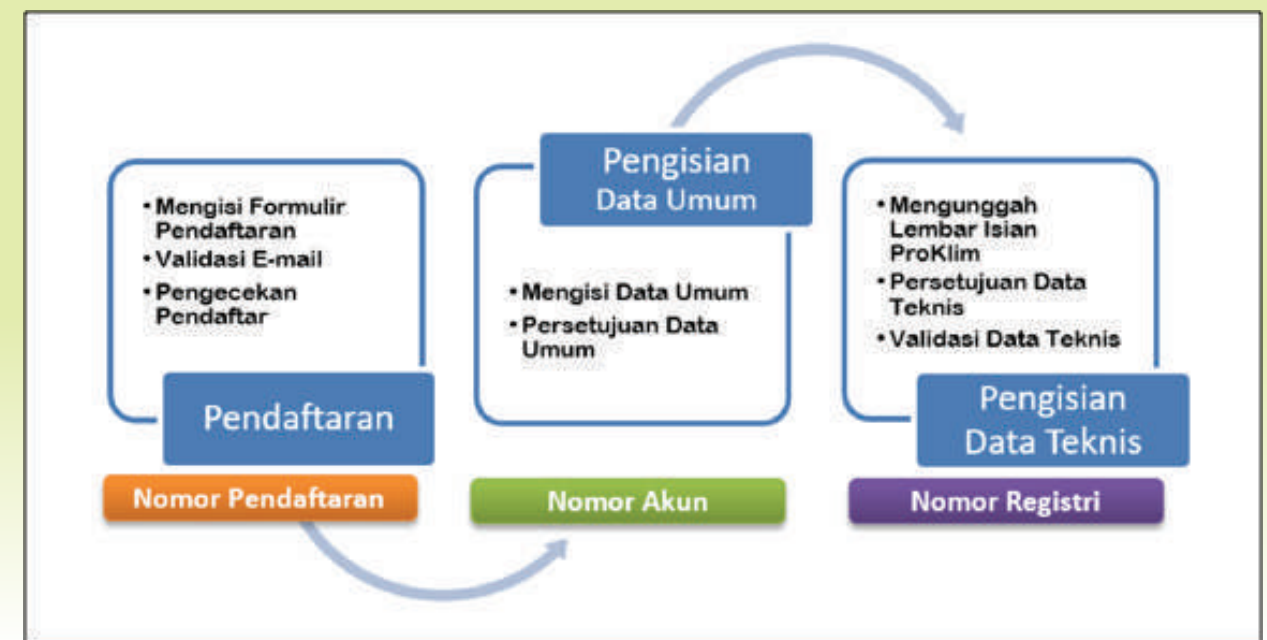
Siapa yang Dapat Memanfaatkan SRN?

SRN terbuka untuk para pelaksana kegiatan pengendalian perubahan iklim baik dari kelompok masyarakat seperti kelompok petani ramah iklim, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping masyarakat, aparat pemerintah baik tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota hingga sektor swasta yang ingin mendaftarkan kegiatan maupun dukungan pengendalian perubahan iklim yang diinisiasinya. SRN memberikan akses terbuka bagi publik sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi data. Dengan ini publik dapat turut memantau capaian kinerja aksi perubahan iklim sesuai dengan target pemenuhan

komitmen penurunan emisi gas rumah kaca baik oleh pemerintah tingkat nasional maupun daerah. Selain itu pengguna dapat membandingkan profil dari aksi iklim per sektor dan profil emisi per provinsi sehingga akan meningkatkan pemahaman akan kondisi lingkungan di Indonesia. SRN merupakan platform komunikasi data aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Pengusulan ProKlim Pada Aplikasi SRN

Sebagai langkah nyata peduli terhadap bumi dalam menanggulangi perubahan iklim, Penyuluh Kehutanan dapat mengusulkan KTH binaannya menjadi pelaksana ProKlim. Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain: lokasi telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan selama lebih dari dua tahun dan Telah terbentuk kelembagaan kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan dan berjalan secara aktif di lokasi yang diusulkan serta adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Berikut ini alur proses pengusulan ProKlim pada aplikasi SRN PPI.

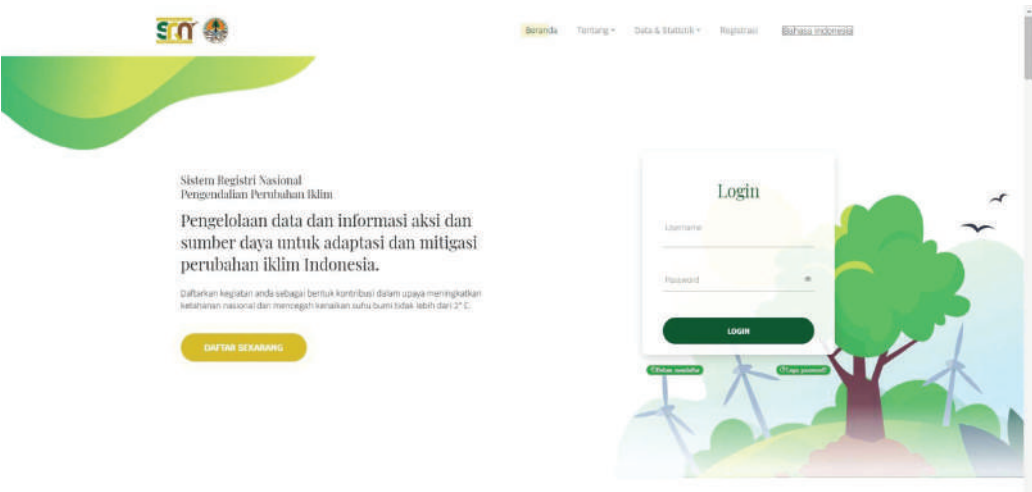


Gambar : Alur Proses Pengusulan Kampung Iklim di SRN PPI

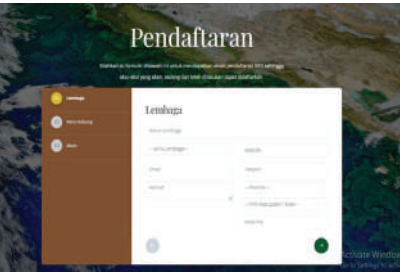
Berikut ini tahapan proses pengusulan kampung iklim pada aplikasi SRN PPI:

A. Pendaftaran

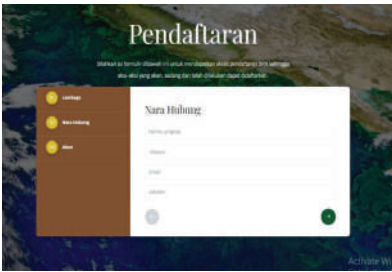
1. Penanggungjawab kegiatan ProKlim mendaftarkan lokasi ProKlim kedalam SRN PPI dengan mengakses ke website <https://srn.menlhk.go.id/>



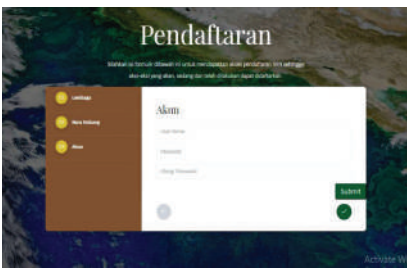
2. Pengisian identitas lembaga yang mencakup: nama lembaga, jenis lembaga, alamat email, website (apabila ada), telepon, alamat (termasuk provinsi, kabupaten/kota, dan kode pos). * Alamat email dipastikan masih aktif.
3. Pengisian identitas nara hubung yang melakukan fungsi korespondensi terkait SRN. Identitas nara hubung meliputi : nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan jabatan.
- * Alamat email dipastikan masih aktif.
4. Pengisian informasi akun, meliputi *username* (nama yang akan digunakan dalam SRN) dan password.
- * Mohon dicatat dan disimpan *username* dan *password* karena digunakan untuk *login* di aplikasi SRN dan SPECTRUM (Sistem Perhitungan Penurunan Emisi GRK secara Cepat, Tepat dan Responsible untuk Masyarakat).



Pengisian Identitas Lembaga



Pengisian Identitas Nara Hubung



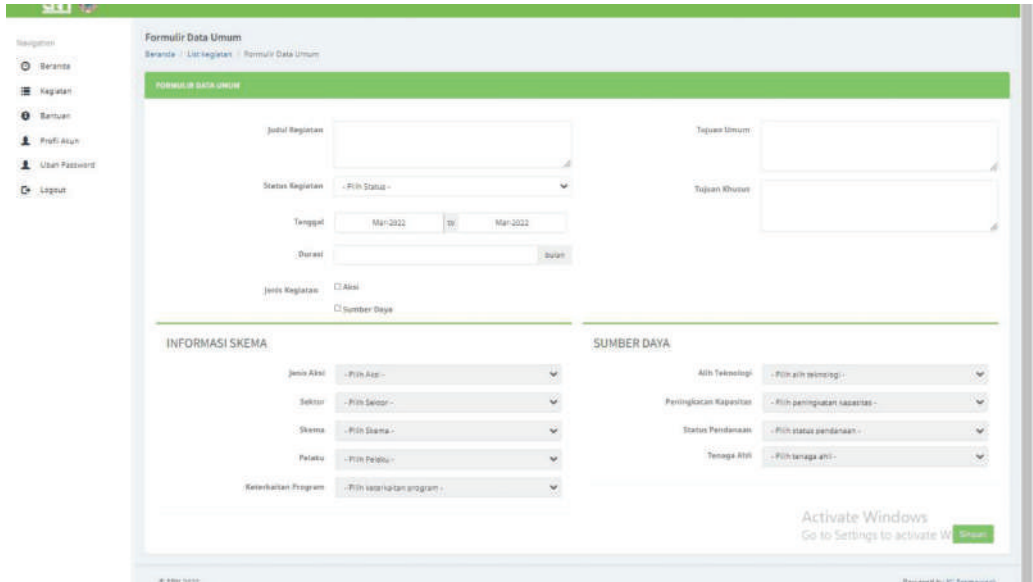
Pengisian Informasi Akun

Setelah melakukan pendaftaran, penanggungjawab kegiatan akan mendapatkan pemberitahuan melalui email untuk aktivasi akun menggunakan *username* dan *password* untuk pengisian data umum dan data teknis ProKlim.

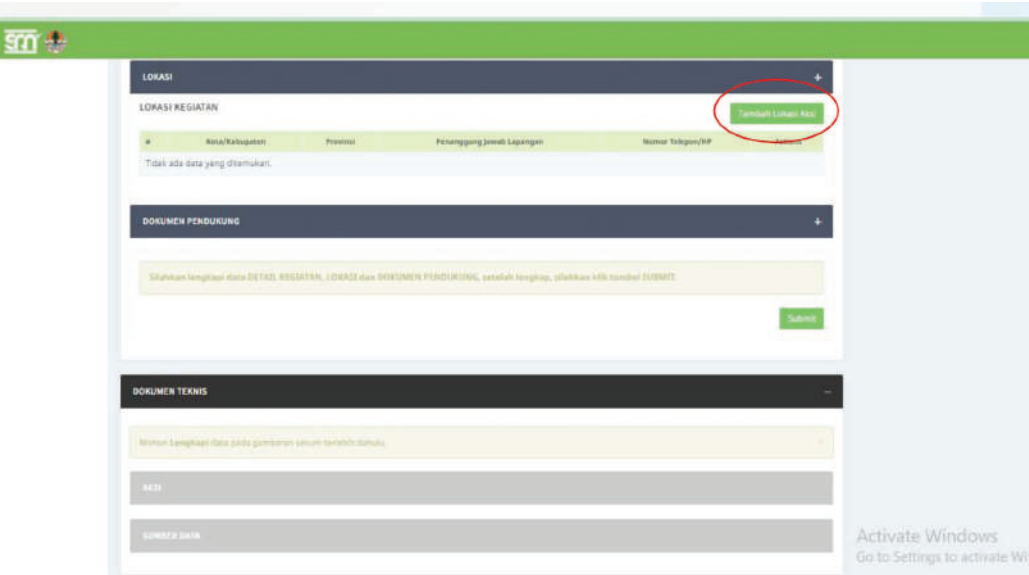
B. Pengisian Data Umum

Pengisian Data Umum dilakukan oleh setiap penanggungjawab kegiatan ProKlim dengan terlebih dahulu melakukan log-in di laman SRN PPI. Selanjutnya mengisi form yang sudah tersedia antara lain:

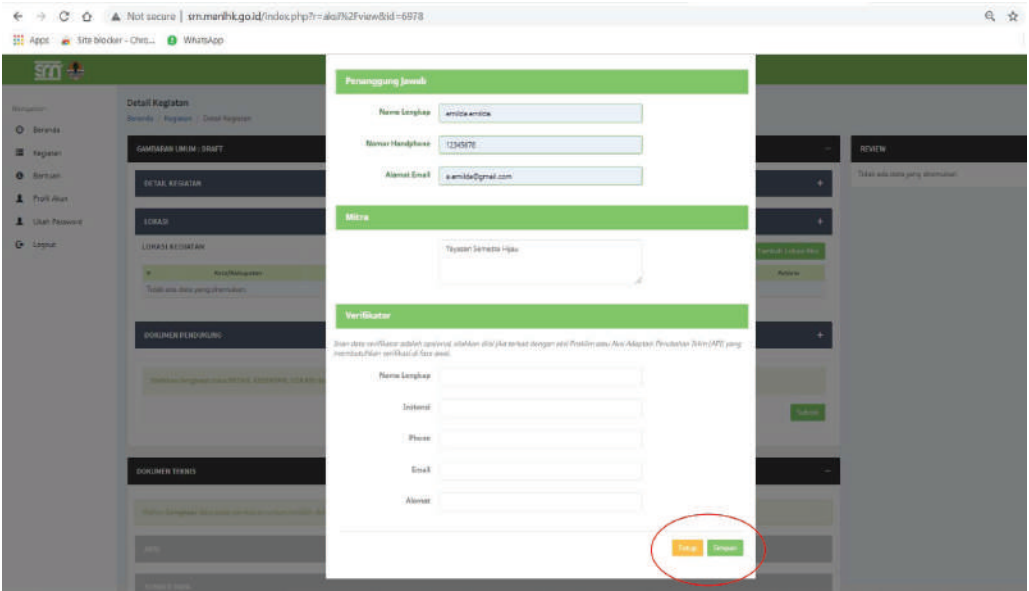
1. Formulir Data Umum terdiri dari:
- Judul kegiatan diisi dengan format : ProKlim - nama lokasi - nama kecamatan - nama kabupaten/kota - nama provinsi.
 - Tujuan Umum (diisi dengan Pengendalian Perubahan Iklim di Tingkat Tapak melalui ProKlim)
 - Tujuan Khusus (diisi dengan Peningkatan Aksi Lokal Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas)
 - Status (untuk skema ProKlim maka pilihannya adalah "Kegiatan Sedang Berjalan"),
 - Tanggal (dimasukkan waktu pelaksanaan yang paling lama dari salah satu kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berjalan di lokasi. Sesuai kriteria umum ProKlim harus sudah lebih dari 2 tahun)
 - Jenis kegiatan (Ops "Aksi" dan "Sumberdaya" harus diklik
2. Informasi Skema dan Sumber Daya terdiri dari:
- Jenis aksi (dipilih opsi "Join Adaptasi Mitigasi (JAM)").
 - Sektor (dipilih opsi "Multi Bidang/Sektor").
 - Skema (dipilih opsi "Program Kampung Iklim (ProKlim)").
 - Pelaku (dipilih opsi dari "Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Institusi/ Lembaga/Inisiatif lain").
 - Keterkaitan program dipilih berdasarkan keterkaitan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi ProKlim dengan program lain misalnya : *Proper, Green Building, Perhutanan Sosial, Adipura* atau pilih opsi "Lainnya" dan sebutkan programnya (misal : Program Penanaman Mangrove, Rehabilitasi Gambut, dsb).
 - Status pengusulan proklam diisi dengan informasi mengenai pendaftaran (pendaftaran ulang atau pendaftaran baru) atau kategori ProKlim Lestari.
 - Sumberdaya meliputi alih teknologi, peningkatan kapasitas, status pendanaan, dan tenaga ahli yang masing-masing memiliki pilihan untuk diinput.



3. Setelah melakukan pengisian data, klik simpan. Pada pengisian “Lokasi” silahkan klik “Tambah Lokasi Aksi” kemudian pilih lokasi ProKlim pada opsi pilihan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa serta mengisi kolom isian Dusun/RW (apabila lokasi yang diusulkan merupakan administrasi Dusun/RW) dan koordinat lokasi (*latitude* dan *longitude*).



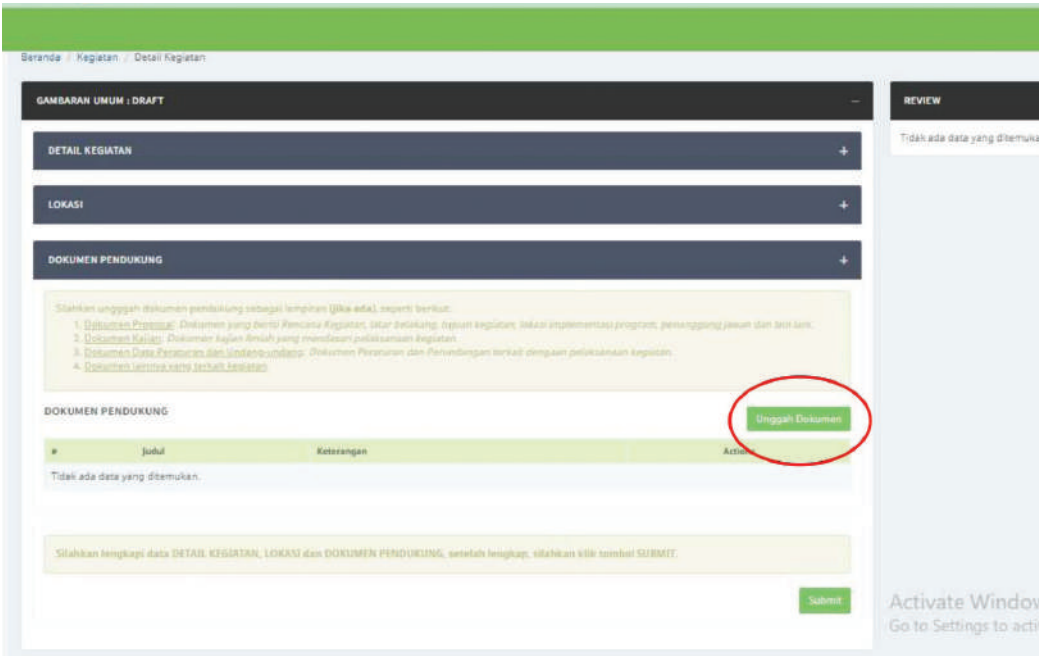
4. Pada Bagian “Penanggung Jawab” diisi dengan data narahubung yang berada di lokasi ProKlim. “Mitra” diisi dengan berbagai pemangku kepentingan/para pihak yang telah atau sedang melaksanakan program/kegiatan di lokasi ProKlim. Pada bagian “Verifikator” tidak perlu diisi oleh pengusul. Data ini akan dilengkapi kemudian pada lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan verifikasi lokasi.



Sebelum dikirim, penanggungjawab memeriksa kembali data isian dan jika diperlukan pembaruan/koreksi data dapat dilakukan dengan menekan tombol “update” atau menghapus data yang salah dengan menekan tombol “delete” pada menu “Detail Kegiatan”. Selanjutnya, penanggungjawab kegiatan mengunggah “Dokumen Pendukung” berupa dokumentasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maupun kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan. Setelah melakukan pengisian dan pemeriksaan data umum maka penanggungjawab mengirimkan data dengan menekan tombol “submit”. Sekretariat ProKlim selanjutnya akan melakukan reviu kelengkapan data dan memberikan persetujuan bagi data yang telah dikirim. Penanggungjawab kegiatan ProKlim akan menerima email pemberitahuan validasi data umum dan Nomor Akun sebagai penanda isian data umum telah tervalidasi.

C. Pengisian Data Teknis

Penanggungjawab kegiatan ProKlim mengisi 2 formulir dalam SRN PPI yaitu: a). Lembar Isian ProKlim yang pengisiannya dilakukan secara *offline* dan diunggah ke dalam SRN PPI pada menu “Dokumen Teknis>Aksi”. b). Formulir Sumberdaya. Formulir sumberdaya akan muncul apabila pada saat pengisian data umum, penanggungjawab ProKlim mencentang opsi sumberdaya. Formulir sumberdaya diisi secara online pada SRN PPI yang terdiri dari informasi mengenai sumber pendanaan, komponen biaya, dukungan aksi alih teknologi, dukungan aksi peningkatan kapasitas dan dukungan aksi tenaga Ahli. Setelah mengisi formulir sumberdaya, penanggungjawab kegiatan dapat mengklik simpan kemudian men-submit formulir dimaksud.



D. Tindak Lanjut Pengusulan

Sekretariat ProKlim selanjutnya melakukan validasi dan verifikasi data kegiatan ProKlim yang didaftarkan di SRN PPI. Sekretariat ProKlim akan melakukan reviu dan berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan jika ada data yang perlu dilengkapi. Apabila tidak terdapat perubahan data maka Sekretariat ProKlim selanjutnya akan melakukan persetujuan data teknis dan sumber daya bagi isian data yang telah dikirim.

D. Penilaian ProKlim

Penilaian ProKlim dilakukan berdasarkan data yang sudah dicatatkan oleh pengusul ProKlim pada SRN PPI. Penilaian terdiri dari : a). Penilaian awal untuk menetapkan Kampung Iklim dan kategori ProKlim sesuai dengan kriteria yang berlaku. b). Penilaian untuk menetapkan penerima penghargaan ProKlim bagi lokasi yang berdasarkan penilaian awal memenuhi kriteria sebagai nominasi ProKlim Utama dan ProKlim Lestari.

Peran Penyuluh Kehutanan dalam ProKlim

Program kampung iklim tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya dukungan dari instansi terkait dan peran pendamping atau penyuluh kehutanan (PK PNS, PKSM, PKS). Penyuluh kehutanan memiliki peran besar untuk menyukseskan kegiatan ini baik sebagai pengusul atau inisiasi maupun sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan ProKlim.

Salah satu contoh peran penyuluh kehutanan PNS dalam mendukung ProKlim

telah dilakukan oleh Sulistiyanto, SST Penyuluh Kehutanan pada Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VII Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pendampingan dilakukan di Kampung Iklim Welahan (Dusun Welahan, Desa Wonoroto, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah) dengan luas wilayah 59,0443 Ha dan 252 KK (835 jiwa). Kegiatan yang dilakukan antara lain: penanaman pohon dengan pola agroforestri seluas 75,39 Ha, bangunan konservasi tanah dan air teras bangku, *gully plug*,

dam penahan, dam parit, serta trucus bambu, sumur resapan, bank sampah, pembuatan biopori, pembibitan MPTS, dll. Kegiatan ini akan terus berkembang seiring dengan kepedulian dari masyarakat terhadap bumi untuk kelangsungan anak cucu kita. ●

Eli Sugianto, S.Hut, M.Si

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan BP2SDM, Kementerian LHK

KEBIJAKAN

MERENCANAKAN PENDAMPINGAN KTH

Penyuluh Kehutanan merupakan aktor dalam mendampingi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pendampingan Penyuluh Kehutanan harus memiliki kemampuan dalam merencanakan pendampingan KTH binaan.



KTH sedang melakukan kegiatan pertemuan rutin

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan memegang peranan penting dalam memajukan Indonesia. Bagaimana tidak, 63% total luas daratan Indonesia (120,78 juta Ha) merupakan kawasan hutan. Pada Kongres Kehutanan Indonesia ke VII yang berlangsung dari tanggal 28 sampai 30 Juni 2022, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa terdapat sekitar 25.863 desa di sekitar hutan, dimana 71.06% masyarakatnya menggantungkan hidup pada sum-

berdaya hutan dan sebanyak 10.2 juta penduduknya miskin (36.73%). Sejalan dengan hal itu, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, kelompok atau individu masyarakat pengelola komoditas yang dihasilkan dari hutan merupakan kegiatan penting dan memerlukan penanganan yang tepat.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya merupakan bagian kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh seorang penyuluh. Para penyuluh kehutanan memberikan penyuluhan kepada kelompok masyarakat

sasaran, yang biasa disebut Kelompok Tani Hutan (KTH).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P89/MEN-LHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 menjelaskan KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Mereka biasanya membentuk kelompok dengan keanggotaan paling sedikit 15 orang. Usaha yang dijalankan bisa berbasis hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu atau ekowisata. Kegiatannya antara lain Hutan Tanaman



Pendampingan KTH oleh Penyuluh Kehutanan.

Rakyat, Hutan kemasyarakatan, Hutan Rakyat, pembibitan tanaman kehutanan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan, agroforestri/agrosilvo-pasture/agrosilvofishery, pemanfaatan jasa lingkungan, Kawasan hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar, hutan bakau dan hutan pantai, pemungutan hasil hutan bukan kayu, Konservasi tanah dan air, reklamasi dan rehabilitasi hutan atau perlindungan dan konservasi alam.

Beberapa komoditi hasil hutan bukan kayu yang diusahakan oleh kelompok tani hutan seperti madu, aren, kopi, bambu, sutera alam, mangrove dan lain-lain. Dalam hal kelompok tani tersebut banyak yang mengusahakan komoditi yang sama, mereka dapat bergabung membentuk Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut). Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memperkuat usaha KTH.

Berdasarkan definisi, penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha, agar mereka mau dan mampu menolong dan meng-

organisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena penyuluhan merupakan sebuah proses, bisa jadi hasilnya baru terlihat secara jangka panjang. Untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat tersebut, maka penyuluhan dilakukan secara terus menerus, melalui pendampingan. Penyuluh Kehutanan yang melakukan pendampingan, memberikan penyuluhan bagi anggota KTH binaannya.

Data pada Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH) yang diunduh pada tanggal 27 September 2022 menunjukkan bahwa jumlah KTH di seluruh Indonesia sebanyak 30.716 KTH. Mereka tersebar di 34 provinsi. Mayoritas keberadaan KTH adalah di pulau Jawa (67.39%) sedangkan sisanya (32.61%) tersebar di 28 provinsi di luar pulau Jawa. Di pulau Jawa sendiri,

konsentrasi jumlah KTH yang terbanyak adalah di provinsi Jawa Tengah (sebanyak 9.597 KTH) atau 31.14% dari total jumlah KTH di seluruh Indonesia, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Banten (652 KTH). Di luar Jawa, jumlah KTH terbanyak terdapat di Sulawesi Selatan (2.118 KTH), Lampung 1.681 KTH, Bali 520 KTH, Aceh 499 KTH dan yang paling sedikit adalah di Papua Barat sebanyak 7 KTH. Disisi lain, jumlah penyuluh kehutanan (PNS) di seluruh Indonesia berdasarkan SIMLUH, hanya 2.784 orang. Mereka tersebar di 34 provinsi. Sama seperti KTH, keberadaan para penyuluh ini mayoritas berada di pulau Jawa (58.33%) sedangkan sisanya (41.67%) berada di 28 provinsi di luar pulau Jawa.

Sedikitnya jumlah penyuluh PNS dibandingkan dengan banyaknya jumlah kelompok tani hutan yang membutuhkan pendampingan, menyebabkan seorang penyuluh rata-rata mendampingi 10-11 KTH. Bahkan terdapat penyuluh kehutanan yang mendampingi lebih dari 20 KTH. Hal ini tentu tidak mudah, apalagi

penyuluh kehutanan seringkali dihadapkan pada wilayah kerja yang cukup luas. Di Pulau Jawa misalnya seorang penyuluh kehutanan memiliki wilayah kerja 1 sampai 2 kecamatan; sementara di luar pulau Jawa, wilayah kerjanya bisa melintasi 2 Kabupaten. Kondisi ini tentu mempengaruhi capaian atau perkembangan usaha KTH yang didampingi. Berdasarkan data SIMLUH, hingga 22 September lebih dari 90% KTH usahanya masih merupakan KTH kelas pemula, 7.61 % KTH madya dan kurang dari 1 % yang sudah utama. Padahal, semakin banyak KTH yang utama, maka semakin banyak KTH yang usahanya semakin berkembang, yang berarti semakin banyak KTH yang mandiri.

Pendampingan Tiga Aspek Kelola KTH

Secara garis besar, proses pendampingan KTH dapat dilakukan melalui pendekatan 3 (tiga) aspek kelola, yaitu (1) kelola kelembagaan; (2) kelola kawasan; dan (3) Kelola usaha. Pengelolaannya dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing KTH. Dalam membangun usaha KTH, didasarkan pada potensi hutan, peluang

pasar dan potensi sumberdaya manusia serta kearifan lokal; yang dilaksanakan dalam kerangka rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Untuk aspek kelola kelembagaan, penyuluh antara lain melakukan pendampingan kepada KTH dalam menyusun pembagian tugas, peran, tanggung jawab dan wewenang setiap pengurus/anggota KTH; menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau aturan KTH; kelengkapan administrasi; pembuatan rencana kegiatan KTH; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; peningkatan kepedulian sosial, membangun semangat kebersamaan, gotong royong, kejujuran, keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelompok; pembentukan kader dan regenerasi kepemimpinan dalam KTH; serta penyusunan laporan kemajuan KTH setiap akhir tahun.

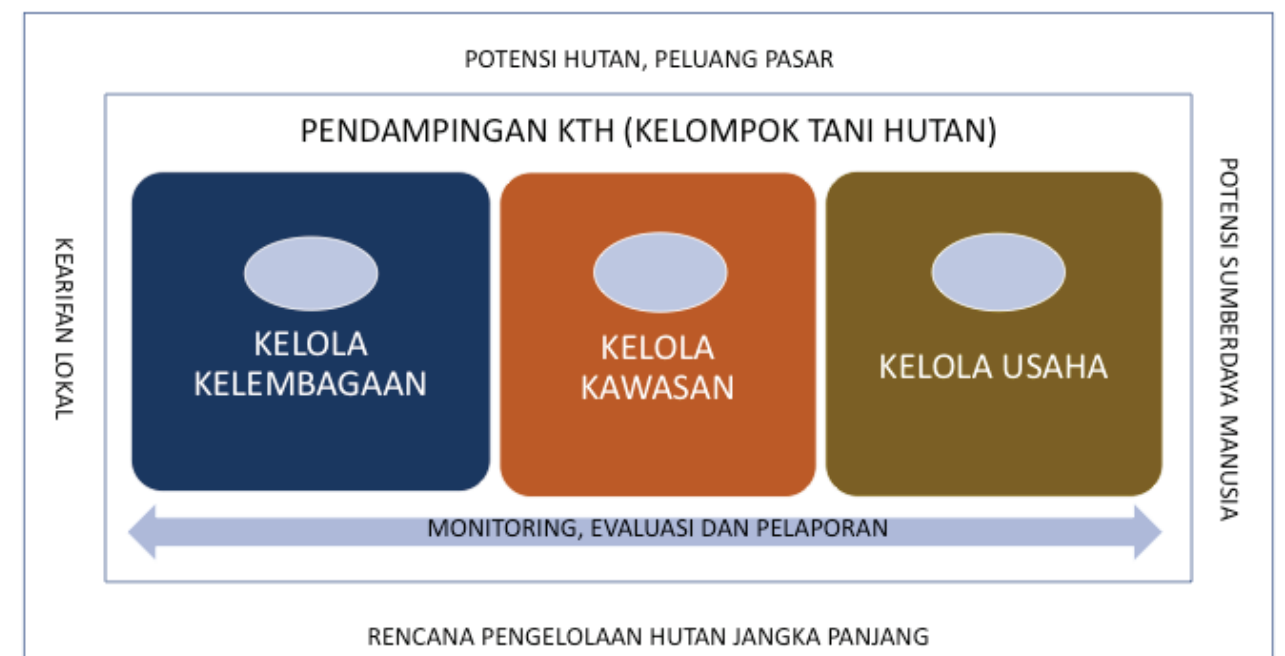
Pendampingan penyuluh dalam aspek kelola kawasan dilakukan antara lain dalam membangun pemahaman kelompok terhadap batas wilayah kelola; pelaksanaan rehabilitasi (penanaman lahan kritis/kosong/tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai); pemanfaatan wilayah kelola

sesuai dengan potensi; peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam pelestarian hutan dan konservasi sumber daya alam; serta pencapaian pengelolaan hutan lestari melalui perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari (S-PHL).

Sedangkan pendampingan dalam aspek kelola usaha, antara lain dalam penyusunan rencana dan analisis usaha bidang kehutanan; penguatan manajemen usaha tani; pengembangan diversifikasi usaha produktif kehutanan lainnya; penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha; pengembangan kerjasama, jejaring kerja dan kemitraan dengan pelaku usaha; peningkatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber; serta mendorong pembentukan badan usaha/koperasi.

Rencana Pendampingan KTH

Luasnya cakupan kegiatan pendampingan KTH maka diperlukan pelaksanaan pendampingan yang efektif. Seorang Penyuluh Kehutanan selayaknya (1) menyusun perencanaan yang matang, lalu (2) melaksanakan kegiatan pendampingan berdasarkan rencana yang disusun dan (3) melakukan monitoring serta (4) evaluasi terhadap kemajuan pendampingan/



Skema pendampingan KTH (Kelompok Tani Hutan)

pelaksanaan usaha yang dijalankan KTH. Rencana pendampingan yang disusun merupakan rencana yang dibangun dan dikomunikasikan bersama dengan KTH yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan. Tujuan pendampingan adalah memastikan tercapainya kemandirian masyarakat/petani hutan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan penyuluhan/pendampingan diupayakan agar tidak menimbulkan ketergantungan kelompok tani kepada penyuluh, dengan memposisikannya sebagai wirausaha, sehingga mereka dapat berusahatani dengan baik dan hidup lebih layak berdasarkan sumberdaya hutan yang ada disekitarnya. Untuk itu, KTH dipandu dalam merancang konsep usaha yang akan dijalankan, berdasarkan “kebutuhan/peluang pasar” dan potensi sumberdaya hutan serta sumberdaya manusia yang ada di wilayah tersebut.
2. Gambaran proses bisnis dari usaha yang akan dijalankan. Hal ini penting karena masing-masing usaha yang akan dijalankan memiliki proses bisnis yang berbeda. Meski demikian, secara garis besar, proses bisnis dimulai dari kegiatan produksi (mencakup budi daya dan pengolahan), dilanjutkan

dengan pemasaran dan distribusi. Dalam menggambarkan proses bisnis tersebut, penyuluh mencari informasi seluas-luasnya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dan siapa saja *stakeholder* yang terkait yang dapat dilibatkan untuk mensukseskan pencapaian tujuan usaha. Untuk itu, mengenali *stakeholder*/para pihak terkait seperti pemerintah desa, BUMDES, pemerintah kecamatan, kabupaten dan provinsi, ibu-ibu PKK wilayah setempat, Dinas terkait, perbankan/pemodal, pelaku usaha; menjadi penting; termasuk menjalin komunikasi dan kemitraan dengan para pihak tersebut dalam rangka memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk menunjang usaha KTH.

3. Metapkan target waktu pencapaian kemandirian petani melalui usaha yang dijalankan; yang antara lain dapat diukur berdasarkan peningkatan pendapatan petani yang didampingi sebagai indikatornya. Misal, dalam 5 tahun yang akan datang ditargetkan terjadi peningkatan pendapatan anggota KTH menjadi 2 kali lipat dari kondisi saat ini dan seterusnya.
4. Menyusun rencana kerja usaha berdasarkan target waktu yang ditetapkan,

yang kemudian diuraikan ke dalam rencana kerja tahunan KTH.

5. Melakukan monitoring dengan membuat pencatatan terhadap capaian yang diperoleh pada setiap kegiatan, termasuk pembelajaran terhadap permasalahan yang dihadapi.
6. Melakukan evaluasi terhadap capaian perkembangan usaha/pendampingan secara periodik.
7. Membuat laporan berkala secara manual dan/atau dalam jaringan (online) setiap tahun.

Rencana pendampingan KTH yang disusun secara partisipatif dan melibatkan anggota KTH diharapkan dapat menjadi acuan bagi Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan pendampingan. Meskipun demikian, rencana pendampingan yang baik akan menjadi sia-sia saja jika tanpa pelaksanaan pendampingan yang baik. Dengan rencana dan pelaksanaan pendampingan yang baik tentunya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan akan cepat terwujud. ●

Dr. Ir. Mariana Lubis, MM
Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan BP2SDM, Kemneterian LHK

Cascara

POTENSI BARU PENGHASIL CUAN

Cascara merupakan bagian dari buah kopi yang ternyata kaya manfaat. Awalnya cascara dianggap menjadi limbah. Pengolahan limbah zero waste yang diusung oleh KTH Gunung Kamojang menjadikan cascara kopi lebih bermanfaat. Produk turunan cascara kopi menjadi solusi cerdas yang berujung pada sumber penghasilan anggota KTH.



Sudah ngopi belum hari ini? Kebiasaan minum kopi sudah menjadi kebiasaan atau *lifestyle* masyarakat Indonesia. Kopi yang diminum menyisakan kulit buah yang dinamakan Cascara kopi. Dalam Bahasa Spanyol Cascara artinya kulit. Selama ini cascara belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, biasanya menjadi limbah namun ada juga yang memanfaatkannya sebagai pupuk organik.

Salah satu Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memanfaatkan cascara kopi menjadi aneka jenis produk turunan yaitu KTH

Gunung Kamojang. KTH ini berada di Desa Laksana, Ibum, Kabupaten Bandung Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Lokasi KTH juga terletak di kawasan penyangga Gunung Kamojang Garut dengan ketinggian 1500 mpdl dengan suhu harian yang dingin rata-rata 18°C sangat cocok untuk pertumbuhan kopi arabika. Beranggota 35 orang dengan 55 Ha luas lahan tanaman kopi, KTH Gunung Kamojang memiliki usaha komoditas budidaya dan pengolahan kopi dari hulu sampai hilir. Tahun 2022, dalam pengembangan kemandirian ke-

lompok, KTH ini mendapatkan fasilitasi pengembangan KTH menuju KTH mandiri dari Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada awalnya Sudarman ketua KTH Gunung Kamojang menanam Kopi arabika guna memulihkan kawasan resapan air di perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut. Pada tahun 2003 marak terjadi perambahan hutan di Kamojang, pohon-pohon ditebang untuk membuka kebun sayur. Sayur dianggap cara cepat menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari

oleh masyarakat. Namun, Sudarman tidak patah semangat. Setelah mendapatkan pelatihan mulai budidaya sampai dengan pengolahan pasca panen, harga kopipun mulai meningkat seiring kerjasama kemitraan dengan Indonesia Power. Inilah yang mengawali anggota KTH mulai semangat untuk mengolah kopi arabika.

Kopi Arabika merupakan jenis kopi yang rasa dan aromanya dikenal nikmat oleh pencinta kopi. Dengan budidaya dan pengolahan yang tepat, kopi produk KTH Gunung Kamojang menjadi salah satu kelompok penghasil kopi terbaik di In-

donesia. Hal ini terbukti produk kopinya menjadi juara dalam Kontes Kopi Spesialti Indonesia (KSSI) untuk kategori arabika *full washed* dan *semi washed*. Kopi Wanaka, itulah merk dagangnya. Menurut ketua KTH Gunung Kamojang Sudarman, Wanaka berasal dari dua kata yaitu “Wana” yang artinya hutan dan “Ka” kependekan dari Kamojang, yang dapat diartikan kopi yang berasal dari Hutan Gunung Kamojang.

KTH Gunung Kamojang berprinsip budidaya kopi harus mengutamakan unsur-unsur kebaruan, seperti pengelolaan

limbah *zero waste* dengan menciptakan produk yang bermanfaat. Cascara kopi yang selama ini hanya menjadi pupuk kompos diolah menjadi produk turunan diantaranya teh, tepung, *cookies*, dan pellet ikan cascara. “Selain tidak banyak limbah yang menggunung, produk turunan ini menjadi solusi cerdas yang berujung pada sumber penghasilan tambahan bagi anggota KTH”, jelas Sukma Hikayat Penyuluh Kehutanan Pendamping KTH Gunung Kamojang.

Cascara memiliki karakter rasa yang berbeda dengan kopi. Cara pembuatan cascara yaitu buah kopi yang sudah dipetik dicuci di dalam bak berisi air. Setelah itu biji kopi dikupas atau dipisahkan dari kulitnya dengan menggunakan mesin pengupas kopi atau lebih dikenal dengan mesin pulper. Kemudian jemur dibawah sinar matahari selama 2 – 7 hari sampai buah kopi benar-benar kering untuk mencegah jamur. Satu kg buah kopi menghasilkan satu ons cascara kering.

Teh cascara merupakan salah satu produk turunan cascara yang paling banyak digemari. Teh cascara memiliki aroma cita rasa teh yang berbeda dengan teh pada umumnya. Ketika menikmati tehnya, ada rasa asam dan rasa manis buah-buahan yang dominan. Rasa buah-buahan seperti pisang, nanas, nangka, mangga rambutan dan lain-lain menjadi dominan tergantung dari tempat ditanamnya kopi tersebut. Mengapa demikian? Pada dasarnya kopi mempunyai sifat higroskopis yaitu kemampuan menyerap bau aroma di sekitarnya, hal ini berlaku juga untuk cascara kopi yang memiliki beranekaragam rasa buah. Selain itu tidak ada rasa pahit dalam teh cascara karena tidak ada proses roasting dalam pengolahannya.

Cascara yang dijadikan bahan baku teh harus benar-benar kering agar warna hasil seduhan tehnya maksimal. Cara penyajian teh cascara hampir sama dengan teh pada umumnya. Teh diseduh dengan air panas lalu didiamkan beberapa saat sampai keluar ekstrak cascaranya. Kandungan kafein pada teh cascara rendah. Meskipun diseduh dalam waktu yang lama dan suhu tinggi kadar kafeinnya hanya mencapai 111,4 ml/liter. “Oleh karena itu

teh cascara menjadi salah satu alternatif pengganti minum kopi tanpa takut sulit tidur”, tutur Sudarman. Teh cascara juga memiliki kandungan antioksidan, polifenol dan cholorogenic acid yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan menurunkan kadar gula darah.

Selain teh, cascara dapat diolah menjadi tepung dan *cookies*. Cascara yang sudah kering digiling hingga menjadi bubuk tepung. Tepung cascara ini bisa menjadi bahan baku untuk membuat aneka makanan lezat. Dan hebatnya lagi, tepung cascara ini bebas gluten dan memiliki serat lima kali lebih banyak dari gandum. Plus mengandung zat besi yang tiga kali lebih banyak dari bayam segar. Tepung cascara dapat diolah menjadi cookies. Sama seperti pengolahan cookies lainnya, dicampur mentega dan bahan lainnya. Yang membedakan, citarasa cookiesnya ada rasa buah-buahannya. Hebatnya cookies cascara dari KTH Gunung Kamojang menjadi salah satu sajian dan souvenir pertemuan G20 yang diadakan di Jogja. Tepung cascara dapat dimanfaatkan juga sebagai pellet ikan. Tepung cascara dicampur dengan protein lain. Pemberian pellet ikan dari cascara dapat meningkatkan produktivitas ikan.

Pengolahan Cascara kopi menjadi produk bermanfaat meningkatkan pendapatan anggota KTH Gunung Kamojang. Cascara cookies yang kaya nutrisi memiliki omset Rp. 21.600.000/tahun, pellet ikan menghasilkan omset Rp. 2.400.000/kuintal, dan teh cascara mencapai omset Rp. 26.400.000/tahun. Harapan ke depan cascara dapat diolah lagi menjadi produk lain yang kaya manfaat. Selain dapat meningkatkan perekonomian anggota kelompok, juga dapat menjaga kelestarian alam Gunung Kamojang sehingga fungsi ekonomi dan ekologi tercapai secara beriringan. ●

Nden Rissa Hadikusumah, S.Si, M.Si

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan BP2SDM, Kemneterian LHK



Tepung cascara kopi dan cookies dari tepung cascara kopi

Alur Proses Pembuatan Cascara sampai dengan produk turunannya



KOPI BELUT, KOPI UNIK RACIKAN KTH SRIKANDI

Para pencinta kopi pasti sudah tahu kalau terdapat berbagai jenis kopi yang dijual di pasaran. Ada kopi yang dibagi sesuai jenisnya, takarannya, cara penyeduhannya, dan juga rasanya. Nah, kali ini kita akan membahas kopi unik yang disebut dengan kopi belut produk dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Srikandi.



Sebelum kita kupas kopi belut, kita bahas dulu tentang KTH Srikandi. KTH Srikandi beralamatkan di RT 003 RW 002 Desa Puuhopa, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahun ini KTH Srikandi mendapatkan fasilitasi pengembangan KTH menuju KTH mandiri yang output-nya adalah menjadi KTH kelas Utama. Komoditas usaha KTH Srikandi adalah kopi belut, KTH memiliki kebun kopi

1 Ha, kebun jahe merah 0,5 Ha, kebun akar bunga tunjuk langit 0,25 Ha dan bak tempat budidaya belut 50 bak. KTH Srikandi diketuai oleh Sunarsih Saranani, SP dengan anggota KTH sejumlah 15 orang. Sesuai dengan namanya hampir seluruh anggota KTH Srikandi adalah perempuan, hanya 2 anggota yang laki-laki, salah satunya yaitu Agus Fiatna, S.Ag yang merupakan penemu atau pendiri kopi belut.

Agus Fiatna yang merupakan Kepala Desa Puuhopa pada tahun 2019 dalam pengelolaan dana desa membuat program *one village one product* dimana desa diharapkan memiliki produk unggulan. Pada saat itu, Agus membuat kegiatan untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat salah satunya yaitu pengembangan usaha budidaya belut. Hal itu dikarenakan belut merupakan salah satu jenis ikan yang dapat dibudidaya, memiliki kandungan



protein tinggi, membudidayakannya sangat mudah, memiliki prospek pasar yang sangat menjanjikan, selain itu belut juga dapat diolah menjadi bahan olahan seperti keripik belut, abon belut, brownis belut dan kopi belut. Dari awal budidaya belut tersebut ditambah dengan sumber daya alam lain di desa maka muncullah ide untuk membuat kopi belut. Perkembangan kopi belut di KTH Srikandi difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

Biji kopi sebagai bahan utama kopi belut bermanfaat untuk meningkatkan stamina, mencegah kanker, menjaga kesehatan mulut, mengurangi resiko diabetes, mengurangi resiko penyakit Alzheimer dan demensia, mencegah Parkinson, meningkatkan mood. Bahan campuran lainnya yaitu belut (*Monopterus albus*). Belut adalah sekelompok ikan berbentuk mirip ular yang termasuk dalam suku *synbranchidae*. Kebanyakan belut tidak suka berenang dan lebih suka bersembunyi di dalam lumpur. Manfaat belut antara lain menjaga kesehatan tulang, menjaga kes-



ehatan kulit, menurunkan resiko stroke, mencegah anemia, membantu meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kekebalan tubuh.

Selain dua bahan diatas, Akar Tunjuk Langit (*Helminthostochysceylanica*) dan jahe merah (*Zingiber officinale* Var *Rubrum Rhizzoma*) merupakan bahan tambahan untuk kopi belut. Bunga tunjuk langit merupakan jenis tumbuhan ter-

masuk dalam keluarga tumbuhan paku (*Ophiglossaceae*) yang banyak ditemukan di kawasan hutan terbuka dan lembab. Di Indonesia karena wilayahnya merupakan wilayah tropism aka tumbuhan ini dapat tumbuh subur tetapi karena adanya perubahan habitat serta alih fungsi lahan sehingga tumbuhan ini dikategorikan langka dan hamper punah. Manfaat Akar Tunjuk Langit antara lain untuk alergi

kulit, masalah jantung, mengatasi masalah menstruasi, sembelit, penyakit hati, bau mulut, diabetes, dan disfungsi ereksi.

Jahe merah mengandung zat gingerol dan shogaol sebagai antioksidan. Kadar zat zingerol pada jahe merah lebih tinggi dibanding jahe gajah atau jahe biasa. Manfaat jahe merah antara lain meredakan rasa mual, meredakan nyeri dan peradangan, meringankan gejala flu, batuk dan demam, menjaga kinerja jantung, membantu menurunkan berat badan, melancarkan sirkulasi darah.

Rasa penasaran pasti hinggap di pikiran kita, amis atau tidak ya kopi belut itu? Menurut Agus, tambahan jahe merah

akan menghilangkan bau amisnya. Proses pembuatannya yaitu semua bahan baik belut, jahe merah, akar bunga tunjuk langit dibersihkan, kemudian dijemur hingga kering, setelah kering, maka semua bahan disangrai, lalu digiling, diayak dan jadilah bubuk. Bahan-bahan itu disangrai dan digiling masing-masing. Setelah menjadi bubuk lalu diracik sesuai takaran, bubuk belut, bubuk jahe merah, bubuk akar tunjuk langit dan bubuk kopi dicampur menjadi satu.

Agus menjelaskan bahwa kemasan kopi belut telah tiga kali berubah kemasan. Kemasan pertama menggunakan plastik trasparan dengan label dan stikernya di-

tempel manual, kemasan kedua, label pesan dari Yogyakarta dalam bentuk *standingpock* warna silver yang sudah didesain, akan tetapi berhubung harga dan biaya ongkos kirimnya mahal, maka sekarang diganti dengan botol kemasan 100 gram untuk label dan stiker ditempel manual.

KTH Srikandi giat melakukan promosi-promosi selama hampir dua tahun dan seiring berjalannya waktu, kopi belut banyak dilirik oleh berbagai lapisan masyarakat baik dari pusat maupun daerah, bahkan mancanegara. Sampai sekarang, KTH Srikandi memproduksi setiap bulannya 300-500 botol kemasan yang penjualannya ke seluruh kota di Indonesia, bahkan sudah sampai Turki dan Malaysia. Hanya saja, kopi belut belum bisa menjual secara bebas dan dalam jumlah banyak berhubung masih terbentur oleh legalitas dari BPOM yaitu Izin Edar. Yang mana persyaratan itu, sebagai pengelola usaha mikro kecil belum sanggup memenuhi persyaratan dan kriteria yang menjadi rujukan untuk keluarnya izin edar dari BPOM seperti harus ada rumah produksi, penyelia halal, peralatan mesin dan areal pengembangan.

Penyajian kopi belut dapat disesuaikan dengan selera dan kreativitas. Namun biasanya KTH Srikandi menyajikan kopi belut dengan takaran satu sendok makan kopi belut ditambah dengan gula merah secukupnya lalu direbus hingga mendidih. Kemudian diaduk disaring dan kopi belut siap disajikan, mudah sekali ya.

Soal cita rasa tidak perlu diragukan lagi, hampir semua penikmat kopi belut mengatakan nikmat, karena perpaduan rasanya. Bahkan setelah meminumnya berkeriang hangat. Cita rasanya juga sangat berbeda dengan kopi yang lain. Dari ramuan bahan kopi belut diatas kita bisa menerka, apa manfaat kopi belut? tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk meningkatkan vitalitas kaum pria dan menjaga stamina, mantap ya! ●

Ida Gusti Nurul Nuryudaida, S.Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan Badan P2SDM, Kementerian LHK



BAMBU SEBAGAI SUMBER EKONOMI MASYARAKAT

Bambu merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat baik ekologi maupun ekonomi perlu dikembangkan dan dipertahankan keberadaannya. Tanaman bambu banyak tumbuh liar dan kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sebagai sumber ekonomi. Bambu juga dikenal sebagai tanaman pionir yang dapat tumbuh di lahan kritis yang salah satu fungsinya mengembalikan tingkat kesuburan tanah dan meningkatkan ketersediaan air tanah. Pemanfaatan tanaman bambu secara bijak akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan lingkungan.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Berbagai hasil Hutan Kayu (HHBK) yang menjadi komoditas unggulan yang bisa dikembangkan oleh kelompok tani hutan/kelompok masyarakat. Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, hal ini memungkinkan untuk dikembangkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masing-masing. Berbagai produk HHBK unggulan yang bisa dikembangkan antara lain; Kopi, Budidaya Madu, Rotan, Aren, Bambu, Porang dan masih banyak lagi produk-produk lainnya.

Salah satu produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah Bambu. Bambu



Musimin, Ketua KTH Ngudi Makmur pelaku konservasi bambu di Kabupaten Sleman.

juga merupakan tanaman yang memiliki manfaat untuk konservasi lingkungan yang sangat baik. Bambu mampu tumbuh di kondisi lahan yang kritis dan sebagai tanaman pencegah longsor di sepadan sungai. Tanaman bambu dapat diolah menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Potensi tanaman bambu yang melimpah, tetapi pemanfaatan tanaman bambu oleh kelompok masih sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan teknologi tentang pengelolaan tanaman bambu oleh kelompok. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Hingmadi, menyatakan bahwa Indonesia merupakan bagian dari wilayah sebaran bambu, terdapat 140 jenis bambu, dan sekitar 88 jenis merupakan tanaman endemik

Indonesia. Dalam penelitian lain tahun 2021, menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan memiliki 1 juta hektar lebih tanaman bambu, namun, hanya 25.000 hektar yang telah dikelola dalam bentuk hutan/kebun bambu, sementara sisanya tumbuh secara sporadis. Peran perorangan maupun kelompok dalam pengelolaan tanaman bambu sangat penting agar terwujud kemandirian ekonomi, energi dan lingkungan.

Musimin merupakan salah satu orang yang sampai sekarang konsisten dalam pengembangan tanaman bambu. Musimin merupakan ketua kelompok Wanawiyata Widyakarya Ngudi Makmur Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta. Musimin dan kelompok mulai dari tahun 2000 sudah





Lisman dan produk kerajinan dari Bambu yang sudah ekspor ke luar negeri.

mulai melakukan penghijauan tanaman bambu di lereng Merapi. Saat ini, Musimin beserta kelompok sudah membuat arboretum tanaman bambu dengan 25 jenis tanaman bambu seluas kurang lebih 25 Ha. Berbagai edukasi kepada banyak kalangan mulai dari anak-anak, sampai dewasa terkait arti penting manfaat tanaman bambu. Saat ini juga bekerjasama dengan PT. Bambu Nusa Verde dalam pengembangan bioteknologi tanaman bambu. Musimin lebih banyak fokus kepada konservasi tanaman bambu dan mengenalkan tanaman bambu kepada masyarakat. Jiwa konservasi beliau mampu mengubah lahan yang kritis di lereng Merapi menjadi subur dengan tanaman bambu.

Pengembangan tanaman bambu disamping sisi konservasi juga dapat dikembangkan dari sisi ekonomi. Pengolahan tanaman bambu banyak dilakukan perorangan maupun kelompok menjadi produk-produk kerajinan tangan, tetapi dalam pengolahannya masih perlu terus dilakukan pembinaan dan pendampingan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Produk-produk hasil kerajinan dari tanaman bambu mampu bersaing dengan produk-produk dari bahan material kayu.

Salah satu pengrajin bambu yang sudah menuai manisnya mengelola kerajinan

bambu adalah Lisman. Beliau merupakan pengrajin bambu yang berada di Desa Brajan, Sleman, Yogyakarta. Lisman dan pengrajin di desanya sudah banyak menghasilkan produk-produk kerajinan dengan kualitas yang sangat baik. Produk yang dihasilkan oleh Lisman dan teman-teman memiliki omzet lebih kurang 5 juta s.d 40 juta perbulan tergantung dengan tinggi atau rendahnya permintaan. Rata-rata produk yang dihasilkan dalam satu bulan berkisar antara 100 s.d. 300 pcs. Produk yang dihasilkan pun beragam, mulai dari kotak tisu, keranjang buah, lampion, kursi, piring, gelas, tempat lampu dan masih banyak lagi. Produk kerajinan-nya juga sudah merambah pasar ekspor ke luar negeri.



Selain Lisman, ada juga Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) asal Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang sampai saat ini masih konsisten dengan edukasi dan motivasinya kepada kelompok masyarakat terkait pengelolaan bambu, beliau adalah Purwoko. Purwoko dalam aktivitasnya sebagai PKSM juga merupakan pengrajin bambu. Produk yang dihasilkan berupa produk-produk laminasi dan koilin. Produk koilin yang dihasilkan dalam satu bulan bisa mencapai 5 unit, 1 unit terdiri 50 pcs dengan omzet perbulan mencapai 60 juta dan untuk produk laminasi rata-rata 1 unit perbulannya dengan omzet bisa mencapai 17 juta perbulan.

Bambu sebagai produk ekonomi ternyata mampu memberikan nilai jual yang sangat tinggi jika diolah dan dimanfaatkan secara maksimal. Pengolahan tanaman bambu harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan. Peran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian tanaman bambu perlu terus ditingkatkan. Bambu yang memiliki nilai konservasi dan ekonomi harus dikelola secara baik, fungsi konservasi bagi lahan dan fungsi ekonomi bagi masyarakat harus berjalan secara seimbang sehingga bambu sebagai salah satu tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan lingkungan. ●

Fery Ichwansyah, S.Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan Badan P2SDM, Kementerian LHK



Kaliandra merah di kebun masyarakat.

POTENSI KALIANDRA MERAH UNTUK PEMBANGUNAN KEBUN ENERGI

Kaliandra merah (*Calliandra calothyrsus* Benth) merupakan tanaman perdu multi guna. Kandungan kalori yang tinggi pada batang, dahan dan ranting Kaliandra merah memungkinkan pengembangan *wood pellet* (*wood biomass*) sebagai sumber energi terbarukan. Penanaman Kaliandra merah dapat dilakukan dalam bentuk kebun energi dapat dilakukan dengan memanfaatkan tanah tidur milik masyarakat, kanan kiri jalan raya dengan permodalan dari Dana Desa. Kaliandra merah untuk kebun energi berpotensi dikembangkan di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Sumber anggaran pemerintah untuk pembangunan desa sangat beragam. Sebagai contoh di Kabupaten Aceh Besar selain dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat juga terdapat dana *Peumakmu Gampong* (desa) dan dana retribusi sumberdaya alam yang dipungut oleh gampong (desa) serta sumber anggaran lainnya.

Beragamnya alternatif sumber anggaran pembangunan desa, diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Data Biro Pusat Statistik (BPS) pada September 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia di perdesaan 14,93 juta jiwa (12,60%), sedangkan perkotaan hanya sebesar 9,86 juta jiwa (6,56%). Data indeks kedalaman kemiskinan perdesaan sebesar 2,11 sedang perkotaan hanya 1,02, kemudian indeks keparahan kemiskinan perdesaan sebesar 0,53 sedang perkotaan hanya sebesar 0,23. Hal ini berarti kondisi kemiskinan di perdesaan lebih buruk dibandingkan perkotaan.

Penggunaan anggaran desa saat ini lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur penunjang desa seperti jalan, irigasi, jembatan serta sarana penunjang lainnya. Pembangunan infrastruktur desa diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas orang dan barang sehingga roda ekonomi dapat berputar dan dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Namun di sisi lain hendaknya penggunaan dana desa harus lebih diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki nilai manfaat yang lebih maksimal.

Upaya ini dapat dilakukan dengan penggunaan dana desa melalui program pembangunan kebun energi kaliandra merah (*Calliandra calothyrsus Benth.*). Kebun energi ini dapat memanfaatkan lahan-lahan tidur milik masyarakat, pinggir jalan desa atau bahkan tumpang sari dengan tanaman kehutanan maupun tanaman perkebunan yang sudah ada.

Pembangunan kebun energi kaliandra merah dapat menjadi alternatif pendapatan

bagi masyarakat Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Saat ini pendapatan masyarakat Kecamatan Mesjid Raya sangat bergantung pada hasil budidaya kunyit, kemiri, mangga, kelapa, pisang, tanpa ada alternatif pendapatan lainnya. Saat harga komoditas tersebut turun maka otomatis pendapatan masyarakat juga terganggu.

Kenapa kaliandra merah?

Kaliandra merah merupakan tanaman perdu dengan cukup sekali tanam mampu hidup hingga 20 (dua puluh) tahun, tanpa membutuhkan perawatan khusus seperti tanaman lainnya. Setelah 1 (satu) tahun tanam, Kaliandra sudah dapat dipanen dan kemudian dapat dipanen secara kontinyu setiap 6 (enam) bulan.

Daun kaliandra merah biasanya digunakan sebagai hijauan pakan ternak, sedangkan bunga Kaliandra merah dikenal sebagai penghasil nektar yang menjadi makanan lebah madu. Kaliandra merah memiliki kalori yang tinggi pada batang, dahan dan ranting yang menyamai energi fosil batubara. Tak heran jika sudah banyak daerah di Indonesia yang mengembangkan kaliandra merah menjadi *wood pellet* (wood biomass) sebagai sumber energi

terbarukan.

Wood pellet dari kaliandra merah merupakan salah satu jenis bahan bakar alternatif terbarukan yang ramah lingkungan (Bioenergy), dengan bentuk hampir mirip dengan briket kayu, namun ukuran dan bahan perekatnya berbeda. Batang, dahan dan ranting kaliandra merah diolah menjadi serbuk dengan ukuran panjang 1 sampai 3 cm serta diameter sekitar 6 sampai 10 mm setiap butirnya. *Wood pellet* berbentuk silinder yang padat, kepadatannya berkisar 650 kg/m³ atau 1,5 m³/ton.

Keunggulan *wood pellet* dibandingkan batu bara adalah bahan pembuatan *wood pellet* ini bersifat *carbon neutral* yang berarti tidak menambah emisi CO₂ ke atmosfer. Hal tersebut dikarenakan *wood pellet* berasal dari pepohonan yang telah menyerap lebih banyak emisi carbon daripada membuangnya. Dengan begitu *wood pellet* mampu menghasilkan jumlah emisi gas buang yang lebih rendah dari bahan bakar lainnya. Emisi buang CO₂ dari *wood pellet* 8 kali lebih rendah dari bahan bakar gas, serta 10 kali lebih rendah daripada batu bara dan bahan bakar minyak.

Selain itu, limbah *wood pellet* jauh lebih aman daripada limbah batubara. Limbah



Wood pellet Kaliandra Merah.



Persemaian bibit kaliandra merah.

batu bara telah dikategorikan sebagai kategori B3 yang berarti berbahaya, sedangkan limbah *wood pellet* aman, bahkan dapat langsung dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman.

Wood pellet memiliki sifat seperti kayu bakar yang ketika tidak digunakan dapat dipadamkan terlebih dahulu kemudian digunakan kembali ketika dibutuhkan. Berbeda dengan batu bara yang harus digunakan hingga habis dan padam dengan sendirinya. Namun, walaupun memiliki karakter seperti kayu bakar, kandungan kalori *wood pellet* setingkat dengan batubara. Hal tersebut dikarenakan *wood pellet* telah melewati fase pengeringan untuk menghilangkan kadar air pada kayunya.

Tersedianya *wood pellet* yang cukup akan sangat membantu pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan energi nasional baik untuk pemerintah maupun bagi pelaku ekonomi. Melimpahnya *wood pellet* juga akan memudahkan pemerintah untuk menyediakan listrik bagi masyarakat

maupun bagi industri. Bahkan *wood pellet* kaliandra merah memiliki potensi ekspor mengingat banyak negara yang sangat membutuhkan energi hijau ramah lingkungan ini.

Daun kaliandra merah memiliki kandungan protein sangat tinggi, sehingga sangat baik digunakan sebagai bahan pakan ternak seperti sapi dan kambing. Selanjutnya kotoran ternak tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber biogas. Hal ini berarti, tersedianya daun kaliandra merah yang melimpah, dapat menghasilkan biogas dalam jumlah yang cukup besar. Selain pakan ternak daun kaliandra merah juga dapat diolah menjadi pellet hijau sebagai bahan pakan ikan.

Nektar pada bunga kaliandra merah merupakan sumber utama pakan lebah madu. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangkitkan usaha lebah madu dan produk turunannya di perdesaan.

Kaliandra merah juga menjadi tanaman

konservasi tanah dan air, mampu mengembalikan unsur hara tanah, dapat ditanam di lahan tandus. Kaliandra merah bahkan bisa ditanam di tanah dengan struktur gambut kering sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta memiliki ketahanan terhadap cuaca panas saat musim atau kemarau.

Potensi pembangunan Kebun Energi kaliandra merah di Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar hendaknya dapat menjadi titik awal (starting point) bagi Pemerintah Aceh dalam memperkenalkan Kaliandra Merah kepada masyarakat sekaligus menanamnya di lahan tidur. Tentu harapannya dengan pembangunan kebun energi kaliandra merah selain tercapainya Aceh *Green*, juga dalam jangka mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat Aceh. ●

Hirwansyah, S. Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

MAMAKE BAPAKE: DESTINASI PARALAYANG DAN GANTOLE

Bukit Mamake dan Bapake merupakan wisata alam yang dikelola oleh KUPS Jasa Lingkungan, Gapoktan Hutan Mutiara Sarang Tiung Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Wisata alam yang menyuguhkan pemandangan alam juga cocok untuk melakukan kegiatan olahraga kedirgantaraan (aerosport) seperti paralayang dan gantole. Dukungan pihak pemerintah daerah dan swasta dalam menggelar event bertaraf internasional di kawasan wisata alam ini sangat membantu untuk memperkembangkan destinasi wisata alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.



Bukit Mamake Bapake merupakan dua bukit yang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya berkisar kurang lebih hanya 1,5 Km. Penamaan Bukit Mamake awalnya berasal dari ucapan pembekal (Kepala Desa) Sarang Tiung pada saat pertama kali mendaki puncak bukit tersebut. Sesampainya di puncak bukit Pak Pembekal berucap “oh Mamake” yang berarti Oh ibuku. Pak Pembekal takjub akan indahnya

pemandangan puncak bukit tersebut. Sedangkan penamaan Bukit Bapake dilakukan oleh Bupati Kotabaru Sayed Jafar Al-Idrus saat melakukan survei di bukit sebelah Bukit Mamake. Jadilah sampai sekarang bukit tersebut dinamai Bukit Mamake Bapake.

Lokasi wisata alam Bukit Mamake Bapake tidak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten yakni hanya sekitar 6 Km yang dapat ditempuh dalam 10 – 15

menit menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sedangkan dari Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan terdapat beberapa alternatif perjalanan. Dari Banjarbaru dapat menggunakan pesawat selama 45 menit dan dilanjutkan perjalanan darat selama kurang-lebih 30 menit. Bisa juga menempuh perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 4 selama kurang lebih 6 jam dilanjutkan menyebrang kapal ferry selama 1 jam dan melanjutkan perjalanan



Pengunjung dan kegiatan camping di Puncak Mamake.



Sunset, sunrise dan Pemandangan malam hari di Bukit Mamake Bapake.

darat kembali selama 1 jam.

Wisata alam bukit Mamake Bapake saat ini dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Jasa Lingkungan yang merupakan bagian dari Gapoktan Hutan Mutiara Sarang Tiung. Anggota KUPS Jasa lingkungan berjumlah 12 orang. Pada periode 2017 – 2021, pengunjung wisata alam Bukit Mamake Bapake belum ditarik retribusi. Pertimbangannya antara lain akses jalan menuju lokasi wisata yang belum siap serta belum ada payung hukum sebagai dasar penarikan retribusi tersebut.

Pada akhir tahun 2021 hasil musyawarah Desa Sarang Tiung memutuskan untuk menarik retribusi sebesar Rp. 5.000,- untuk masuk lokasi wisata alam Mamake Bapake. 10% dari pendapatan bersih dari

retribusi tersebut dimasukan ke dalam kas Desa Sarang Tiung. Hingga bulan Juli 2022 rata-rata pengunjung sekitar 50-100 Orang per hari dan meningkat pada akhir pekan. Rata-rata pendapatan KUPS Jasa Lingkungan sekitar Rp. 7.500.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- per bulan.

Paralayang dan Gantole di Bukit Mamake Bapake

Kedua bukit ini memiliki keunggulan masing-masing, di Bukit Mamake pengunjung dapat melakukan aktivitas camping, selfie dan menikmati pemandangan laut, kota dan gunung serta *sunset* dan *sunrise*. Pada awalnya Bukit Mamake menjadi favorit pengunjung dalam melakukan aktivitas camping, selfie dan menikmati

pemandangan laut, kota dan gunung serta *sunset* dan *sunrise*. Dalam perkembangannya Bukit Mamake dicoba untuk dijadikan *spot take off* paralayang. Namun hasil uji terbang perdana oleh atlit paralayang Jawa Barat bahwa *take off* di Bukit Mamake memiliki kendala yakni turbulensi. Selanjutnya dilakukanlah percobaan *take off* dari Bukit Bapake yang menghasilkan rekomendasi bahwa Bukit Bapake dapat dijadikan *site take off* olahraga paralayang dan gantole karena memiliki ketinggian yang optimal dan tanpa adanya gangguan turbulensi.

Saat terbang dengan paralayang dan gantole, pengunjung dapat menikmati pemandangan pegunungan, laut lepas dan perkampungan pinggir pantai. Namun masih terdapat kendala ketika *Take off* di Bukit Bapake, yakni lokasi *landing* yang berada di pantai sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Oleh karena hal tersebut aktivitas olah raga kedirgantaraan hanya dapat dilakukan pada saat air laut surut sekitar pukul 10.00 – 16.00 WITA. Pemerintah Kabupaten Kotabaru sedang merencanakan pembangunan lokasi *landing* paralayang dan gantole permanen sehingga aktivitas paralayang dan gantole tidak lagi terpengaruh pasang surut air laut.

Dalam pengelolaan wisata alam Bukit Mamake Bapake KUPS Jasa lingkungan Gapoktan Hutan Mutiara Sarang Tiung menjalin kerjasama multi pihak baik dengan Pemerintah Daerah maupun Swasta. Hingga saat KUPS Jasa Lingkungan telah bermitra dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru, PT. Arutmin Indonesia NPLCT, PT. Sebuk Iron Literatic Ores dan KPH Pulau Laut Sebuk sebagai UPT Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pihak pemerintah daerah Kotabaru sangat konsisten dalam mendukung pengembangan wisata alam Bukit Mamake Bapake. Pada Tahun 2022 Pemda Kotabaru membangun sarana prasarana penunjang wisata alam Bukit Mamake Bapake seperti pembuatan akses jalan dari Bukit Mamake menuju Bukit Bapake, pembuatan tempat parkir, mushola, kantin, *viewing bridge* dan gazebo, serta *shelter* bagi para pilot dan atlet paralayang dan

gantole. Sementara itu, pihak PT. Artumin Indonesia NPLCT memberikan bantuan berupa tenda camping sedangkan PT. Se-buku Iron Literatic Ores telah memberikan bantuan peralatan penunjang operasional KUPS Jasa Lingkungan. KPH Pulau Laut Sebuku memberikan bantuan pembangunan gazebo sebagai sarana pendukung wisata alam pada tahun 2019.

Saat ini, berbagai pihak sedang konsisten untuk melakukan promosi lokasi wisata alam Bukit Mamake Bapake dengan kegiatan unggulan paralayang dan gantole. Pada 29 Mei - 4 Juni 2022 diadakan acara eksibisi Aerosport Kotabaru. Acara tersebut melibatkan altet Paralayang dan Gantole serta Instruktur dan tandem master dari dalam dan luar negeri. Terlaksananya even bertaraf internasional tersebut memberikan angin segar dalam upaya para pihak mewujudkan Paralayang dan Gantole sebagai kegiatan unggulan serta mengenalkan destinasi wisata alam Bukit Mamake Bapake.

Kegiatan paralayang dan gantole di Bukit Mamake Bapake diharapkan menjadi salah satu kegiatan wisata unggulan Kabupaten Kotabaru yang dapat memberikan dampak bagi peningkatan



Kegiatan *Take off* Paralayang dan Gantole di Bukit Bapake.

pendapatan masyarakat baik anggota KUPS Jasa Lingkungan, anggota HKm Gapoktan Hutan Mutiara Sarang Tiung. Pengelolaan wisata alam Bukit Mamake Bapake oleh KUPS Jasa lingkungan juga diharapkan memberikan bukti bahwa perhutanan sosial tidak hanya sebagai program pemerintah saja tapi memberikan dampak

peningkatan masyarakat. ●

Farida Suryamah, S.Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Firmansyah, S.Hut, M.Si

Penyuluh Kehutanan Ahli, Pusat Penyuluhan BP2SDM, Kementerian LHK



Sensasi mendarat (*landing*) di pantai.

TIWOHO MANGROVE TRAIL: EKOWISATA MANGROVE BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PEMULIHAN PEREKONOMIAN PASCA COVID-19



Tiwoho Mangrove Trail merupakan salah satu kegiatan Kelompok Masyarakat di Desa Tiwoho. Kelompok tersebut merupakan dampingan dari Penyuluh Kehutanan Taman Nasional Bunaken. Pengembangan potensi wisata alam mangrove trail berkaitan erat dengan upaya pendampingan kelompok masyarakat terutama peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok, perlindungan dan pelestarian kawasan mangrove hingga pemulihan ekosistem, yang diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Soft Opening dan Grand Launching *Tiwoho Mangrove Trail* sukses digelar, Rabu (20/10/2021). Acara tersebut berlangsung di desa penyangga kawasan Taman Nasional Bunaken Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara sebagai bentuk pengembangan destinasi wisata alam terbatas. Upaya pembangunan wilayah Desa Tiwoho dengan pengembangan potensi wisata alam *mangrove trail* berkaitan erat dengan upaya pelestarian ekosistem mangrove di TN Bunaken yang diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan kedatangan wisatawan dari lokal maupun manca negara yang dapat memberikan *Multiplier Effects Economy* di masa mendatang. BTNB memberikan dukungan pengembangan wisata alam terbatas di Desa Tiwoho melalui pendampingan kelompok masyarakat dalam kegiatan wisata terutama peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok, perlindungan dan pelestarian kawasan hingga pemulihan ekosistem.

Pendampingan Masyarakat Daerah Penyangga

Desa Tiwoho adalah salah satu desa di daerah penyangga kawasan konservasi Taman Nasional jBunaken. Secara administratif, Desa Tiwoho masuk dalam Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Tiwoho berpenduduk sekitar 1164 orang dan 348 KK (BPS 2021). Desa Tiwoho ditunjuk sebagai desa wisata rintisan menurut Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 64 tahun 2021. Hal ini didasari atas penunjukkan Likupang, Minahasa Utara sebagai salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, daerah di sekitarnya perlu juga mempersiapkan diri menyambut geliat pariwisata yang perlahan mulai dibuka normal kembali secara bertahap oleh pemerintah. Begitu juga beberapa wilayah TN Bunaken yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Guna mendukung hal tersebut, diperlukan pengembangan wisata

di Desa Tiwoho.

TN Bunaken sebagai kawasan pelestarian alam yang bersinggungan langsung dengan Desa Tiwoho, memiliki 3 (tiga) prinsip pengelolaan, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nutfah, dan pemanfaatan secara lestari. TN Bunaken menugaskan penyuluh kehutanan untuk mendampingi masyarakat Desa Tiwoho dalam bentuk bina cinta alam. TN Bunaken selaku pengelola kawasan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan konservasi. Diharapkan dengan adanya pendampingan intensif, dapat terjalin kedekatan emosional dan pemahaman dari masyarakat akan pentingnya kelestarian TN Bunaken serta peluang kerjasama pengelolaannya.

Maret 2021, pemerintah desa Tiwoho memohon izin pada Balai TN Bunaken (BTNB) untuk membangun sarpras ekowisata alam jembatan bambu (*trail*) yang melewati hutan mangrove. Dengan berbagai pertimbangan, pembangunan *mangrove trail* di desa Tiwoho yang merupakan kerjasama antara Balai Taman Nasional Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KS-DAE), Kementerian LHK dengan Pemerintah Desa Tiwoho, Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan. Upaya pembangunan wilayah Desa Tiwoho dengan pengembangan potensi wisata alam *mangrove trail* berkaitan erat dengan upaya pelestarian ekosistem mangrove di TN Bunaken yang diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, terkhusus Desa Tiwoho. Dengan kedatangan wisatawan dari lokal maupun manca negara yang dapat memberikan *Multiplier Effects Economy* di masa mendatang.

Pembentukan Kelompok Karya Muda Tiwoho

Giat Bina Cinta Alam (BCA) Balai TN Bunaken (BTNB) di Desa Tiwoho semakin ditingkatkan. Selain pembinaan masyarakat melalui kader konservasi, diperlukan pembentukan kelompok masyarakat yang akan menjadi pengelola *Tiwoho mangrove trail*. Berjalan beriringan dengan pembangunan sarpras wisata, BTNB juga memfokuskan masyarakat dalam kesiapan sumber

daya manusia (SDM) di desa. Pembentukan kelompok didasari atas kebutuhan kelembagaan yang dapat bermitra dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan ekowisata mangrove kedepan. Mei 2021, kelompok swadaya masyarakat terbentuk dengan nama Karya Muda Tiwoho. Semangat pembentukan ini mengingat potensi ekowisata mangrove yang akan menjadi destinasi wisata baru TN Bunaken ramai dikunjungi wisatawan. Begitu juga dengan ketersediaan SDM para generasi muda Desa Tiwoho yang memiliki minat terhadap kegiatan konservasi. Karya Muda Tiwoho di awal terdiri dari 16 orang anggota dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan berbeda.

Sejak didirikan, Karya Muda Tiwoho berperan aktif dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di TN Bunaken khususnya di wilayah desa mereka sendiri. Agenda rutin yang dilakukan adalah pembersihan pantai dan pengumpulan sampah plastik setiap hari Sabtu pagi dan secara berkala melakukan pembibitan serta penanaman mangrove. Begitu juga dalam partisipasi pembangunan sarpras, secara bergantian anggota kelompok membantu penyelesaian dan menghias jembatan bambu (*trail*) dengan pernik lampu dan aneka warna cat agar lebih menarik dan instagramable sebagai spot selfie. Pembangunan selesai bulan Juli 2021 dan bertahap mulai di buka untuk umum dengan jumlah wisatawan terbatas serta protokol kesehatan yang ketat. Seiring berjalannya waktu, wisatawan yang datang bertambah banyak dan viral di media sosial lokal sekitaran Sulawesi Utara (Manado, Minahasa, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara).

Grand Launching Tiwoho Mangrove Trail

Ekosistem mangrove memiliki banyak fungsi, vegetasi mangrove mampu menahan laju abrasi gelombang laut yang mengancam masyarakat pesisir. Vegetasi mangrove juga habitat dari beragam tumbuhan dan satwa liar yang membentuk komunitas sehingga potensi ini dapat dikembangkan kedepan (*Bio-Prospektif*). Ekosistem mangrove dapat dikembangkan



Pembentukan dan Kelompok Masyarakat

sebagai obyek daya tarik wisata alam tanpa harus merusak seperti *mangrove trail* di desa Tiwoho. Adapun spesifikasi bangunan mangrove *trail* dengan panjang *trail* ±230 meter dan lebar 1,5 meter dengan bahan yang terbuat dari bambu serta kayu aksesoris lainnya. *Soft Opening* dan *Grand Launching Tiwoho mangrove trail* sukses digelar, Rabu (20/10/2021). Acara tersebut berlangsung di desa penyangga kawasan TN Bunaken Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai bentuk pengembangan destinasi wisata alam terbatas.

Pelaksanaan soft opening yang dilakukan secara daring dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A. serta secara virtual juga hadir Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, SE beserta jajaran, Direktur ILO perwakilan Indonesia dan Timor Leste, dan perwakilan kedutaan besar Inggris di Jakarta. Dalam sambutan Menparekraf, “Dibawah kepemimpinan pak Joune Ganda bupati milenial kita, yang selalu menjadi inspirasi kami. Sehingga Minut lebih maju dalam dunia pariwisata. *Mangrove trail* desa Tiwoho dibangun hanya dari bambu dan kayu, sehingga ramah lingkungan. Saya berharap pembukaan mangrove *trail* di Desa Tiwoho ini bisa menjadi contoh implementasi ekowisata di Indonesia. Tempat ekowisata ini akan menjadi destinasi baru yang menarik karena sejalan dengan tren gaya hidup berkelanjutan sekaligus

menghasilkan pendapatan bagi masyarakat setempat,” Sementara itu, Bupati dalam sambutannya sekaligus membuka seluruh rangkaian kegiatan secara virtual menuturkan, jika dirinya percaya mangrove *trail* ini dapat mensejahterakan masyarakat di desa Tiwoho. “Saya juga berterimakasih kepada pak menteri yang juga ikut memantau dan mendukung sehingga soft opening dan grand launching *Tiwoho mangrove trail* ini dapat sukses digelar,” ungkap JG sapaan akrab Bupati. Grand launching dilaksanakan setelah serangkaian acara virtual selesai dilaksanakan yang didalamnya termasuk mempromosikan Desa Tiwoho sebagai desa wisata dengan destinasi dan layanan lain seperti *homestay*, *camping ground*, *underwater tourism*, dan paralayang secara dokumentari dan *live report*. Lebih dari 30 peserta undangan dari berbagai instansi hadir secara *offline* dan 126 akun lainnya bergabung dalam acara tersebut secara *online*.

Kepala Balai TN Bunaken, Genman S. Hasibuan S.Hut, MM bersama Sekretaris Daerah Kab. Minut Jimmy Kuhu, meresmikan pembukaan *Tiwoho mangrove trail* menjadi destinasi wisata baru di TN Bunaken. Upaya konservasi yang dilakukan BTNB melalui pemanfaatan lestari dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut juga, Kabalai TN Bunaken secara simbolik menyerahkan bantuan kepada kedua kelompok masyarakat yang ada di Desa Tiwoho yaitu Karya Muda Tiwoho

(pengelola *mangrove trail*) dan Kuda Laut (kelompok nelayan tradisional). Acara ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama tamu undangan dengan hidangan khas panganan lokal yang disediakan secara swadaya oleh masyarakat. Rangkaian acara juga diisi oleh berbagai kebudayaan dan kesenian lokal seperti pencak silat, masamper, musik kolintang, dan lain sebagainya.

Manfaat Langsung untuk Masyarakat Desa

BTNB memberikan dukungan pengembangan wisata alam terbatas di Desa Tiwoho melalui pendampingan kelompok masyarakat dalam kegiatan wisata terutama peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok, perlindungan dan pelestarian kawasan hingga pemulihan ekosistem. Seiring berjalannya wisata *Tiwoho mangrove trail* tercatat hingga awal bulan Desember 2021 total wisatawan mencapai angka 7259 orang. Secara ekonomi hal ini berdampak positif kepada masyarakat sekitar yang berjualan makanan minuman dan juga kelompok Karya Muda Tiwoho pengelola *mangrove trail* yang membuka usaha *cafe*.

Pengembangan Tiwoho mangrove *trail* kedepan diharapkan sebagai tujuan wisata baru di Sulawesi Utara provinsi yang terkenal dengan bahari. Pariwisata dan rumah bagi Taman Nasional Bunaken, tempat menyelam paling terkenal di Indonesia dengan konsep edukasi ekosistem

mangrove. Pemerintah desa Tiwoho yang telah mengucurkan lebih dari Rp 75 juta dana desa untuk pembangunan mangrove *trail* dan sisanya berasal dari kontribusi masyarakat setempat. Investasi ini dikelola oleh kelompok Karya Muda yang kemudian secara organisasi desa menjadi unit bisnis di bawah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Kedepan selain mangrove *trail* yang menawarkan pengalaman ekowisata kepada pengunjung menikmati rimbunnya hutan bakau, menyaksikan matahari terbenam dari pantai, juga ada alternatif minat khusus lain sesuai potensi yang ada di desa Tiwoho. Seperti olahraga yang memompa adrenalin yaitu paralayang, pemantauan Tarsius, kemah di bukit Gunung Tumpa, *homestay*, dan *event* adat masyarakat lokal.

Dalam aspek penguatan kelembagaan kelompok, BTNB dibantu oleh beberapa instansi lain untuk pemberdayaan ma-

sarakat Desa Tiwoho. ILO (Organisasi Ketenagakerjaan Dunia) melalui Politeknik Negeri Manado dalam bidang peningkatan kapasitas kelompok masyarakat Desa Tiwoho dalam pengoperasian wisata mangrove *trail* kedepannya. Kerjasama yang sudah berjalan akan lebih berkembang dimasa yang akan datang dalam berbagai keahlian lain yang dibutuhkan sesuai pengembangan ekowisata. Ini termasuk sesi pelatihan tentang pendidikan keuangan, pengembangan usaha desa, *green business*, *manajemen homestay*, pengembangan produk yang berkelanjutan, dan manajemen festival yang disediakan untuk penduduk desa Tiwoho dari akademisi lokal.

Roy Marthen Saladi, ketua kelompok Karya Muda adalah seorang mantan *guide* di sebuah agen perjalanan lokal wisata TN Bunaken. Ketika pandemi COVID-19 menghantam industri pariwisata dengan

keras, Roy diberhentikan. “Saat pandemi, anak muda di desa kami menjalani kehidupan yang tidak layak. Banyak dari mereka yang menganggur dan mempertahankan kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, merokok, kecanduan game dan lain-lain,” kata Roy. Roy berterima kasih kepada BTNB atas kerjasamanya dalam pembangunan wisata mangrove *trail*, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pemuda desa. “Ketika saya dipercaya menjadi ketua, visi saya adalah menciptakan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka. Kami sekarang dapat meningkatkan pendapatan kami dari menjalankan kafe sebagai sumber pendapatan lain.” Jelas Roy.

Dimintai keterangan terpisah tentang keberhasilan soft launching dan grand opening, Roy teringat dengan perjuangan seluruh masyarakat Desa Tiwoho yang ikut andil dalam hajat besar tersebut. “Tidak ada dari kami yang memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan suatu acara, apalagi meluncurkan acara tingkat tinggi seperti ini. Kami merasa beruntung mendapatkan dukungan dari banyak pihak dalam penyelenggaraan dengan adanya pelatihan. Selama pelatihan mereka dibekali dengan keterampilan manajemen acara dan bekerja untuk menghasilkan ide festival, mendefinisikan konsep acara, memilih komite, menganggarkan, mengembangkan proposal sponsor dan memastikan bahwa setiap detail operasi diperhatikan. Kadang saya sendiri tidak percaya bahwa kami akhirnya berhasil. Acara ini memberikan kami kesempatan untuk belajar dan membuktikan bahwa kami bisa melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Ini meningkatkan kepercayaan diri kami ke banyak level yang lebih tinggi dari sebelumnya.” Bagi Roy, Tiwoho mangrove *trail* tersebut tidak hanya mendatangkan pemasukan bagi desa, tetapi juga membawa perubahan positif kehidupan masyarakat khususnya generasi muda di desa. ●

Ermas Isnaeni Lukman, S. Pi.

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Balai Taman Nasional Bunaken



MICIL: ASA WISATA DI PANTURA JAWA

Upaya penanaman mangrove di muara sungai Bondet Cirebon mengantarkan KTH Mina Citra Lestari mengembangkan Wisata Bahari Micil. Perjuangan Purwadi dalam mengembangkan wisata bahari dilanjutkan oleh Akbarudin anaknya. Kini lokasi tersebut akan dikembangkan menjadi Kawasan Eco-edu Wisata Mangrove Micil dengan menggandeng berbagai pihak. Masih banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi Akbarudin dalam mewujudkan asa Purwadi.



Aneka spot foto di Kawasan Wisata Bahari Micil.



Mempunyai usaha yang menghasilkan pendapatan berlimpah adalah impian setiap orang. Tinggal sejauh mana keteguhan dan kerja keras orang tersebut dalam merealisasikan mimpi tersebut. Mimpi yang sama juga ada dalam benak setiap anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Mina Citra Lestari. Sebuah kelompok yang berlokasi di Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Kelompok ini bermula dari kekawatiran Purwadi pemuda desa setempat. Purwadi khawatir jika tidak melakukan sesuatu, muara Sungai Bondet yang mengalir di Desa Grogol akan tergerus abrasi ombak laut Jawa. Selain itu muara Sungai Bondet



Anak-anak menikmati objek Wisata Bahari Micil.



Penanaman Mangrove di KTH Mina Citra Lestari.

yang merupakan habitat berbagai jenis burung akan musnah jika masyarakat tidak bertindak.

Dengan fasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Purwadi kemudian membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (Pokmaswas) Mina Citra Lestari pada tahun 2005. Sebuah kelompok yang dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya kelestarian sumber daya kelutan dan perikanan. Penamaan Mina Citra Lestari memiliki makna tersendiri, Mina yang berarti Ikan, Citra yang berarti lokasi atau tempat dan Lestari yang berarti subur dan Makmur. Mina Citra Lestari berarti melestarikan suatu tempat supaya hasil ikan melimpah.

Sejak Mina Citra Lestari didirikan, sejak saat itu pula upaya rehabilitasi hutan mangrove dilakukan. Kelompok ini selalu menyediakan bibit mangrove bagi masyarakat yang ingin menanam mangrove di lahan yang sudah disiapkan. Berbagai elemen masyarakat sudah berkontribusi dalam menanam mangrove di Mina Citra Lestari. Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Perikanan, PT. Pelindo II, Dinas Kehutanan, ITB, UNNES, IAIN Cirebon, hingga berbagai komunitas pecinta alam sudah pernah menanam mangrove di Mina Citra Lestari. Selain itu kelompok ini juga



Pelatihan Penguatan Kelembagaan KTH Micil.

menjadi objek rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 11 hektar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wisata Bahari Micil

Mangrove yang ditanam tumbuh dengan baik. Pelan tapi pasti hamparan sabuk hijau mangrove mulai terlihat di muara Sungai Bondet. Purwadi dan anggota kelompok lain kemudian memiliki ide untuk membuka objek wisata bahari. Tahun 2019 mulailah dibuka Wisata Bahari Micil yang merupakan akronim dari nama kelompok tersebut.

Untuk mendukung wisata Bahari Micil

maka dibangunlah berbagai sarana dan prasarana penunjang wisata. Mulai dari papan petunjuk, areal bermain anak-anak, plang nama pohon, hingga jalan tracking mangrove dibangun dan ditata sedemikian rupa.

Keberadaan Wisata Bahari Micil menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Dengan tiket masuk Rp. 5.000, tak kurang dari 300 orang per minggu berkunjung ke Micil. Uniknya 80% pengunjung Micil adalah anak berusia kurang dari 15 tahun. Hal itu memantik ide baru, untuk mengembangkan Wisata Bahari Micil menjadi kawasan Eco-Edu Wisata Mangrove.

Untuk menunjang kawasan eco-edu wisata mangrove maka Pokmaswas Mina Citra Lestari kemudian bertransformasi menjadi Kelompok Tani Hutan (KTH) Mina Citra Lestari pada tahun 2020. KTH dengan luas wilayah kelola 14 hektar ini termasuk KTH kelas Madya dan sudah diregister pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Untuk menunjang terwujudnya kawasan eco-edu wisata mangrove, KTH ini sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. KTH ini sudah mendapatkan bantuan pembuatan gazebo dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembuatan taman bermain dari Yayasan Erick Thohir serta bantuan alat sarana produksi dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Kadipaten.

Untuk memperkuat kelola kelembagaan KTH Micil, BPLHK Kadipaten juga melatih anggota KTH Micil agar mampu mengelola kawasan eco-edu wisata mangrove sesuai standar pengelolaan kawasan wisata yang baik. Penguatan tiga kelola KTH juga dilakukan secara terus menerus oleh Yayat Hidayat, Penyuluh Kehutanan pendam-

ping KTH Micil.

Tahun 2021 Purwadi berpulang ke hadirat Yang Maha Kuasa. Kini tongkat estafet kepemimpinan Micil dipegang oleh Akbarudin, anak lelaki Purwadi. Pemuda kelahiran Cirebon 26 tahun lalu itu memang sejak kecil sudah akrab dengan mangrove. Sepulang sekolah Akbarudin kecil memilih ikut bapaknya menanam mangrove, alih-alih bermain layangan bersama teman sebayanya. Kini Akbarudin rela mengubur mimpi bekerja di kota seperti pemuda umum seusianya. Akbarudin patuh pada petuah sang ayah yang pernah mengamanatinya untuk tetap tinggal di Desa dan memajukan Wisata Bahari Micil.

Bukan hal yang mudah bagi Akbarudin untuk meneruskan perjuangan mendiang Bapaknya. Kepemimpinan Akbarudin di usia muda kadang masih belum diakui oleh seluruh anggota KTH. Sepertinya masih tabu bagi sebagian besar anggota KTH yang lebih tua untuk mengikuti arahan ketua KTH yang usianya jauh lebih muda. Perlu banyak waktu bagi Akbarudin untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam mengelola KTH Micil.

Tugas berat juga sudah menanti Akba-

rudin. Bagaimana menjaga mangrove yang sudah tertanam sambil memperluas areal penanaman mangrove. Bagaimana mengatasi permasalahan sampah yang setiap hari mengotori kawasan mangrove Micil. Akses jalan masuk ke kawasan Eco-Edu Wisata Mangrove Micil masih memerlukan perbaikan. Jalan masuk yang mesti memutar, dan jalan yang masih berupa batu perlu mendapat perhatian serius. Perlu pendekatan yang intens antara KTH Micil dengan pemerintah Desa Grogol dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada Akbarudin dan anggota KTH Micil lainnyalah beban mewujudkan mimpi berada. Mewujudkan asa wisata bahari di Pantura Jawa yang dulu pernah Purwadi idam-idamkan. Kita bisa membantu Akbarudin mewujudkan mimpinya, dengan berkunjung ke kawasan eco-edu wisata mangrove Micil. Kapan-kapan jika ada kesempatan. ●

Enrico Firgiawan Havier

Penyuluh Kehutanan CDK Wilayah VIII Jawa Barat

Budi Budiman, S.Hut, M.Sc

Penyuluh Kehutanan Ahli Muda, Pusat Penyuluhan, BP2SDM, Kementerian LHK



Akbarudin memberikan penjelasan tentang lokasi penanaman mangrove.

MANGROVE: BENTENG KOTA BONTANG

Upaya pelestarian mangrove di Kota Bontang melalui rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove memerlukan dukungan dan strategi yang tepat, intensitas dan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan rehabilitasi. Oleh sebab itu, perlunya pendampingan dari Penyuluh Kehutanan pada pelestarian ekosistem mangrove sehingga berdampak positif pada peningkatan perilaku dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan mangrove.



Mangrove sebagai salah satu komponen ekosistem pesisir memegang peranan yang cukup penting, baik di dalam memelihara produktivitas perairan pesisir maupun di dalam menunjang kehidupan penduduk di wilayah tersebut. Bagi wilayah pesisir, keberadaan hutan mangrove, terutama sebagai jalur hijau di sepanjang pantai/muara sungai sangatlah penting untuk suplai kayu bakar, nener/ikan dan udang serta mempertahankan kualitas ekosistem pertanian, perikanan dan permukiman yang berada di belakangnya dari gangguan abrasi, intrusi dan angin laut. Kekhawatiran terus menurunnya kondisi hutan mangrove juga terjadi pada hutan mangrove di daerah pesisir pantai. Fenomena ini, jelas akan mengakibatkan kerusakan



Kegiatan Penanaman Mangrove di Pulau Keding Kota Bontang.

kualitas dan kuantitas potensi sumber daya ekosistem pesisir, di mana hutan mangrove itu berada serta menurunnya, bahkan hilangnya fungsi lindung lingkungan dari hutan mangrove tersebut. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi dan manfaat Hutan mangrove yang rusak harus dilakukan kegiatan rehabilitasi dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi kerusakannya.

Mangrove di Kota Bontang

Kota Bontang memiliki panjang pantai sekitar 14 km yang awalnya merupakan kawasan hutan mangrove. Seiring dengan perkembangan pembangunan, kawasan tersebut, saat ini telah banyak difungsikan sebagai kawasan industri, tambak, pembangunan sarana umum (pelabuhan, rekreasi) dan pemukiman. Keberadaan hutan mangrove bagi Kota Bontang sangat penting karena luas wilayah administrasinya lebih dari 70 % merupakan wilayah laut. Selain sebagai penopang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan budaya masyarakat, mangrove juga sebagai benteng kota yang berbatasan langsung dengan selat Makassar. Kawasan mangrove ini juga melindungi dua perusahaan vital negara yang cukup rentan dengan berbagai ancaman keamanan, termasuk ancaman alam karena terletak di wilayah pesisir. Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya melestarikan kawasan mangrove sebagai penjaga kota Bontang dan kehidupan masyarakat.

Apa manfaat mangrove?

Hutan mangrove mempunyai banyak manfaat baik untuk lingkungan, flora dan fauna yang hidup di sana, hingga masyarakat sekitarnya. Manfaat dari hutan bakau antara lain:

- Menjaga Kualitas Udara dan Air
Rimbunnya hutan bakau dapat menolong manusia untuk memperoleh udara segar dan air bersih. Ini karena hutan bakau berfungsi untuk menyerap semua kotoran dari sampah manusia dan kapal di laut. Hutan bakau juga menyerap semua jenis logam berbahaya, sehingga membuat kualitas air jadi lebih bersih.
- Mencegah Tsunami
Gelombang raksasa ini diakibatkan



Kegiatan Budidaya Rumput Laut.

oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Akar Hutan bakau yang kuat bisa mencengkeram tanah, sehingga mengurangi dampak tsunami dengan mengurangi kerusakan akibat aliran air ke daratan. Hutan bakau dengan lebar ratusan meter terbukti mengurangi ketinggian tsunami sekitar 5-30%.

- Habitat Biota Laut

Beberapa spesies udang, ikan, dan kepiting bisa berkembang biak dengan nyaman di kawasan hutan bakau.

- Mencegah Abrasi Laut

Abrasi merupakan proses pengikisan daratan oleh gelombang yang mengurangi wilayah daratan. Nah, hutan bakau bisa menghalangi air laut yang akan mengikis daratan.

- Menahan Angin dan Badai

Hutan bakau terdiri dari banyak tumbuhan bakau lebar yang bisa menahan badai dan angin. Satu kilometer dari hutan bakau mampu mengurangi 75% dampak badai dan mengurangi tingkat banjir di daerah pesisir dengan signifikan.

Tumbuhan bakau juga bisa mengurangi banjir akibat badai dengan memperlambat aliran air dan mengurangi gelombang air laut, sehingga tidak akan mencapai daratan.

Perlunya Pelestarian Mangrove

Banyak aksi yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekosistem mangrove yang ada. Namun, perbaikan ekosistem mangrove tidak semudah membalikan telapak tangan, menanam bibit, kemudian ditinggal. Salah satu kegagalan dalam rehabilitasi mangrove adalah paradigma bahwa rehabilitasi ekosistem mangrove hanya sebatas menanam kembali bibit mangrove tanpa ada perawatan yang berkelanjutan. Padahal, program rehabilitasi memerlukan langkah-langkah yang matang, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Pelestarian mangrove harus memperhatikan 3 aspek penting, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara ekologi, pemulihan mangrove perlu memperhatikan kondisi lahan dengan kesesuaian



Kegiatan Pembuatan, Pembibitan Mangrove Kelompok Tani Nelayan Beras Basah.



jenis mangrove yang ditanam, sehingga bibit mangrove dapat bertahan dan beradaptasi di lokasi tanam. Hal ini disebut dengan zonasi mangrove. Indonesia memiliki kekayaan jenis mangrove tertinggi di dunia. Namun, ketika jenis mangrove tertentu ditanam bukan pada habitatnya, walau masih pada ekosistem mangrove, maka mangrove yang ditanam tidak akan tumbuh maksimal, bahkan mati. Secara

sosial, keterlibatan masyarakat sekitar pada kegiatan pelestarian mangrove menjadi penting. Peran para pihak dan pegiat CSR dalam pelestarian mangrove harus menempatkan masyarakat setempat sebagai subyek sekaligus mitra untuk mencapai tujuan bersama. Terkait aspek ekonomi, pelestarian mangrove dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan budi daya perikanan, ekowisata, dan pe-

ngelolaan buah mangrove menjadi kuliner khas daerah setempat.

Upaya pelestarian melalui rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove di Kota Bontang memerlukan dukungan dan strategi yang tepat. Selain itu, rehabilitasi ekosistem mangrove memerlukan intensitas dan keterlibatan beberapa pihak, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan rehabilitasi. Oleh sebab itu, perlunya pendampingan pada pelestarian ekosistem mangrove yang dilakukan oleh para pihak dan beberapa pegiat CSR.

Aksi Penyuluh Kehutanan di Berbas Tengah

Salah satu upaya pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Santan adalah memberikan penyuluhan/edukasi kepada Kelompok Tani Nelayan (KTN) Beras Basah terhadap pentingnya tumbuhan mangrove terhadap keberlangsungan kehidupan di daerah pesisir pantai, guna penyelamatan lingkungan pesisir di kelurahan berbas. Meskipun secara teknis unit kerjanya tidak mencakup wilayah mangrove, namun ia mendapat dukungan dari instansi pemerintah lain seperti Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bontang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam-Berau

dan Balai Taman Nasional Kutai.

KTN Beras Basah berada di kelurahan Berbas Tengah, Bontang Kalimantan Timur. KTN ini beranggotakan 30 orang dan memiliki kegiatan budidaya rumput laut. Kondisi awalnya hutan mangrove di Kelurahan Berbas cukup memprihatinkan di karena kan masyarakat masih mengakses hutan mangrove untuk pemanfaatan sebagai patok tiang serta pembuatan arang bakar maupun untuk kebutuhan sehari hari, sehingga terjadi penurunan jumlah luas hutan mangrove. Namun setelah mendapatkan penyuluhan akan pentingnya menjaga hutan mangrove, kini mereka sadar dan peduli menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove.

Berbagai upaya konservasi ekosistem mangrove di Kelurahan Berbas Tengah terus dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Salah satunya Pembinaan dalam Pemanfaatan Lahan di Kelurahan Berbas tengah melalui program Kebun Bibit Rakyat (KBR) oleh BPDAS HL Mahakam Berau. Hasil pembinaan yang dilakukan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Berbas Tengah.

Saat ini mangrove yang dikelola oleh Kelompok Tani Nelayan Beras Basah telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kemampuan produksi bibit yang awalnya hanya 20.000 bibit per tahun kini sudah mencapai 300.000 bibit per tahun.

Pembibitan mangrove yang dikembangkan oleh Kelompok tani nelayan Beras basah semakin meningkat, hal ini di buktikan dengan semakin bertambahnya produksi bibit yang di hasilkan serta semakin meningkatnya kesejahteraan anggota dengan penerimaan hasil penjualan bibit yang mereka produksi. Untuk penjualan bibit mangrove bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di Kota Bontang akan tetapi juga memenuhi permintaan dari luar kota, seperti wilayah kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pelestarian mangrove yang baik tidak akan berarti jika masyarakatnya tidak sejahtera. Buah mangrove dapat diolah menjadi aneka produk seperti sirup, coklat mangrove, minuman *ready to drink*, tepung untuk bahan kue atau jajanan coklat. Kondisi ini yang memotivasi Penyuluh

Kehutanan pendamping untuk melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pemanfaatan mangrove selain budidaya mangrove. Kegiatan ini berdampak positif pada peningkatan perilaku dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan mangrove.

Pendampingan KTN Beras Basah oleh penyuluh kehutanan merupakan upaya pelestarian mangrove dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan

penyuluh kehutanan menjadi tindakan nyata dalam menjaga keutuhan ekosistem mangrove sebagai benteng Kota Bontang dari bencana. ●

Ernita Mery Theresia, S.Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan, Badan P2SDM, Kemneterian LHK

Endang Mustinah, S.Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli
Dinas Kehutanan Kalimantan Timur



Kegiatan Pembibitan Mangrove Kelompok Tani Nelayan Beras Basah.

CERITA PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KTH DI KHDTK HUTAN DIKLAT SISIMENI SANAM

"Pendampingan dalam kelola kelembagaan merupakan pondasi dasar dari strategi pengembangan dan pembangunan kelompok tani hutan menuju kelompok tani hutan yang kuat dan mandiri. Strategi yang dipakai dalam menguatkan unsur kelembagaan kelompok tani hutan di KHDTK Hutan Diklat Sisimeni Sanam yaitu: mengidentifikasi *Local Champion*, membangun kesepahaman rencana pendampingan dan arah kelompok kedepan, menguatkan struktur kepengurusan, menyusun AD/ART dan rencana kerja serta rencana usaha keompok secara partisipatif, melengkapi informasi potensi dan kegiatan kelompok, peningkatan SDM serta monitoring dan evaluasi secara partisipatif".



Anggota KTH Paloil Tob, Nekamese dan Fean Bol dalam mengikuti Workshop Keamanan Pangan.

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pelatihan Sisimeni Sanam secara geografis terletak diantara koordinat 09o 56' 54" LS - 10o 02' 22" LS serta 123o 58' 20" BT - 124o 01' 10" BT. Berdasarkan batas administratif, wilayah KHDTK pelatihan Kehutanan Sisimeni Sanam terletak di Kabupaten Kupang, serta masuk dalam wilayah Kecamatan Fatuleu (Desa Eka-

teta, Desa Camplong II, dan Desa Sillu) dan Kecamatan Takari (Desa Benu dan Desa Oesusu). Letak geografis KHDTK yang dikelilingi oleh 5 desa penyangga ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dikelola sehingga dapat menjadikan tantangan tersebut sebagai peluang. Strategi yang diambil dalam menghadapi kondisi tersebut adalah dengan membuat kelompok-kelompok tani

hutan dan bekerjasama dengan mereka dalam pembangunan sektor kehutanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.367/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yaitu untuk Pendidikan dan Pelatihan sehingga Pengelolaannya diserahkan ke Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.

Jumlah KTH saat ini yang telah terbentuk di KHDTK Diklat Kehutanan Sisimeni Sanam adalah sebanyak 5 KTH dengan rincian 3 KTH dalam kelas madya yaitu KTH Paloil Tob (Desa Sillu), KTH Feanbol (Desa Camplong II) dan KTH Nekamese (Desa Ekateta) dan 2 KTH kelas pemula yaitu KTH Tunas Baru (Desa Sillu) dan KTH Tunbanmat (Desa Benu). Dari 5 KTH yang telah terbentuk, pendampingan dan pembinaan yang telah dilakukan secara intensif adalah pada KTH Paloil Tob dengan pembinaan secara utuh mulai dari kelola kelembagaan, kelola kawasan hingga

kelola usaha dengan komoditi utama yang dikembangkan adalah jambu mete. Hal ini dilakukan karena kami ingin menjadikan KTH Paloil Tob menjadi KTH percontohan (*pilot project*) khususnya dalam pendampingan kelompok tani hutan. Sedangkan 4 KTH lainnya yaitu KTH Nekamese, KTH Feanbol, KTH Tunas Baru serta KTH Tunbanmat sedang dalam proses yang sama untuk menuju KTH yang mantap secara kelembagaan, kawasan dan usaha.

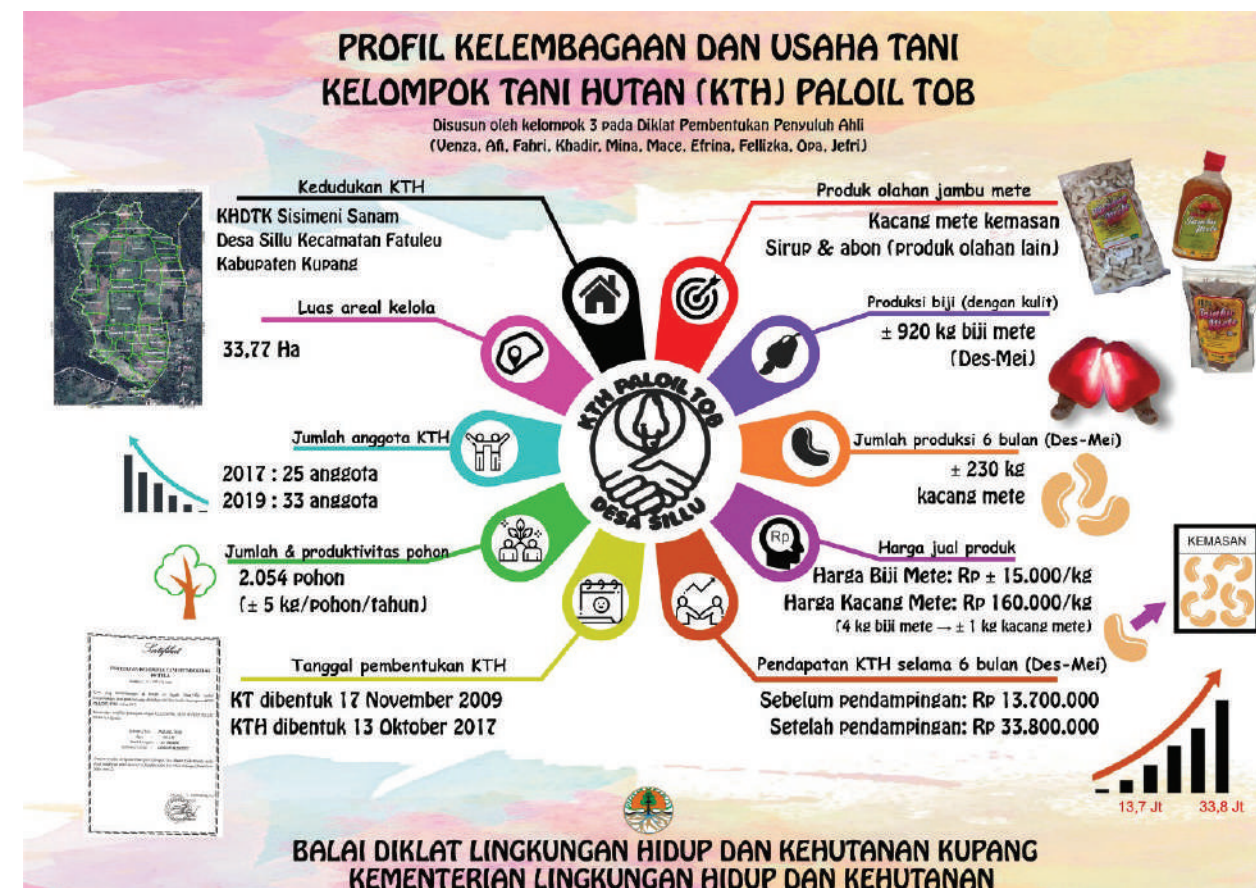
Peningkatan keterlibatan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan kawasan secara partisipatif. Peningkatan keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan KTH dan kemitraan kehutanan. Melalui kelompok tani hutan inilah kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan, bersama dengan itu ketergantungan terhadap kawasan hutan diharapkan akan berkurang dan perbaikan ekonomi rumah

tangga mereka melalui peningkatan nilai jual produk hasil hutan dapat ditingkatkan.

Kegiatan pemberdayaan tidak bisa dilakukan secara parsial, akan tetapi harus memperhatikan beberapa aspek salah satunya adalah keberlanjutan. Kunci penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari kelola lembaga, kelola kawasan dan kelola usaha. Keberadaan pendamping disisi masyarakat membuat pendamping tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat tersebut. Ikatan emosional yang diperoleh dari kegiatan pendampingan diharapkan dapat menumbuhkan kekuatan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Tahapan Pendampingan Kelola Kelembagaan

Kelembagaan merupakan pondasi dasar dari strategi pembangunan kelompok untuk menuju suatu sistem organisasi yang



(SUMBER: PESERTA DIKLAT PEMBENTUKAN PENYULUH KEHUTANAN)

mandiri. Strategi yang dipakai dalam menguatkan unsur kelembagaan kelompok diantaranya :

1. Mengidentifikasi *Local Champion*

Sebagai pendamping sebuah kelompok masyarakat tentunya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, baik itu muncul dari eksternal maupu internal. Apalagi kami sebagai pendamping yang memiliki perbedaan budaya dan bahasa. Proses perubahan PSK (Perilaku, Sikap, Keterampilan) membutuhkan waktu yang cukup panjang. Proses meleburkan diri menyatu dengan budaya masyarakat yang kami dampingi merupakan tantangan yang cukup menarik bagi kami. Salah satu strategi untuk mempercepat proses tersebut adalah dengan mengidentifikasi tokoh-tokoh penggerak lokal (*local champion*). Ketika sudah mendapatkan sosok tersebut langkah-langkah pendampingan akan terasa lebih ringan dan sinergis. Oleh karena itu langkah ini merupakan langkah krusial dalam jalannya proses pendampingan disuatu kelompok masyarakat.

2. Membangun Kesepahaman Rencana Pendampingan dan Arah KTH Kedepan

Setelah mendapatkan tokoh-tokoh penggerak dalam kelompok, langkah selanjutnya adalah membangun kesepahaman tentang tujuan, manfaat dan arah kelompok kedepan. Dalam proses ini butuh kerja keras untuk menanamkan komitmen keseluruhan anggota kelompok untuk dapat bersinergi melangkah bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan melalui penyamaan persepsi dan arah tujuan kelompok kedepan semua anggota dapat ikut serta ambil bagian dalam kemajuan kelompok.

Salah satu tips untuk membangun komunikasi dan motivasi yang telah dilakukan di KTH Paloil Tob adalah membuat yel-yel atau slogan penyemangat yang digunakan pada setiap pertemuan kelompok. Yel-yel tersebut secara tidak langsung telah memberikan semangat positif dan menanamkan motivasi pada setiap anggota untuk berubah menjadi lebih baik.

3. Menguatkan Struktur Kepengurusan Kelompok

Pada tahun 2017 setelah restrukturisasi organisasi KTH sesuai dengan Permenhut Nomor: P.57/Menhut-II/2014 tentang pedoman pembinaan kelompok tani hutan, dipilih pengurus kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi sarana produksi. Karena pengurus belum memahami tugas dan fungsinya, maka dilakukan bimbingan intensif terkait tugas fungsi tersebut. Ketua yang memiliki peran sentral dalam kelompok sudah memiliki jiwa mengayomi anggota yang cukup baik, karena selain menjadi tokoh adat di masyarakat desa beliau merupakan tokoh agama (pendeta) yang sebagian jemaatnya adalah anggota KTH Paloil Tob. Sekretaris dibimbing dalam pencatatan-pencatatan administrasi kelompok seperti buku tamu, buku daftar hadir dan yang paling urgen adalah notulensi setiap pertemuan KTH. Bendahara juga kami bimbing dalam pencatatan dan pelaporan iuran kas kelompok, sedangkan seksi sarana dan produksi dibimbing dalam mendata serta memelihara sarana dan prealatan kelompok.

Kemudian pada tahun 2019 ketika kegiatan usaha kelompok sudah mulai berjalan maka diputuskan untuk menambah satu seksi lagi yang bertugas untuk mengawal kegiatan usaha kelompok. Dibentuknya seksi usaha ini bertujuan untuk menguatkan sistem usaha pemasaran kacang mete kedepan, baik itu dari *quality control*, *marketing*, promosi dan pembukuan.

4. Menyusun AD/ART, Rencana Kerja dan Rencana Usaha KTH secara Partisipatif

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki sebuah organisasi sehingga dapat menjadi rel atau aturan main sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam AD/ART disepakati kriteria anggota, lama kepengurusan, mekanisme rapat anggota, hak dan kewajiban anggota serta sanksi yang diberikan apabila pelanggaran kesepakatan. AD/ART disusun secara partisipatif dengan melibatkan

peran semua anggota dimana prinsip yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan musyawarah.

Setelah aturan main kelompok disepakati, selanjutnya adalah menyusun rencana kerja KTH untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Rencana kerja ini menjadi acuan sekaligus jalan yang akan ditempuh kelompok untuk mencapai tujuan. Rencana kerja disusun secara partisipatif difasilitasi oleh pendamping. Pada tahap awal dalam rencana kerja kami sepakat bahwa yang harus ditingkatkan terlebih dahulu adalah aspek kelembagaan, seperti pertemuan rutin setiap hari rabu, melengkapi buku-buku admintrasi kelompok, mengidentifikasi potensi areal kelola serta penguatan fungsi-fungsi organisasi dalam kelompok. Untuk rencana jangka menengah (3 tahunan) kami sepakat untuk mulai fokus pada kelola kawasan seperti pembuatan demplot, pengkayaan jenis di areal kelola dengan tanaman kemiri serta penanaman di sekitar daerah mata air, sedangkan pada sektor usaha mulai melakukan penguatan kerjasama pemasaran kacang mete dan produk turunannya seperti abon dan sirup mete. Pada rencana jangka panjang (5 tahunan) direncanakan penambahan jenis komoditas atau usaha lainnya seperti budidaya lebah madu serta penanaman porang di bawah tegakan jambu mete.

5. Melengkapi Informasi Potensi dan Kegiatan KTH di Pondok Pertemuan

Selain melengkapi administrasi kelompok dalam bentuk buku-buku administrasi, untuk memberikan informasi yang utuh kepada setiap pengunjung atau tamu yang datang, pada bagian dinding pondok KTH dipasang poster serta infografis yang menjelaskan rencana kerja, areal kelola serta usaha kacang mete yang ada di kelompok. Melalui penyajian data dan informasi terkait aktivitas KTH, harapannya keterbukaan informasi di dalam kelompok akan semakin terbangun dan bagi pihak luar yang datang akan semakin mudah memahami aktivitas yang telah dilakukan oleh KTH. Papan-papan informasi tersebut juga dapat menjadi pengingat bagi pendamping dan anggota terkait infor-



Rapat penyusunan Rencana Kerja KTH Paloil Tob.

masi kelompok. Karena semakin informasi tersebut kita lihat dan baca maka secara tidak langsung alam bawah sadar akan merekamnya.

6. Peningkatan SDM Anggota KTH

Untuk meningkatkan kualitas SDM KTH, setiap tahun minimal 5 orang anggota diikutsertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan LHK Kupang. Jenis diklat disesuaikan dengan potensi serta arah pengembangan kelompok kedepan. Jenis diklat yang pernah diikuti oleh anggota KTH antara lain:

Budidaya Leba Madu, Pembuatan Pupuk Bokasi, Budidaya dan Pengolahan Jambu Mete serta Budidaya Porang. Selain itu anggota KTH juga diikuti bimtek atau pelatihan dari instansi lain seperti Bimtek Keamanan Pangan dan Pemasaran Produk UKM. Dengan mengikutsertakan anggota dalam pelatihan-pelatihan tersebut harapannya wawasan dan keterampilan anggota akan semakin meningkat dan kelompok juga akan semakin maju.

7. Monitoring dan Evaluasi secara Partisipatif

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau bagaimana pelaksanaan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan KTH tetap berjalan sesuai dengan aturan main dan rencana kerja yang sudah dibuat. Pada kelola kelembagaan, KTH harus berkomitmen untuk melakukan koordinasi dan pertemuan rutin membahas kelola kawasan dan kelola usahanya. Kegiatan monitoring dilakukan dengan musyawarah mengidentifikasi kendala dan kegiatan prioritas berdasarkan anggaran dan waktu. Dan dari identifikasi kendala tersebut akan dipilah aspek mana yang bisa diselesaikan langsung pada saat musyawarah monitoring dan mana yang harus di komunikasikan lebih lanjut (biasanya yang berkaitan dengan pihak lain). Contoh hasil dari monitoring antara lain adalah komitmen untuk pertemuan KTH minimal satu bulan sekali, iuran bulanan harus segera diselesaikan dalam kurun waktu 1 bulan setelah monitoring tersebut, pemeliharaan areal kelola anggota (penyiangan dan pendangiran tanaman jambu mete dan kemiri), pengadaan bibit porang untuk pengembangan usaha, mencari mitra swalayan baru dalam pemasaran produk KTH, pengkaderan anggota untuk mendukung kegiatan usaha.

Sedangkan evaluasi yang kami lakukan pada akhir tahun, tujuannya untuk mendapatkan gambaran perbandingan antara rencana kegiatan dan realisasinya dilapangan. Selain mengevaluasi kegiatan KTH, kami juga melakukan penilaian kelas KTH sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor: P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan. Harapannya dengan standar penilaian kelas KTH tersebut kualitas dari KTH binaan kami tetap terjaga dan meningkat sesuai dengan standar kelas yang sudah terpenuhi. ●

Gamal Arya Widagdo, S.Hut.

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian LHK

PENDAMPINGAN KAMPUNG RAMAH LINGKUNGAN "BERANI SEJUK RW 10"

Tinggal di lingkungan perumahan yang bersih dan tertata tentu merupakan idaman setiap orang. Keinginan tersebut telah memotivasi saya untuk melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar. Berawal dari mengajak anak-anak untuk memungut sampah dan mengajarkan kepada warga sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan sampai pada keikutsertaan pada program terbentuknya Kampung Ramah Lingkungan "Berani Sejuk RW 010"



Sebagai warga yang tinggal di RT.04 RW.10 Perumahan Puri Husada Agung, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saya punya harapan dan keinginan agar lingkungan perumahan yang ditinggali selalu bersih dan tertata. Jalan di lingkungan perumahan tempat saya tinggal bersebelahan dengan sungai, tentunya sangat rawan jika tidak dijaga tempat tersebut menjadi kotor penuh dengan sampah.

Upaya yang saya lakukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih adalah dengan mengajak anak-anak RT.04 memungut sampah di sepanjang jalan setiap sebulan sekali. Selain itu saya juga mendorong dan mengajarkan kepada anak-anak dan warga sekitar agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dan membudayakan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ada perasaan bahagia ketika anak-anak sudah mulai terbiasa tidak membiarkan sampah berserakan dan membuang sampah pada tempatnya sudah menjadi budaya.

Program Kampung Ramah Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginisiasi program berskala nasional bernama Program Kampung Iklim (Proklam). Program ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim. Menurut peraturan tersebut Proklam dapat dilaksanakan pada wilayah administrasi



Tempat pengolahan sampah organik sebagai media budidaya magot.

paling bawah setingkat RW dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa. Untuk mendukung program kampung iklim, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mencoba pendekatan pengelolaan lingkungan hidup setingkat RW yang diberi nama Program Kampung Ramah Lingkungan.

Kampung Ramah Lingkungan (KRL) adalah program lokal dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terstruktur dan berkelanjutan untuk menuju program kampung iklim. Gabungan kampung ramah lingkungan diharapkan menjadi Proklam.

KRL terdiri dari empat kategori yakni Pratama, Madya, Utama dan Jawara. Masing-masing kategori memiliki penilaian yang berbeda-beda. Kriteria penilaian

kategori pratama meliputi pengelolaan sampah sudah terkelola dengan baik, sanitasi yang baik, masyarakat melakukan Konservasi dan penataan lingkungan serta partisipasi masyarakat. Kategori madya memiliki kriteria penilaian yang sama dengan kategori muda hanya terdapat tambahan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kategori utama memiliki kriteria penilaian kegiatan KRL Madya yang dijalankan secara konsisten. Selain itu penilaian kategori utama ditentukan oleh dukungan dari KRL lain yang dibuktikan oleh surat keputusan serta adanya dukungan dana, baik dari swadaya maupun pemerintah desa. Sedangkan penilaian kategori Jawara adalah KRL Utama yang konsisten mempertahankan dan mengembangkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. KRL Jawara juga wajib mempunyai 3 KRL yang diutamakan berupa satu dusun atau KRL yang berasal dari RW lain.

Masing-masing kategori memiliki keberlanjutan satu sama lain. Peraih KRL Pratama dapat mengikuti verifikasi KRL madya. Peraih KRL Madya dapat mengikuti verifikasi KRL Utama. Selanjutnya KRL Utama dapat mengikuti penilaian KRL Jawara. Pelaksanaan verifikasi KRL juga dijadikan sebagai wadah edukasi lingkungan kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk perlombaan lingkungan bersih, sehat dan hijau.



Sampah yang dikumpulkan anak-anak.



Membenahi saluran Air, penanaman tepi jalan dan pemanfaatan ban bekas untuk tanaman hias.

KRL “Berani Sejuk RW 10”

Pada Tahun 2020, RW.10 Dusun 7 diusulkan oleh Kepala Desa Cibinong untuk mengikuti program KRL. Saya masuk menjadi salah satu anggota tim yang bertugas membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, khususnya sebagai koordinator pengelolaan sampah.

Langkah awal yang saya lakukan adalah mengajak warga untuk membuat lubang biopori pada masing-masing lingkungan rumah, pemilahan sampah organik dan anorganik, melakukan penanaman di depan rumah berupa tanaman bunga dan apotik hijau, serta membersihkan saluran air.

Atas segala upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat warga RT.10 Dusun 7 Desa Cibinong, pada tahun 2020, RW 10 memperoleh penghargaan KRL Pratama dengan kriteria partisipasi masyarakat. Hal yang mendukung tercapainya KRL Pratama dengan kriteria partisipasi masyarakat adalah adanya usaha budidaya Burung Murai Batu, Lebah Trigona, Ikan Cupang, Bank Sampah dan yang lainnya.

Kemudian pada tahun 2021, KRL RW.10 Dusun 7 diikutsertakan kembali dalam program KRL Madya oleh Pemerintah Desa Cibinong. Pengusulan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cibinong kepada Pemerintah Kabupaten Bogor didasari pada surat tanggal 07 Juni 2021, No. 40/11/IV/2021 Tentang Pembentukan KRL “Berani Sejuk RW 10” di Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten



tasi dari sampah organik yang dicampur dengan gula aren, tebu atau gula merah. *Eco-enzyme* biasa digunakan untuk detox tubuh, mencuci rambut, pembersih udara, mengobati bisul dan luka gores, kumur dan gosok gigi, mencuci pakaian, mengepel lantai, pembersih kompor dan alat dapur dll. *Eco-enzyme* sangat lembut di kulit, berbeda dari efek zat kimia yang biasa terkandung di cairan pembersih. *Eco-enzyme* tidak memiliki masa kadaluarsa sehingga tidak perlu disimpan di kulkas. Jika menginginkan bau *Eco-enzyme* yang lebih segar, bisa ditambahkan kulit jeruk, lemon atau pandan.

Untuk memproduksi pupuk organik padat dan cair, masyarakat RW 10 membuat tempat sampah organik rumah tangga yang juga dapat digunakan sebagai media pembiakan magot. Pupuk organik padat dari sampah organik rumah tangga juga dapat diproduksi dengan menggunakan inovasi lubang biopori. Lubang biopori adalah teknologi sederhana yang tepat guna dan ramah lingkungan. Lubang Resapan Biopori berupa sebuah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Prinsip kerja lubang resapan biopori sangat sederhana. Lubang yang kita buat, kemudian diberi sampah organik yang akan memicu biota tanah seperti cacing dan semut, akar tanaman untuk membuat rongga-rongga (lubang) di dalam tanah yang disebut biopori. Lubang biopori ini mampu meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah sehingga mampu mengurangi resiko banjir akibat meluapnya air hujan. Selain itu, teknologi



Budidaya Ikan Cupang dan Budidaya Lebah Trigona.



Penimbangan sampah.

ini juga mampu meningkatkan jumlah cadangan air di dalam tanah.

Khusus untuk sampah organik yang dihasilkan dari tanaman disekitar rumah dan pekarangan bisa dibuatkan bak sampah sebagai tempat pengolahan sampah untuk dijadikan pupuk organik. Selanjutnya untuk sampah anorganik yang sudah dipilah berdasarkan kategori plastik, kertas dan sebagainya dilakukan penimbangan untuk dijadikan rupiah. Penimbangan sampah anorganik dilakukan oleh Bank Sampah RW.10 (Bank Sampah MAMAKE) setiap

bulan untuk menabung sampah.

Pada tanggal 17 Desember 2021 akhirnya KRL Berani Sejuk RW. 10 berhasil menyandang predikat KRL Madya. Penghargaan berupa piala, sertifikat dan uang pembinaan dari Bupati Bogor diterima langsung oleh ketua KRL yang disaksikan oleh Lurah Cibinong dan pejabat lainnya.

Dampak kegiatan

Apa yang didapatkan oleh masyarakat setelah mendapatkan penghargaan sebagai kampung ramah lingkungan? Secara



Ketua KRL dan pak lurah Cibinong dengan piala, sertifikat dan uang pembinaan.

umum kampung tempat tinggalnya terlihat lebih bersih, terawat, dan rapi. Disamping itu masyarakat dapat mengetahui beberapa potensi lain dalam pemberdayaan pangan, peningkatan ekonomi, pencegahan banjir dan bencana alam. Dalam pengelolaan sampah sudah terdapat bank sampah sebagai wadah bagi masyarakat jika sudah bisa memilah sampah akan mendapatkan uang dari hasil pemilahan sebagai nasabah bank sampah.

Semenjak mendapatkan penghargaan pemenang lomba KRL Madya, tempat tinggal saya sering mendapatkan kunjungan dari warga desa sekitar dan juga mahasiswa, sebagai tempat pembelajaran yang akan diterapkan agar mereka juga bisa mengikuti jejak yang sudah dicapai di KRL Berani Sejuk RW.10.

Rencana selanjutnya dari KRL Berani Sejuk RW 10 akan ikut serta dalam lomba yang akan dilakukan oleh Plt. Bupati Bogor yaitu menuju kampung *Zero Waste*, semoga apa yang menjadi cita-cita, harapan dan semangat warga akan segera terwujud. ●

Dra. Ulfah

Penyuluh Kehutanan Ahli, Pusat Penyuluhan BP2SDM



Partisipasi pada pameran Saba Desa Boling Plt. Bupati Bogor.

KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN, SALAH SATU UPAYA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

Lubuk larangan pada umumnya merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang, pembentukan lubuk larangan juga dilatarbelakangi oleh fakta yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat bahwa kondisi sungai semakin hari semakin memburuk. Lubuk larangan salah satu upaya mereduksi efek perubahan iklim di Indonesia. Keberadaan lubuk larangan memberi dampak positif terhadap pelestarian sumber daya ikan, perekonomian masyarakat, hutan dan lingkungan.



Ilustrasi lubuk larangan berada di Kenagarian Salimpek, Kab. Solok.

Air adalah kebutuhan pokok manusia selain pangan, kebutuhan akan air akan menjadi lebih mahal dari bahan bakar minyak pada masa yang akan datang. Sudah saatnya masyarakat dunia sadar akan pentingnya penyelamatan air secara menyeluruh untuk kebutuhan global. Pada

dasarnya air di bumi tidaklah berkurang dan jumlahnya sama sepanjang tahun, akan tetapi bentuknya yang berubah. Salah satu cara menyelamatkan sumber air bersih adalah dengan menjaga hutan.

Hutan merupakan sumber kehidupan dan penyedia jasa lingkungan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan telah memberikan banyak manfaat bagi manusia, baik mereka yang tinggal di sekitar hutan, maupun yang tinggal jauh dari hutan. Salah satu manfaat fungsi hutan adalah menghasilkan sumber air bersih yang mengalir ke sungai dan air tanah. Tidak hanya sekedar menyediakan air bersih, akan tetapi juga berperan dalam pengendalian erosi dan banjir. Hutan merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan, dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami. Jadi air, sungai dan hutan merupakan tiga serangkai yang tercakup dalam DAS.

Pada daerah Sumatera terutama masyarakat melayu seperti Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan sebagainya terdapat suatu kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) yang sangat melindungi sungai sebagai sumber air dan sumber untuk memenuhi pangan yaitu kearifan lokal “Lubuk Larangan”. Menurut pengertiannya kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. Ciri kearifan tradisional yaitu dinamis, berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat lokal. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Lubuk larangan adalah bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur, dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu, atas dasar kesepakatan bersama. Lubuk larangan pada umumnya merupakan



Menebar benih ikan patin di sungai Nilo, SPTN 1 - LKB.

tradisi turun temurun dari nenek moyang, pembentukan lubuk larangan juga dilatarbelakangi oleh fakta yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat bahwa kondisi sungai semakin hari semakin memburuk. Dengan keberadaan lubuk larangan telah memberi dampak positif terhadap pelestarian sumber daya ikan, perekonomian masyarakat, hutan dan lingkungan. Lubuk larangan salah satu aktualisasi perilaku ekologis masyarakat melayu terhadap ekosistem sungai secara menyeluruh.

Kosmologis Melayu tradisional dalam penentuan suatu peraturan/norma dapat bersumber dari dukun, pawang, guru silat, alim ulama, tokoh adat, ninik mamak, para raja dan sultan serta ulama. Mereka mempunyai peranan masing-masing dalam masalah melestarikan lingkungan hidup. Dari nilai dan ajaran Islam, orang Melayu mengetahui bahwa tiap manusia dikawal atau diawasi oleh malaikat dan memiliki amal jariyah yang pahalanya dunia akhirat yang tidak putus. Dengan adanya kepercayaan membuat tidak ada warga yang berani begitu saja mengambil apalagi merusak flora dan fauna dan tentu melakukan pelestarian guna memperoleh manfaat banyak bagi generasi berikutnya.

Dalam adat istiadat pada masyarakat melayu ditetapkan “pantang larang” yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam mulai dari hutan, tanah,

laut dan selat, tokong dan pulau, suak dan sungai, tasik dan danau, sampai kepada kawasan yang menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun dan sebagainya. Pembagian kawasan pada masyarakat melayu terdiri dari kepemilikan pribadi, kepemilikan suku dan kaum, ada juga yang diperuntukkan bagi masyarakat luas dan sebagainya. Petuah amanah melayu yang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam lingkungan banyak berisi tunjuk ajar pantang larang dan acuan masyarakat agar tidak sampai merusak alamnya, salah satunya kearifan lokal lubuk larangan.

Pada daerah desa yang menerapkan lubuk larangan, warga desa tersebut tidak boleh mengeksploitasi hasil hutan secara berlebihan karena merusak keseimbangan dan ekosistem alam. Hutan jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena hutan satu-satunya sumber penghidupan bagi semua makhluk hidup. Dengan menjaga hutan tentu memberikan efek kepada persediaan air sehingga volume air pada sungai lubuk larangan tetap stabil sepanjang tahun. Hutan memiliki kemampuan sebagai regulator air yaitu mampu mengatur, menyokong proses alami dan menyediakan air bersih. Air bersih merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting bagi lubuk larangan. Selain itu aktivitas

manusia sangat tergantung dengan ketersediaan air bersih, mulai dari mandi, mencuci, pertanian, hingga air minum, semua bersumber dari air bersih yang dihasilkan oleh hutan.

Salah satu provinsi yang telah mengakomodir keberadaan lubuk larangan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan, Pemerintah Sumatera barat telah mengakui nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan di perairan umum daratan dalam bentuk lubuk larangan atau ikan larangan. Lubuk larangan yang berada di Sumatera Barat telah mengenal sistem zonasi, yaitu pembagian lubuk larangan ke dalam beberapa zona sesuai fungsinya, meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan.

Lubuk larangan dikelola dengan mengacu pada seperangkat pranata (nilai-nilai bersama, norma dan sanksi, serta aturan-aturan tertentu) yang ditetapkan bersama melalui musyawarah desa. Proses penegakan aturan lubuk dalam keseluruhan

tahap pengelolaan lubuk larangan akan melibatkan berbagai unsur atau komponen dalam masyarakat, baik Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), aparat desa/ nagari, tokoh masyarakat dan tokoh agama, aparat pemerintah kecamatan (jika diperlukan), dan berada di bawah kontrol semua masyarakat desa. Sanksi terhadap pelanggaran aturan main bisa berupa kewajiban membayar denda, sanksi sosial, dan sanksi hukum. Dalam melaksanakan peraturan terdapat dua komponen penting yaitu kesepakatan antara kelompok anggota masyarakat tentang tingkah laku yang dijalankan atau tidak boleh dijalankan dan mekanisme pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Aktualisasi lubuk larangan dalam kehidupan modern masih bersifat parsial sehingga kurang memberikan efek secara global dalam penyelamatan ekosistem sungai yang berkaitan dengan perubahan iklim. Lubuk larangan versi modern ini sudah menjadi objek wisata yang viral dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan ekosistem sungai terjaga. Beberapa desa yang telah mencoba memodernisasikan sistem lubuk laran-

gan seperti Kampung Mrican-Yogyakarta, Desa Bendungan-Bogor, Desa Pluneng-Klaten, Desa Klodran-Karanganyar, Desa Jajag-Banyuwangi. Lubuk larangan yang dikelola oleh pemerintahan desa tentu akan memberikan dampak yang sangat besar dalam menjaga ekosistem sungai dan eksositem hutan.

Dengan demikian kearifan lokal lubuk larangan sangat mampu membantu pencegahan perubahan iklim “*Climate Changes*”. Mengadaptasikan kearifan lokal lubuk larangan ke lingkungan secara menyeluruh ke setiap desa tentu memberikan efek domino positif terhadap kelestarian hutan, air dan sungai. Dapat kita simpulkan lubuk larangan salah satu cara mereduksi efek perubahan iklim di Indonesia dan dapat diadaptasikan dengan berbagai negara karena kunci dari sungai yang bersih dan volume stabil adalah menjaga kelestarian hutan dan sungai. ●

Darmawan, S.Hut., MIL

PEH Muda BBTN Kerinci Seblat

Fauzan Kahfi, S.Hut., MIL., M.Sc

Penyuluh Kehutanan Muda BTN Tesso Nilo



SUMBER: https://www.merdeka.com/sampul/serunya_lubuk_larangan_tradisi_sungai_kampung_mrican.html

Ilustrasi masyarakat menangkap/memanen ikan air tawar di lubuk larangan.

MAREKISI NUNG: PELESTARI PENYU DI UJUNG TIMUR INDONESIA

“Marekisi Nung memiliki arti sebagai pantai atau pasir tempat munculnya kehidupan baru untuk telur dan tukik penyu. Kelompok Marekisi Nung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Yewena Nomor 03, tanggal 20 April 2021. Kegiatan Kelompok Marekisi Nung ini meliputi pemantauan indukan penyu yang mendarat di pantai untuk bertelur, mengamankan telurnya dan memindahkan ke bak penetasan, dan kemudian setelah menetas dipindahkan ke bak pembesaran. Setelah tukik siap, segera dilepaskan kembali ke alam. Selain kegiatan konservasi, Kelompok Marekisi Nung juga mengembangkan kegiatan ekowisata yang masih terus digarap dan didampingi oleh penyuluh dari BBKSDA Papua. Melalui Kelompok Marekisi Nung kita dapat berharap kelestarian penyu tetap terjaga di Papua dan masyarakat semakin meningkat kesejahteraannya”.

Mengenal Cagar Alam Pegunungan Cycloop yang dikelola Berbasis Resort

Penguatan kawasan Pegunungan Cycloop menjadi Cagar Alam yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 56/Kpts/Um/1/1978 tanggal 26 Januari 1978 tentang Penunjukan Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop dengan luas 22.520 ha dan selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 365/Kpts-II/1987 tanggal 18 November 1987 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop. Seiring perkembangan waktu, kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop mengalami beberapa perubahan kebijakan pengelolaan, salah satunya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012, dimana luas kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop mengalami perubahan menjadi 31.479,89 ha.

Berdasarkan hasil penataan blok yang dilakukan oleh pemangku kawasan yakni Balai Besar KSDA Papua sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.448/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Blok Pengelolaan Cagar Alam Pegunungan Cycloop yang terdiri dari Blok Perlind-



Penyu yang akan bertelur.

ungan dengan luasan 28.758,46 ha, Blok Khusus dengan luasan 109,97 ha dan Blok Rehabilitasi dengan luasan 2.611,47 ha.

Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop (CAPC) dikelola pada tingkat tapak sebanyak 5 resort pengelolaan yang dibagi berdasarkan Dewan Adat Suku (DAS). Pada setiap wilayah resort memiliki karakteristik wilayah geografi, adat istiadat masyarakat

sekitar kawasan CAPC dan endemisas flora serta fauna. Pengelolaan kawasan, perlindungan kawasan dan pelestarian flora fauna pada kawasan CAPC dan sekitarnya menjadi fokus utama kerja di tingkat resort. Pelibatan masyarakat melalui skema pemberdayaan masyarakat adalah upaya terpadu dan terstruktur untuk mendorong masyarakat menjadi pegiat konservasi di wilayah desa atau kampung.



Telur penyu yang akan dipindahkan ke bak penetasan semi alami.

Kampung Yewena, Desa Binaan Marekisi Nung

Kampung Yewena adalah salah satu kampung yang berada di sekitar kawasan konservasi CAPC, dimana sebelah utara berbatasan dengan samudera pasifik dan selatan berbatasan langsung dengan CAPC. Pada daerah pesisir Kampung Yewena merupakan daerah penetasan penyu. Setiap tahun pada musim bertelur penyu-penyu akan datang ke pantai-pantai pada Kampung Yewena untuk bertelur. Pada prakteknya masyarakat Kampung Yewena menjadikan daging dan telur penyu sebagai bahan konsumsi, tetapi sebagian masyarakat juga melakukan kegiatan penetasan telur penyu secara konvensional untuk kemudian dilepaskan kembali ke laut setelah menjadi tukik.

Dalam rangka menjaga dan melestarikan flora fauna khususnya penyu dan menjaga habitatnya maka Kampung Yewena dijadikan salah satu program pemberdayaan kelompok desa binaan yang diharapkan bisa menjaga dan melestarikan penyu, serta menjadi penghasilan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Yewena melalui jasa wisata minat khusus

pelestarian penyu. Selain itu kesadaran masyarakat Kampung Yewena akan nilai konservasi juga akan mendorong untuk menjaga kawasan CAPC.

Berdasarkan hasil identifikasi dalam organisasi sosial atau lembaga masyarakat terkecil di Kampung Yewena adalah Keluarga Inti (*Nuclear Family*). Kampung Yewena terdapat 72 keluarga inti yang diikat dengan adat istiadat yang kuat dan telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengorganisir dirinya untuk melaksanakan hidup. Di atas organisasi sosial keluarga, terdapat juga lembaga marga atau yang oleh orang Tepera disebut suku Keluarga Luas. Ada 5 Keluarga Luas di Kampung Yewena, yaitu suku Indey, suku Ovide, suku Yaroseray, suku Abisay dan terakhir ada juga suku Nusa. Kampung Yewena sebagai salah satu kampung target kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2021 di sekitar kawasan CAPC, karena berdasarkan hasil pengumpulan



Tukik penyu hasil penetasan semi alami di bak pembesaran.

data dan informasi di CAPC, diketahui bahwa kampung tersebut telah memiliki modal sosial yang telah dikembangkan di kehidupan masyarakat lokal didalamnya yang didukung dengan letak geografis Kampung Yewena yang berada pada wilayah penyangga CAPC serta merupakan habitat bagi proses perkembangbiakan penyu sehingga pada Kampung Yewena dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat kelompok pelestarian penyu.

Marekisi Nung memiliki arti sebagai pantai atau pasir tempat munculnya kehidupan baru untuk telur dan tukik penyu. Kelompok Marekisi Nung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Yewena Nomor 03, tanggal 20 April 2021. Jumlah anggota kelompok ini sebanyak 19 orang, dan didampingi oleh 1 orang pendamping dari BBKSDA Papua. Pendamping aktif melakukan diskusi bersama pengurus dan anggota kelompok dimana pada Bulan Juni 2021 telah dilakukan peninjauan lokasi pembuatan bak pembesaran Tukik Penyu. Setelah itu juga dilakukan peninjauan lokasi pendaratan penyu. Selanjutnya persiapan alat dan bahan pembuatan bak pembesaran serta pembangunan bak pembesaran selesai pada bulan Agustus 2021. Pada bulan Desember 2021 peresmian bak pembesaran dihadiri oleh Kepala Balai Besar KSDA Papua, dan Pemerintah Setempat.

Kegiatan kelompok dalam pelestarian penyu

Pada tahun ini kegiatan di Desa Binaan Marekisi Nung, yaitu monitoring dan penetasan telur penyu semi alami. Kegiatan ini meliputi pemantauan induk penyu yang mendarat di pantai untuk bertelur, mengamankan telurnya dan memindahkan ke bak penetasan, setelah menetas dipindahkan ke bak pembesaran dan setelah tukik siap, segera dilepaskan kembali ke alam.

Semakin hari masyarakat bertambah paham bahwa penyu sangat perlu dikonservasi sehingga sudah semakin berkurang masyarakat yang mengkonsumsi daging dan telur penyu. Melalui kegiatan ini masyarakat bisa mengembangkan kegiatan

ekowisata yang masih terus digarap dan didampingi oleh pendamping dari BBKSDA Papua. Kita berharap kelestarian penyu tetap terjaga dan masyarakat semakin meningkat kesejahteraannya. ●

Rima Febria, S. Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Balai Konservasi Sumberdaya Alam Papua,
Kementerian LHK



Anggota kelompok memasukkan telur ke penetasan semi alami dan Siswa SD yang sedang belajar melakukan penetasan semi alami.

PERAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM PENDAMPINGAN KEGIATAN RHL

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka merehabilitasi lahan kritis, melalui upaya penanaman dan pembangunan Bangunan KTA (Konservasi Tanah dan Air). Keberhasilan RHL ini sangat didukung oleh partisipasi masyarakat, karena ukuran keberhasilannya bukan berapa jumlah pohon yang ditanam, tetapi bagaimana pengelolaan oleh masyarakat. Melihat pentingnya RHL yang melibatkan masyarakat, diperlukan adanya sosok yang menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat agar kegiatan RHL berjalan sukses. Penyuluh Kehutanan merupakan sosok yang paling pantas dan mumpuni dalam mendampingi kegiatan RHL.

Tingginya luasan lahan kritis ini disebabkan antara lain perubahan fungsi hutan. Lahan hutan diubah menjadi perumahan dan pembangunan infrastruktur lain, sehingga hutan tidak menjalankan fungsi sebagai penyerap air dan pengatur sistem hidrologi. Selain itu terjadinya perubahan pola tanam dari jenis tanaman berkayu menjadi tanaman semusim serta pola pengelolaan lahan atau pola tanam yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi menambah intensitas penambahan luasan lahan kritis.

Hilangnya kawasan hutan mengakibatkan turunnya daya infiltrasi air ke dalam tanah sehingga meningkatkan erosi. Hal tersebut selanjutnya berdampak pada tingginya sedimentasi sungai, danau dan waduk. Disamping hal tersebut air yang tak meresap ke dalam tanah, menyebabkan kekeringan pada musim kemarau dan banjir dan luapan air pada musim hujan karena sungai, danau dan waduk berkurang potensi menampung air akibat pendangkalan.

Untuk mengurangi luas lahan kritis Kementerian LHK mendorong kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi

hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.



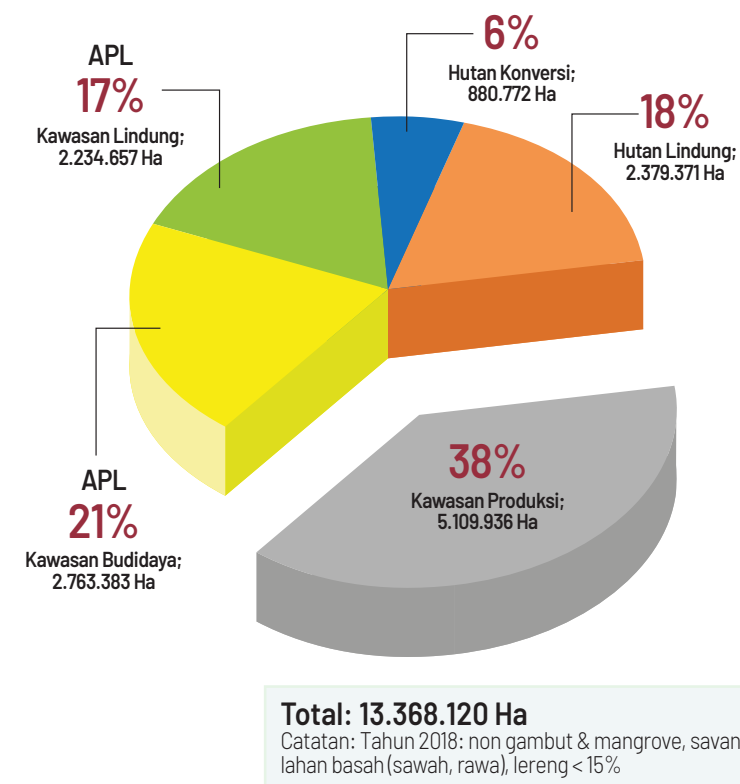
Pembibitan.

Sejarah Kegiatan RHL

RHL telah dimulai sejak 1976 melalui program Pemulihan Hutan Tanaman dan Hutan Alam (PHTA). Saat itu rencana RHL disusun berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan penghijauan dan reboisasi sesuai dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Reboisasi dan Penghijauan.

Menindaklanjuti Inpres tersebut disusunlah Proyek Perencanaan dan Pembinaan Reboisasi dan Penghijauan DAS (P3RPDAS) pada periode 1976-1981. Selanjutnya mulai tahun 1983, RHL menjadi kegiatan prioritas Departemen

LAHAN KRITIS TAHUN 2018



Kehutanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (Ditjen RRL). Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan maka ditunjuklah Petugas Lapangan Reboisasi/Penghijauan (PLR/PLP). PLP dan PLR inilah yang kemudian hari berubah menjadi Penyuluh Kehutanan.

Pada tahun 1995, Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional untuk Memerangi Penggurunan (UNCCD) di Rio de Janeiro, Brazil. Ratifikasi tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI No. 135 Tahun 1998. Selanjutnya Indonesia berkomitmen menurunkan tingkat emisinya (dari semua sektor) pada tahun 2030 sebesar 29 % tanpa bantuan luar negeri, atau 41 % dengan bantuan luar negeri pada gelaran COP *United Nation Framework Convention for Climate Change* (UNFCCC) di Paris pada 2015. Komitmen Indonesia tersebut menguatkan posisi RHL sebagai kegiatan prioritas Kementerian LHK, yang mana diperkirakan Kementerian LHK dapat menurunkan emisi sebesar 17,2 % atau setara 497 juta ton.

Sejak pertama kali dilakukan, kegiatan

RHL tidak hanya melibatkan unsur pemerintah saja melainkan sektor swasta dan masyarakat umum juga dilibatkan. Upaya pelibatan masyarakat juga juga menjadi penanda transisi kegiatan RHL yang semula bersifat *top down* menjadi partisipatif. Pada periode tahun 2000 an, kegiatan RHL dilakukan melalui Program Jejaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, dan Perhutanan Sosial. Selanjutnya beragam bentuk RHL mulai digaungkan seperti Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), One Billion Indonesian Trees (OBIT), Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL).

Tahun 2021 telah dilakukan kegiatan RHL seluas 152.453 Ha melalui Rehabilitasi Hutan (69.960 Ha), Rehabilitasi Lahan (81.111 Ha) dan Rehabilitasi mangrove (1.381 Ha). Upaya rehabilitasi juga dilakukan dengan penerapan teknologi konservasi tanah melalui bangunan konservasi tanah dan air yang dalam pelaksanaannya diarahkan dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima

masyarakat, menggunakan bahan baku alami, terdapat di lokasi serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Bangunan Konservasi tanah dan air yang berhasil dibangun pada tahun 2021 terdiri dari DAM Penahan 391 unit dan Pengendali Jurang (Gully Plug) 1.163 unit.

Melihat pentingnya RHL yang melibatkan masyarakat, diperlukan adanya sosok yang menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat agar kegiatan RHL berjalan sukses. Penyuluh Kehutanan merupakan sosok yang paling pantas dan mumpuni dalam mendampingi kegiatan RHL ini. Oleh karena itu, terbitlah dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan RHL.

PP No. 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan adalah pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Pada bagian lain, disebutkan pendekatan kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi salah satunya menyangkut aspek kelembagaan (meliputi sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing; dan tata hubungan kerja)

Sementara pada BAB V PP No. 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang bertujuan untuk:

- mewujudkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi Hutan.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam hal penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan; dan pendanaan dimana peran ini dapat melalui kegiatan konsultasi publik (dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait rehabilitasi dan Reklamasi Hutan); penyampaian aspirasi; sosialisasi; dan seminar/lokakarya/diskusi.

Adapun menurut Permen LHK No. 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

RHL, pada Pasal 52 disebutkan bahwa kegiatan pendukung RHL dilaksanakan untuk meningkatkan keberhasilannya, diantaranya pengembangan kelembagaan yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya penyuluhan dilaksanakan oleh penyuluh dan/atau penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, melalui kegiatan: (a.) kunjungan lapangan; (b.) ceramah; (c.) pameran; (d.) penyebaran brosur, leaflet dan majalah; (e.) kampanye; (f.) lomba; (g.) demonstrasi; (h.) temu wicara; (i.) diskusi kelompok; dan/atau (j.) karyawisata.

Dari kedua peraturan tersebut, penyuluh kehutanan memiliki peran dalam pendampingan RHL antara lain: 1. Menyampaikan inovasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan kehutanan, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhnya dalam hal ini masyarakat atau kelompok RHL yang didampingi, agar masyarakat tahu, mau dan mampu berperan serta dalam RHL. 2. Sebagai jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga penyuluh dengan masyarakat sasaran, menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah/ lembaga penyuluhan yang bersangkutan. 3. Mendampingi masyarakat dalam memperbaiki mutu hidup dan kesejahteraan melalui peran aktifnya dalam pembangunan kehutanan berupa: Pelatihan kepada masyarakat dan pelaksana kegiatan RHL serta bimbingan teknis/pendampingan pelaksanaan kegiatan RHL.

Dukungan lain yang dapat diberikan Penyuluh dalam kegiatan RHL adalah 1. membantu memberikan informasi dalam penentuan lokasi penanaman di tingkat tapak, 2. membantu monitoring keberhasilan tanaman melalui *geotagging* dan 3. membantu pendistribusian bibit berkualitas (persemaian) dalam mendukung kegiatan RHL.

Tantangan Penyuluh Kehutanan Pendamping RHL

Peran dan dukungan Penyuluh Kehutanan diatas adalah kondisi ideal yang diharapkan guna mensukseskan kegiatan

RHL, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Sejak otonomi daerah, kewenangan, pengaturan dan pembinaan penyuluh kehutanan beralih ke pemerintah daerah. Praktis intensitas dan frekuensi pendidikan dan latihan Penyuluh Kehutanan guna mendukung RHL berkurang. Peningkatan dan pengembangan kapasitas individu Penyuluh Kehutanan stagnan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam berbagai kesempatan berpesan agar Penyuluh Kehutanan bisa berperan optimal untuk mendampingi program Kementerian LHK di tingkat tapak yang melibatkan masyarakat. Agar

dapat mendampingi masyarakat dengan baik tentunya diperlukan pengetahuan dan kemampuan Penyuluh Kehutanan yang memadai. Untuk meningkatkan kapasitas SDM penyuluh kehutanan salah satu kuncinya adalah pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara simultan.

Persoalan pokok dan mendasar lainnya dalam pengembangan penyuluh kehutanan adalah kurangnya jumlah penyuluh kehutanan. Tahun 2016, Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 3.521 orang yang kemudian berkurang menjadi 2.755 pada tahun 2020, dengan 35% Penyuluh Kehutanan



Penyuluh Kehutanan mendampingi kegiatan RHL Sipil Teknis di lapangan.



Ibu Menteri LHK dan peserta Apel Siaga Penyuluh Kehutanan dalam menghadapi Karhutla banjir dan longsor tanggal 15 Juni 2022.

PNS di seluruh Provinsi mendekati usia pensiun. Disamping jumlah, sebaran potensi penyuluh tidak merata dan banyak terpusat di Pulau Jawa. Selain itu jumlah Penyuluh Kehutanan PNS masih jauh dari kata ideal. Hasil penghitungan kebutuhan Penyuluh Kehutanan berdasarkan Permen PAN dan RB No. 27 Tahun 2013 adalah Kebutuhan ± 27.000 orang, Jumlah ini dihitung berdasarkan jumlah kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang berjumlah sekitar ± 5.000 -an.

Selama ini pendampingan kegiatan kehutanan tidak hanya dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan, namun dilakukan juga oleh pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, yayasan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, atau perorangan. Khusus untuk kegiatan RHL seharusnya

pendamping kegiatan diutamakan penyuluh kehutanan. Penyuluh Kehutanan selama ini sudah berpengalaman dalam pendampingan kegiatan teknis kehutanan dan karena pada awalnya rumah Penyuluh Kehutanan adalah di Sub Balai RLKT (Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah). Pelibatan Penyuluh Kehutanan sebagai pendamping RHL dapat diwujudkan dengan menempatkan Penyuluh Kehutanan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.

Sekditjen PDASRH pada Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan tanggal 30 Mei 2022 di Jakarta menyampaikan bahwa pendampingan RHL oleh Penyuluh Kehutanan dapat dilakukan dengan ketentuan satu orang Penyuluh Kehutanan melaku-

kan pendampingan RHL seluas ± 200 -300 Ha. Jika terdapat perbedaan (gap) antara lokasi RHL dengan keberadaan penyuluh kehutanan maka pendampingan dapat memberdayakan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS), Perguruan Tinggi, yayasan, ormas maupun perseorangan. Selanjutnya Ibu Sekditjen menyampaikan juga mengenai Target Kinerja RHL Ditjen PDASRH Tahun 2020 – 2024 yakni:

1. RHL Vegetatif : 1.000.000 Ha
2. RHL Sipil Teknis : 25.000 unit
3. Rehabilitasi Mangrove: 6.250 Ha
4. Bibit berkualitas : 212,5 Juta batang

Dengan adanya target tersebut diharapkan segera ada kebijakan untuk melibatkan Penyuluh Kehutanan dalam pendampingan kegiatan RHL seperti halnya keterlibatan Penyuluh Kehutanan dalam kegiatan Perhutanan Sosial. Dengan pelibatan Penyuluh Kehutanan dalam kegiatan RHL dapat mewujudkan hutan dan lingkungan yang bebas bencana banjir, tanah longsor, kebakaran serta kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sejalan dengan harapan Menteri LHK pada acara Apel Siaga Penyuluh Kehutanan dalam Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir, serta Longsor pada tanggal 15 Juni 2022 di Jakarta. Pada kesempatan tersebut Menteri LHK mengajak Penyuluh Kehutanan di seluruh penjuru tanah air untuk bersama-sama memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan untuk mengantisipasi dan siap siaga terhadap kebakaran hutan dan lahan, banjir serta tanah longsor. Ibu Menteri juga menyampaikan agar Penyuluh melakukan konsolidasi kegiatan penyuluhan kehutanan dengan berbagai elemen di masyarakat dan instansi terkait, tingkatkan terus peran dan upaya memotivasi dan memberdayakan masyarakat. ●

Ir. Rita Marsi

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan, Badan P2SDM, Kementerian LHK

Ir. Hadiyati Utami, MSI

Pengendali Ekosistem Hutan Ahli,
Direktorat Perencanaan dan Pemantauan DAS, Ditjen
PDASRH, Kementerian LHK

"KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI"

Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) merupakan bentuk kerja sama antara Balai TNRAW dengan masyarakat di muara mangrove TNRAW berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Kegiatan ini didasari oleh kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan demi kelangsungan akses pemanfaatan sumberdaya perairan terbatas di sekitar mangrove TNRAW.

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) merupakan salah satu dari 55 taman nasional di Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Taman nasional seluas 1.050 km² ini terletak di Provinsi

Sulawesi Tenggara dengan beragam vegetasi dari hutan mangrove, rawa, sabana sampai hutan hujan tropis. Di kawasan ini, terdapat babi rusa, anoa dan 155 spesies burung 37 diantaranya endemik dan 323 spesies tanaman. Selain sebagai perlindungan bagi spesies-spesies



Nelayan mencari kepiting bakau.



Pondok Singgah Muara Lanowulu.

unik khas Sulawesi, TNRAW menjadi tumpuan hidup bagi 100 ribu jiwa masyarakat yang hidup tersebar di 96 desa di sekitar kawasan yang masuk dalam 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bombana, Kolaka, Konawe dan Konawe Selatan. Sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan konservasi, KLHK mengeluarkan kebijakan tentang kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi adalah kemitraan kehutanan di dalam kawasan konservasi antara kepala unit pengelola kawasan konservasi atau pemegang ijin dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Kemitraan konservasi di TNRAW adalah Kelompok Nelayan Samaturu Desa Lanowulu dan Lembaga Komunitas Mangrove (LKM) yang merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup dengan bergantung pada hutan mangrove di Muara Lanowulu dan Muara Labasi, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Manfaat hutan mangrove bagi masyarakat

Hutan mangrove atau sering disebut hutan bakau merupakan habitat, tempat pemijahan dan perkembangan berbagai jenis ikan dan *crustacean* yang penting secara komersial seperti kepiting rajungan, kepiting bakau, dan udang putih serta tempat mencari makan berbagai jenis burung air seperti aroweli, pecuk

ular, cangkak merah, bangau, belibis dan lain sebagainya. Hutan bakau juga dimanfaatkan oleh beraneka jenis udang laut sebagai tempat memijahkan telurnya. Fungsi ini didukung oleh kondisi lingkungan yang relatif kurang berombak, perairan yang kaya *plankton*, lumut dan sumber pakan. Perakaran bakau yang lebat juga sangat disukai ikan yang ingin meletakkan telurnya karena lebih aman dari gangguan. Tipe tanah merupakan endapan lumpur (*mudflat*) sehingga sangat baik untuk tegakan dari famili *Rhizophoraceae*, seperti *Rhizophora mucronata*, *R. stylosa*, *R. Apiculata*, *Bruguiera gymnorhiza*, *Ceriops tagal*, *C. decandra*, dan *Bruguiera parviflora* serta beberapa jenis dari famili *Combretaceae* seperti *Lumnitzera littorea* dan *L. racemosa*.

Masyarakat menganggap keberadaan hutan mangrove patut untuk dipertahankan kelestariannya karena telah banyak memberikan manfaat bagi mereka. Manfaat hutan mangrove dapat dibedakan menjadi manfaat langsung dan tidak langsung. Dari hasil penelitian tahun 2010, manfaat langsung yang dapat diperoleh dari hutan mangrove adalah kepiting bakau, udang (rebon/balaceng), ikan, kayu/tanaman mangrove, daun mangrove. Kepiting bakau ditangkap dengan menggunakan bubu dan rakkang, ikan ditangkap dengan menggunakan pukat, sedangkan udang atau rebon ditangkap dengan menggunakan pukat dan togo. Kayu atau tanaman mangrove digunakan untuk pembuatan

rumah atau pondok kerja, lanrang (tempat menjemur rumput laut), dan togo. Sedangkan beberapa jenis daun bakau digunakan untuk pengobatan, terutama untuk mengobati sakit perut, penyakit kulit atau luka akibat digigit kepiting. Sedangkan manfaat tidak langsung yang masyarakat rasakan dengan adanya hutan mangrove adalah sebagai penahan angin, penahan gelombang dan pencegah intrusi air laut. Penelitian tahun 2012 menyatakan bahwa, nilai hutan mangrove di TNRAW sebagai pencegah intrusi air laut adalah sebesar Rp. 14,300,700,000,-/tahun. Maksud dari nilai ini adalah bahwa masyarakat yang ada di daerah penyangga TNRAW harus mengeluarkan sejumlah uang senilai Rp. 14,300,700,000,-/tahun untuk mendapatkan air tawar jika hutan mangrove rusak atau sebesar Rp 5,475,000,-/KK/tahun.

Manfaat sumber daya alam hayati hutan mangrove baik langsung maupun tidak langsung ini sangat disadari masyarakat setempat, sehingga mempertahankan keberadaan mangrove merupakan kesadaran bersama untuk menopang perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat.

Kemitraan Konservasi Pengelolaan Zona Tradisional Mangrove

Pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan Balai TNRAW dalam rangka mewujudkan penguatan tata kelola kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati melalui kemitraan konservasi. Kemitraan



SUMBER BALAI TNRAW

Pendampingan dan diskusi dengan masyarakat nelayan Muara Lanowulu.

konservasi dalam bentuk kerja sama antara Balai TNRAW dengan masyarakat di muara mangrove TNRAW berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di Muara Lanowulu dan Muara Labasi menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan demi kelangsungan akses pemanfaatan sumberdaya perairan terbatas di sekitar mangrove TNRAW.

Membangun kemitraan dengan masyarakat merupakan salah satu model pengelolaan yang didorong dalam pengelolaan kawasan. Keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan konservasi harus dipandang sebagai mitra strategis dalam menjaga sumber daya alam, yaitu dengan pola pemanfaatan yang bertanggung jawab. Paradigma pengelolaan kawasan konservasi telah bergeser dengan memposisikan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, air, patroli kawasan, penjagaan kawasan,

restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa.

Balai TNRAW telah menerapkan kemitraan konservasi berdasarkan beberapa peraturan terkait yaitu Permenhut P.85 th 2014 jo. P.44 tahun 2017 tentang Tata cara kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA Kawasan Konservasi, Permenhut P.43 th 2017 tentang Pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dan Perdirjen KSDAE P.6 Th 2018 tentang Juknis Kemitraan Konservasi di KSA & KPA. Hal ini memberikan angin segar bagi masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan konservasi sehingga diharapkan kawasan konservasi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, sebaliknya masyarakat bisa mendukung areal konservasi. Skema ini mewajibkan masyarakat yang diberi akses untuk tetap menjaga kawasan konservasi agar tetap baik sebagaimana fungsinya. menjadi *win-win solutions*. Berkembangnya konsep kemitraan konservasi yang berbasis nilai-nilai pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian (*self reliance*) dalam masyarakat tidak

terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan komunitas bukan hanya merupakan strategi pemberdayaan masyarakat satu arah melainkan memungkinkan pemberi dan penerima terlibat dalam proses yang mencakup perencanaan, pengawasan dan evaluasi.

Kemitraan dengan Lembaga Komunitas Mangrove

Pada tahun 2004 kelompok-kelompok nelayan yang tersebar di beberapa tempat dalam areal Mangrove tersebut telah dikumpulkan dalam satu kelembagaan yang disebut dengan Lembaga Komunitas Mangrove (LKM). Inisiasi pembentukan kelembagaan nelayan tersebut dilakukan bersama antara Balai TNRAW dan *Care International Indonesia South East Sulawesi* (CIISES) atas dasar nota kesepakatan kerjasama kemitraan tentang pengembangan sistem pengelolaan SDA berbasis masyarakat di TNRAW dan daerah sekitarnya.

Keberadaan kelembagaan nelayan ini diharapkan dapat lebih memperkuat peran masyarakat khususnya para nelayan yang memanfaatkan SDA mangrove dalam pe-

ngelolaan Mangrove di TNRAW. Pada sisi lain dengan terbentuknya LKM sebagai wadah yang menghimpun para nelayan yang melakukan aktivitas pemanfaatan SDA kawasan TNRAW dipandang akan lebih memudahkan dan mengefektifkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang.

Aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam mangrove oleh masyarakat sekitar tergolong tinggi. Mereka berasal dari beberapa tempat di wilayah pesisir antara Kec. Tinanggea kec. Rarowatu hingga Kec. Rumbia. Masyarakat yang memanfaatkan SDA mangrove di TNRAW ini secara umum terbagi dalam dua kelompok besar berdasarkan wilayah administrasi dimana mereka berasal, yaitu masyarakat yang berasal dari wilayah Kec. Tinanggea dan masyarakat yang berasal dari wilayah Kec. Rarowatu dan Kasipute. Masyarakat yang berasal dari wilayah Kec. Tinanggea memanfaatkan areal mulai dari Sungai Roraya hingga Sungai Lanowulu. Sedangkan masyarakat yang berasal dari Kec.

Rarowatu dan Kasipute menempati areal antara Sungai Jawi-jawi hingga Sungai Langkowala.

Mangrove TNRAW memiliki posisi dan peran penting bagi perekonomian masyarakat. Mangrove menghasilkan berbagai komoditi yang bernilai ekonomi dan menjadi sumber penghasilan masyarakat khususnya nelayan tradisional. Melihat besarnya manfaat hutan mang-

rove, maka masyarakat bersama-sama dengan Lembaga Komunitas Mangrove (LKM) membuat beberapa peraturan bersama terkait pemanfaatan hutan mangrove yaitu sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada penebangan kayu bakau (istilah untuk mangrove) untuk diperjual belikan. Kayu bakau hanya boleh ditebang untuk pembuatan pondok kerja, togo, lanrang serta ajir rumput laut, tetapi



SUMBER BALAI TNRAW

Nelayan muara Lanowulu sedang membuat pukat.



SUMBER BALAI TNRAW

Kelompok nelayan Samaturu yang mendapat bantuan alat tangkap kepiting.



SUMBER BALAI TNRAW

Balaceng (rebon) atau udang kering yang sedang dijemur, salah satu sumber penghasilan masyarakat dari mangrove.

tidak boleh diperjualbelikan.

2. Yang boleh melakukan pengambilan kayu bakau hanya masyarakat yang tinggal di sekitar muara sungai tersebut, pendatang tidak diperbolehkan melakukan penebangan kayu bakau.

3. Adanya pembatasan jumlah pendatang baru yang akan bermukim di muara sungai, karena semakin banyak jumlah pendatang akan mengakibatkan semakin banyaknya kayu bakau yang akan ditebang untuk pembuatan rumah dan mengakibatkan persaingan dalam mencari ikan/udang/kepiting.

4. Adanya budaya mattanneng bakko, yaitu kegiatan penanaman bakau di sela-sela kegiatan mencari udang/kepiting dan dilokasi yang telah rusak akibat *illegal cutting* (Tepu, 2006).

5. Adanya pembatasan jumlah togo untuk menjaga agar ikan/udang kecil tidak semakin cepat habis akibat banyaknya pemasangan togo.

Kearifan lokal tersebut telah lama diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove. Karena jika hutan mangrove tersebut rusak, maka sedikit atau banyak akan sangat mempengaruhi penghasilan yang akan mereka peroleh nantinya.

Pola kemitraan konservasi di wilayah mangrove utamanya pada Zona Tradisional TNRAW yang digagas semenjak tahun 2004 dengan Lembaga Komunitas Mangrove (LKM), sudah ada sebelum Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan oleh Direktur terbatas Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Kemitraan konservasi ini memberikan akses kepada masyarakat muara agar dapat melakukan kegiatan pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Kegiatan kemitraan yang telah dilaksanakan meliputi penandatangan MoU atau Nota Kesepahaman, lokakarya membangun kesepahaman, peningkatan kapasitas kelompok dan pemberian bantuan.

Kemitraan atau kolaborasi dengan LKM tentang pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove di kawasan TNRAW sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No: PKS.01/BTNRAW-1/2012 tanggal 11 Januari 2012 terbangun selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada awal tahun

2017. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan selama kolaborasi tersebut diantaranya patroli rutin bersama, pengadaan sarana dan prasarana (sekretariat dan perahu), pengamanan kawasan dari gangguan masyarakat bukan anggota LKM, rehabilitasi kawasan mangrove, pengembangan obyek wisata (budaya, mancing, kuliner, jasa transportasi, pondok wisata, pengamatan satwa), pengaturan pemanfaatan SDA mangrove, penegasan batas pondok singgah, penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan SDA perairan terbatas, penguatan kelembagaan, peningkatan SDM masyarakat mangrove, pemberian tanda pengenalan anggota LKM.

Kemitraan dengan Desa Lanowulu

Tahun 2018 pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi di muara Lanowulu kembali dilakukan kepada kelompok nelayan Muara Lanowulu sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai TNRAW Nomor: SK. 46/T.22/TU/KSDAE/04/2018 melalui pemanfaatan sumberdaya perairan terbatas di zona tradisional berupa udang putih, ikan, kepiting hitam, rumput laut,

kepiting rajungan, udang rebon, siput dan kerang-kerangan yang tidak dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku. Areal pemanfaatan tersebut berada di zona tradisional Blok Hutan Mangrove Muara Lanowulu seluas ±450 Ha. Lokasi pemanfaatan sumber daya perairan terbatas di zona tradisional dimaksud sesuai dengan dokumen zonasi Balai TNRAW Nomor: SK. 343/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Zonasi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

Kemitraan konservasi di TNRAW di Blok Hutan Muara Lanowulu telah ditan-datangani bersama sebagaimana Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor PKS.01/T.22/TU/KSA/3/2018 dan Nomor: 08/LKM/PKS/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Kemitraan Konservasi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Terbatas di Zona Tradisional Blok Hutan Muara Lanowulu TNRAW. Tujuan PKS yaitu pemanfaatan SDA perairan terbatas secara lestari di zona tradisional mangrove muara lanowulu dalam Kawasan TNRAW untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat lokal masyarakat sekitar muara lanowulu serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan,

pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Pada Tahun 2018 Balai TNRAW memberikan bantuan pada masyarakat Muara Lanowulu berupa pengadaan perahu dan alat tangkap dalam rangka kemitraan konservasi pada zona tradisional mangrove untuk pemanfaatan sumberdaya perairan terbatas oleh Kelompok Masyarakat Nelayan Muara Lanowulu. Hasilnya setelah dilakukan evaluasi penerimaan bantuan tersebut, didapatkan bahwa para nelayan di Muara Lanowulu dapat menghasilkan tangkapan udang dari yang tadinya sekitar 6-9 kg/hari menjadi 9-15 kg/hari, sedangkan perahu digunakan oleh kelompok yang diatur secara bergiliran termasuk didalamnya untuk pemakaian secara bersama-sama dalam rangka patroli pengamanan di hutan mangrove bersama dengan personil dari Resort Lanowulu. Perahu tersebut juga digunakan membawa hasil tangkapan kelompok berupa udang, ikan, kepiting, kerang, rumput laut dan juga udang rebon kering dalam satu waktu karena kapasitas angkutnya yang besar mencapai 1 ton sehingga tidak perlu lagi kelompok tersebut mengirim hasil tangkapannya menggunakan perahu kecil yang tentunya menghemat waktu,

tenaga dan biaya.

Kerjasama kemitraan konservasi pemanfaatan zona tradisional mangrove dalam rangka pemanfaatan kepiting bakau di tahun 2019 juga dilakukan dengan masyarakat Desa Lanowulu Kelompok Nelayan Samaturu yang beranggotakan 25 orang dengan luas areal pemanfaatan sebesar 150 ha yang diperkuat dengan PKS Nomor PKS.30/T.22/TU-1/KSA/6/2019 tanggal 24 Juni 2019. Sedangkan untuk Desa Lantari Kelompok Sahaka Jaya yang beranggotakan 19 orang dengan luas areal pemanfaatan sebesar 150 ha yang diperkuat dengan PKS Nomor PKS.31/T.22/TU-1/KSA/6/2019 tanggal 25 Juni 2019.

Dengan adanya kemitraan konservasi ini maka diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan kawasan hutan TNRAW lestari. ●

Bernadus Agus Hartanto, S.Hut, M.Ling

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,
Kementerian LHK

Hardani, S.Hut, M.Sc

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan BP2SDM, Kemneterian LHK



SUMBER BALAI TNRAW

nyuluh Kehutanan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menuturkan pengalamannya pada kegiatan terkait dengan Karhutla. Hampir setiap tahun Yayasan yang wilayah kerja sebelumnya di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan selalu terlibat dalam kegiatan pengendalian karhutla. Bersama instansi terkait, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), kelompok-kelompok masyarakat dan relawan lainnya terkadang harus bekerja siang dan malam sampai dini hari untuk memadamkan api yang melahap kawasan hutan dan lahan masyarakat. Dibutuhkan stamina dan pengetahuan serta strategi dalam memadamkan api. Arah angin menjadi salah faktor pertimbangan yang harus diperhatikan sehingga keselamatan diri menjadi pertimbangan utama pada kegiatan pemadaman api. Secara swadaya dan mandiri, juga membentuk Tim Peduli

Api bersama masyarakat dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Lain lagi cerita pasangan suami istri, Lukmanul Hakim, S.Hut, M.I.L dan Nisa Syachera Febrianti, S.Hut yang juga Penyuluh Kehutanan di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam kegiatan karhutla. Sebelum pasangan Penyuluh Kehutanan ini menceritakan pengalamannya dalam pengendalian karhutla, Didik Sujianto, SH, MH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai TNGC menyampaikan bahwa Balai TNGC menerapkan resort tematik dalam pengelolaan TNGC, yaitu Resort Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Resort Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dan Resort Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (SK Kepala Balai TNGC Nomor SK.74/BTNGC/2016 tanggal 27 April 2016). Masing-masing resort dikoordinir oleh pejabat fungsional sesuai dengan tugas pokoknya. Resort

Perlindungan dan Pengamanan Hutan dikoordinir oleh pejabat fungsional Polisi Kehutanan, Resort Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem oleh pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Resort Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam oleh pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan. Penyuluh Kehutanan yang ditunjuk sebagai Kepala Resort Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam adalah Gandi Mulyawan, S.Hut. Dalam kegiatan pengendalian karhutla di Kawasan TNGC, Didik Sujianto mengutarakan bahwa seluruh personil dan SDM yang ada di Balai TNGC dilibatkan dan dikerahkan secara bergantian. Ada yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ada yang mengurus logistik, tim operasi pemadaman dan tim penanganan pasca kebakaran. Memasuki musim kemarau, Nisa Syachera Febrianti, S.Hut, Penyuluh Ke-



(SUMBER: YAYAT HIDRAT, PK CDK WILAYAH VIII DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT)

Penyuluh Kehutanan Bersama Aparat Desa Pasawahan, Camat Pasawahan dan Dandim Kuningan Koordinasi Lapangan Pengendalian Kebakaran Hutan.



DOKUMEN BERASTI

Penyuluh Kehutanan Lukmanul Hakim, S.Hut, MIL dan Nisa Syachera Febrianti, S.Hut menceritakan Pengalamannya dalam Pengendalian Karhutla di Kawasan TN Gunung Ciremai.

hutan di Balai TNGC dan Penyuluh Kehutanan lainnya semakin intensif dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang karhutla. Pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Nisa ditunjuk sebagai personil yang menyiapkan logistik (makanan dan minuman) bagi personil yang bertugas memadamkan api. Logistik yang harus disiapkan tidak hanya terbatas pada personil dari Balai TNGC saja tetapi bagi personil yang berasal dari instansi terkait, kelompok-kelompok masyarakat dan relawan lainnya. Bisa dibayangkan berapa banyak biaya dan logistik yang harus disiapkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla jika karhutla yang terjadi pada areal yang luas, tersebar di beberapa lokasi dan membutuhkan waktu

yang cukup lama. Lukmanul Hakim menuturkan pengalamannya yang harus siaga 24 jam dan bermalam di sekitar lokasi kebakaran Kawasan hutan TNGC. Api yang telah dipadamkan terkadang menyala lagi membakar kawasan hutan. Hal ini bisa terjadi karena api yang padam hanya dipermukaannya saja sementara api dibawah permukaan tidak terlihat. Pemadaman api menggunakan *jet shooter*, mesin pompa dan peralatan manual sederhana lainnya dengan melibatkan instansi terkait seperti TNI, POLRI, kelompok-kelompok masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), Kelompok Tani Hutan (KTH) dan relawan lainnya. Pemadaman api terkadang hanya menggunakan peralatan seadanya.

Kecintaannya pada Kawasan TNGC sebagai Kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati dan suplai air bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, Majalengka, Indramayu dan Cirebon memotivasi Lukman dan Penyuluh Kehutanan lainnya (Gandi Mulyawan dan Yusuf Gunawan) untuk berjiwa memadamkan api. Semoga Penyuluh Kehutanan selalu menunjukkan kiprah dan karya nyata dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. ●

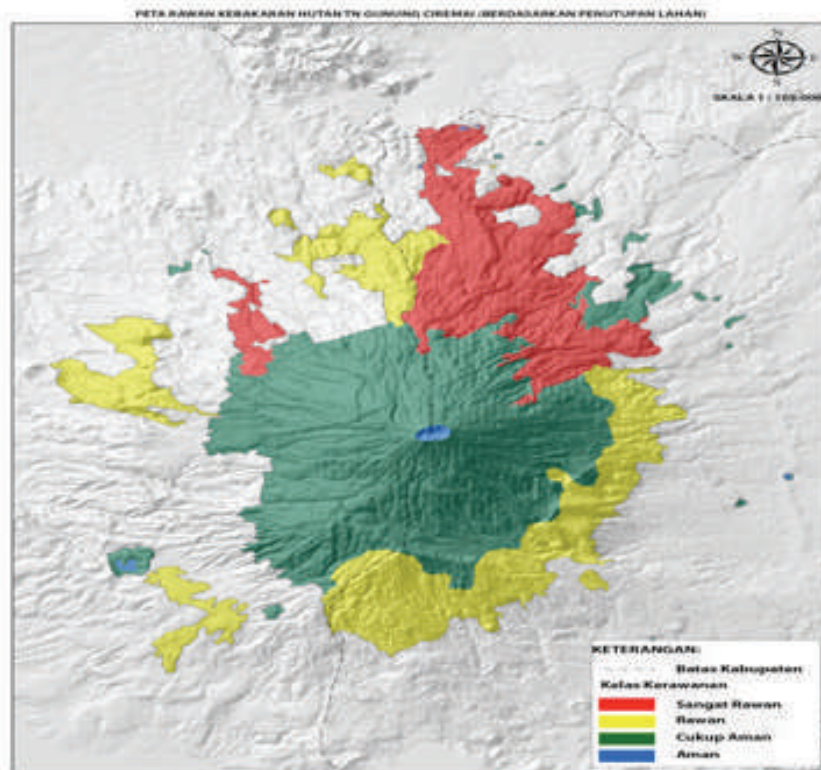
Dr. Hendro Asmoro, SST, MSI

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Pusat Penyuluhan BP2SDM, Kemneterian LHK

PENYULUH KEHUTANAN PADAMKAN API DI AREAL KEBAKARAN HUTAN TAMAN NASIONA GUNUNG CIREMAI

Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan TNGC dari kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya dilakukan oleh Polisi Kehutanan namun juga oleh Penyuluh Kehutanan. Penyuluh Kehutanan berperan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penyuluhan, sosialisasi, patroli pengamanan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) ditunjuk menjadi kawasan taman nasional sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2004 pada tanggal 19 Oktober 2004. Kemudian tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3684/Menhut- VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dengan luas $\pm 14.841,3$ (empat belas ribu delapan ratus empat puluh satu koma tiga) hektar yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Salah satu gangguan terhadap kawasan TNGC yang kerap terjadi setiap musim kemarau adalah kebakaran hutan dan lahan. Luas areal TNGC yang rawan kebakaran hutan hampir $1/3$ (± 4.000 Ha) dari luas keseluruhan wilayah TNGC. Daerah rawan kebakaran hutan TNGC berada di lereng sebelah utara Gunung Ciremai. Untuk Kuningan berada di wilayah (Pasawahan, Mandirancan dan Cilimus). Untuk Majalengka berada di wilayah (Sindangwangi, Rajagaluh dan Argapura). Ekosistem wilayah utara didominasi oleh semak belukar, ilalang dan bebatuan sehingga mudah terbakar ketika tersulut. Kondisi angin yang cukup kencang dan panas terik juga menjadi salah satu faktor meluasnya kebakaran hutan dan lahan.



Peta Rawan Kebakaran Hutan TN Gunung Ciremai.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan oleh Balai TNGC termasuk oleh Penyuluh Kehutanan difokuskan melalui kegiatan preventif yaitu pencegahan diantaranya penyuluhan dan sosialisasi, koordinasi dengan para pihak melalui rapat koordinasi, patroli pengamanan, pembuatan sekat bakar

dan pembuatan embung air. Penyuluhan dan sosialisasi biasanya dilakukan pada lokasi-lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan dengan sasaran masyarakat desa penyangga dan kelompok pengelola wisata alam yang juga dijadikan informan apabila menemukan titik api di dalam kawasan TNGC. Kawasan TNGC dikelilingi 54 desa

penyangga yang berbatasan langsung dengan tanah milik masyarakat.

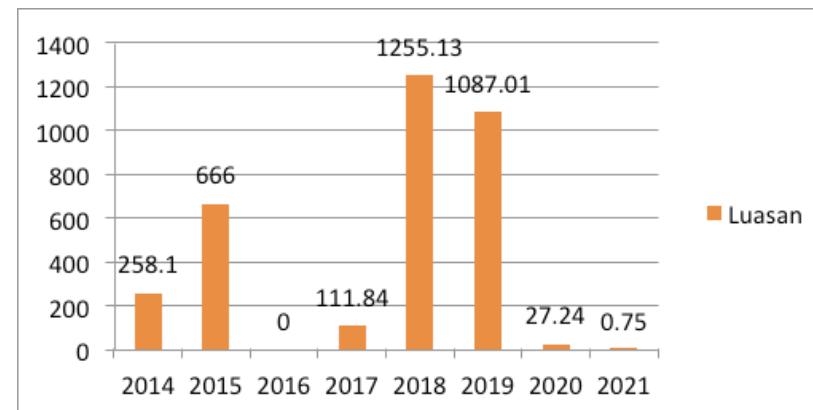
Gambaran kejadian kebakaran hutan selama periode 7 tahun terakhir (2014-2021) hampir terjadi setiap tahunnya kecuali tahun 2016 karena wilayah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan mengalami kemarau basah.

Gambar 2 menunjukkan bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan yang paling luas yaitu pada tahun 2018 dan 2019 dengan luasan 1.255,13 ha dan 1.087,01 ha. Kejadian kebakaran hutan dan lahan paling kecil pada tahun 2021 dengan luasan 0,75 ha. Pada tahun 2018 luas kebakaran hutan di SPTN Wilayah I Kuningan mendominasi dengan luas 1.200 Ha. Pada tahun 2019 luas kebakaran hutan di wilayah SPTN Wilayah II Majalengka mendominasi dengan luas 900 Ha.

Salah satu strategi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNGC adalah *Fire Care Camp*. *Fire Care Camp* adalah program pelestarian hutan yang diutamakan pada upaya pencegahan dari kebakaran hutan dan pemulihan ekosistem, yang dilaksanakan di lokasi rawan kebakaran hutan dalam bentuk perkemahan (*Camp*). Kegiatan tersebut terdiri dari atraksi pencegahan kebakaran hutan, ekowisata, pendidikan lingkungan dan restorasi kawasan, dengan melibatkan peran aktif masyarakat luas sebagai peserta dan kontributor dana untuk kegiatannya.

Sejak di luncurkan pada bulan Juli 2016, program *Camp Fire Care* ini mendapat respon yang sangat positif dan simpati dari kalangan masyarakat, pengusaha, pencinta alam dan para pengiat di alam bebas, sehingga ancaman kebakaran hutan yang sebelumnya dianggap sebagai masalah lambat laun sudah dapat diubah menjadi berkah karena dapat menyerap tenaga kerja dan memunculkan nilai ekonomi swadaya untuk pemulihan ekosistem dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kegiatan *Camp Fire Care* ini pada tahun 2016 telah dikunjungi peserta sekitar 1.250 orang dan memunculkan nilai ekonomi baru untuk masyarakat, sehingga menghasilkan pendapatan bruto sebesar Rp. 125.000.000,- untuk mitra pengelola dengan nilai ekonomi *multiplayer effect*



Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di TNG tahun 2014-2021.



Persiapan tim sebelum melakukan pemadaman kebakaran hutan di TN Gunung Ciremai.

sebesar Rp 690.000.000,. Sementara tahun 2017 dikunjungi peserta sekitar 800 orang dan menghasilkan nilai ekonomi pendapatan bruto sebesar Rp. 80.000.000,- untuk mitra pengelola dengan nilai ekonomi *multiplier effect* sebesar Rp. 441.600.000,-.

Selain itu program kegiatan *Camp Fire Care* ini telah memberikan kontribusi, sehingga pada tahun 2016 kawasan TNGC terantisipasi dari kejadian kebakaran hutan, yang pada tahun 2015 terdapat pengeluaran biaya pemadaman kebakaran hutan sebesar Rp. 83.763.000,-. Hal ini menjadi suatu nilai ekonomi tersendiri berupa "*nilai substitusi*" dilihat dari efisiensi biaya perlindungan dan pengamanan hutan dari pemadaman kebakaran hutan.

Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan TNGC dari kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya dilakukan oleh

Polisi Kehutanan namun juga oleh jabatan fungsional lainnya, salah satunya adalah penyuluh kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada kegiatan apel siaga kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir dan longsor yang dihadiri penyuluh kehutanan se-Indonesia secara virtual dan faktual pada tanggal 15 Juni 2022 juga menginstruksikan kepada penyuluh kehutanan untuk ikut serta mengambil peran dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir dan longsor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyuluh Kehutanan Balai TNGC mengambil peran dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui penyuluhan dan sosialisasi berkaitan dengan fungsi dan manfaat pengelolaan kawasan TNGC bagi keberlangsungan masyarakat pe-



Penyuluh Kehutanan turut serta memadamkan api di lokasi terjadinya kebakaran hutan di TN Gunung Ciremai.

nyangga, bahaya kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNGC dan sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku. Penyuluh Kehutanan juga mengambil peran dalam patroli pengamanan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Di tahun 2022 ini, kawasan TNGC telah mengalami 5 kejadian kebakaran hutan dan lahan yaitu pada tanggal 1 September 2022, 25 s.d 28 September 2022 dengan total luasan 138,34 ha pada lokasi Blok Batu Luhur, Kupak Leles, Pejaten, Cileutik, 1001 Manguntapa, Erpah dan Situmpuk, Gibuk (SPTN Wilayah I Kuningan) dan Guling Munding (SPTN Wilayah II Majalengka). Penyuluh Kehutanan TNGC berjumlah 4 orang juga ikut memadamkan api dan patroli pengamanan. Titik api pada tanggal 1 September 2022, diketahui pukul 16.00 WIB dan dapat dipadamkan pada pukul 21.30 WIB. Titik api pada tanggal 25 September 2022, diketahui pukul 14.00 WIB dan dapat dipadamkan pada pukul 01.00 WIB hari berikutnya. Titik api pada tanggal 26 September 2022, diketahui pukul 11.13 WIB dan dapat dipadamkan pada pukul 01.08 WIB hari berikutnya. Titik api pada tanggal 27 September 2022, diketahui

pukul 08.00 WIB dan dapat dipadamkan pada pukul 21.07 WIB. Titik api pada tanggal 28 September 2022, diketahui pukul 08.19 WIB dan dapat dipadamkan pada pukul 21.00 WIB.

Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini sudah dipastikan faktor manusia. Sengaja atau tidak atau ada motif tertentu sedang dalam penyelidikan Polisi Kehutanan TNGC bersama dengan penegak hukum. Tidak hanya kerugian materi, waktu dan tenaga, namun yang paling penting adalah menurunnya fungsi ekologi kawasan TNGC sebagai penyedia air masyarakat Kabupaten Kuningan, Majalengka, Indramayu dan Cirebon. Kesulitan dalam melakukan pemadaman api di lokasi rawan kebakaran TNGC adalah terjalnya lokasi yang tidak memungkinkan untuk dilalui, semak belukar dan ilalang yang cukup tinggi, akses jalan yang sulit, dan sarana prasarana yang masih minim seperti gepyok dan jet shooter. Antisipasi TNGC dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan menerapkan piket patroli pengamanan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan pada titik-titik rawan untuk mendeteksi dini apabila terjadi kebakaran

hutan dan lahan serta mengawasi apabila ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan.

Semoga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada Bulan September 2022 menjadi muhasabah diri baik manajemen TNGC maupun para pihak. Kita sama-sama berharap ke depan tidak ada lagi kejadian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNGC. Doakan ya Sobat Ciremai. ●

Nisa Syachera F, S. Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Balai Taman Nasional Gunung Ciremai

Lukmanul Hakim, S. Hut, MII

Penyuluh Kehutanan Ahli,
Balai Taman Nasional Gunung Ciremai

WIRACARITA DI BUMI WELAHAN

HUTAN LESTARI, MASYARAKAT MUKTI

Bermula dari sempitnya kepemilikan lahan yang menjadi tumpuan hidup Sebagian besar masyarakat Welahan, Srikandi, salah satu KWT yang juga KTH di Kabupaten Wonosobo ini mencoba mencari peluang mengembangkan usaha produktif selain wanatani yang sejak 2016 menjadi andalan. Beragam usaha produktif kehutanan berhasil meningkatkan taraf hidup kelompok dan masyarakat sekitar. Keberhasilan tersebut memerlukan waktu dan upaya dari berbagai pihak, selain dari KTH itu sendiri. Peran penyuluh kehutanan pendamping serta kepemimpinan kelompok menjadi kunci sukses eksistensi Srikandi hingga saat ini.



Srikandi dan Wanatani

Filsuf Tiongkok, Lao Tzu menuturkan seuntai kalimat bijak: *Perjalanan seribu mil selalu dimulai dengan langkah pertama*. Di zaman digital kini, pendiri Apple Inc. Steve Jobs seakan merunut kembali kebiasaan kuno dari sekitar 570 SM itu. Dalam paparan *'Connecting the Dots'* [Menautkan Titik-titik] di Stanford University pada 2005, Jobs merefleksikan kembali kisah hidupnya. Jika saja tak pernah putus sekolah—*drop out*, dia tak akan pernah belajar seni. Jika tak belajar seni, tak akan pernah





Kegiatan dan Pertemuan Rutin Srikandi.

ada tampilan komputer maupun telepon genggam Apple yang indah. ‘Menautkan Titik-titik’ adalah langkah-langkah sederhana Jobs sebelum menggapai puncak karirnya. Lao Tzu dan Steve Jobs berbeda dalam ungkapan, namun hakikatnya sama.

Manakala merenungkan kiprah Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Srikandi, pesan kedua anak manusia kembali bergema. Himpunan yang awalnya diinisiasi kaum hawa di Welahan, Wonoroto, Watumalang, Wono-sobo, Jawa Tengah, kini menapaki dinamika kelompok yang patut direnungkan bersama. Sebelum menggenggam capaian, Srikandi menempuh proses yang penuh petualangan. Kelompok ini menghadapi berbagai tantangan dalam meneguhkan pikiran dan bertahan dalam jerih payah. Pilihan langkah dan strategi telah mengantarkan Srikandi menjadi kelompok masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Srikandi adalah titik balik bagi Welahan. Momen itu terjadi saat Srikandi merasakan manfaat wanatani (*agroforestry*) yang digulirkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo pada 2016. Sejak itu, Welahan menempuh jalan yang berbeda. Kendati lahan miliknya sempit, sistem wanatani melambungkan optimisme warga Welahan dalam menyongsong masa depan. Sekitar 63 persen penduduk Welahan adalah

petani dengan lahan milik hanya berkisar 0,1 sampai 0,4 hektare per keluarga. Bisa dibayangkan, hanya lahan milik sesempit itu yang menjadi tumpuan warga Welahan.

Sebelum 2016, sebagian besar lahan berupa kebun campuran, tegakan pohon belum optimal hasilnya, tanaman buah masih jarang. Selain itu, upaya sipil teknis belum ada, trucuk bambu atau bangunan terjunan, dan teras kurang sempurna. Hasil dari mengolah lahan tak jarang hanya cukup untuk menutup hutang biaya produksi seperti pupuk, benih, dan modal kerja lainnya. Karena itu, tantangan terbesar Srikandi adalah mencari kesempatan memperoleh pendapatan di luar sektor yang sudah ada.

Setelah mengenal wanatani, masyarakat bergerak merehabilitasi lahan dengan tanaman penguat teras: rumput dan kaliandra merah. Dari tanaman ini, warga memperoleh pakan bagi ternaknya. Masyarakat juga memperkaya lahan dengan aneka macam tanaman. Alhasil, tercipta diversifikasi di atas lahannya yang terbatas. Ada madu, ada makanan olahan dari tanaman bawah tegakan, buah-buahan, batik *ecoprint* dan penjualan *serbetan* kayu. Itu contoh-contoh pendapatan tambahan dari pengelolaan lahan dengan wanatani. Pendek kata, diversifikasi tanaman menumbuhkan aneka usaha yang memberikan cuan tambahan. Jika satu usaha gagal,

masih ada hasil dari sumber lain—musiman maupun tahunan. Bagaimana manajer investasi profesional dalam mengelola portofolio saham, warga wanatani melakukan diversifikasi usaha. Ibaratnya, pewanatani tidak menaruh semua telur di keranjang yang sama: bila satu keranjang jatuh, masih ada telur di keranjang yang lain. Pun, secara ekologi, selain mengerem *deforestasi*, wanatani juga meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan gizi, mencukupi pakan ternak, dan memproduksi kayu bakar. Otomatis, pendapatan meningkat, mata pencaharian bervariasi, pengangguran di pedesaan berkurang. Manfaat wanatani tersebut memotivasi petani untuk beralih dari penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan ke praktek yang berkelanjutan. Masyarakat telah melihat dan menikmati jerih payahnya.

Ada banyak pihak yang berperan dalam pencapaian wanatani Srikandi. Tak hanya guru, nampaknya seorang penyuluh kehutanan pun berhak menyandang gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam perjalanannya, geliat Srikandi melahirkan para perwira atau *local heroes*, yang kiprahnya pantas dijadikan teladan bagi sesama. Mereka bagaikan lentera yang menerangi semesta. Menjadi *heroes* tak berarti memegang senjata sambil merangsek musuh di medan perang. Tidak pula harus berkostum sebagai pahlawan dalam kisah-kisah superhero Marvell. *Heroes* adalah mereka yang tidak hanya mampu meraih sukses bagi diri sendirinya. Mereka juga berkontribusi membantu orang-orang di sekitarnya. Kehadirannya memberikan inspirasi dan dampak positif bagi sekitar. Kuncinya pada kolaborasi para pihak dan semangat masyarakat Welahan untuk mengubah nasib. Pendamping dan pengurus kelompok hanya sopir yang membawa gerbong untuk mencapai tujuan. Kolaborasi cantik para pihak telah menorehkan warna bagi Welahan. Bagaimana orkestra yang harmonis: penyuluh kehutanan yang ikhlas, leader yang mumpuni, dan *team work* yang kompak. Simfoni orkestra itu makin menggema dengan urun daya dari berbagai instansi terkait. Ketika pekerjaan, komitmen, dan kesenangan menjadi satu, tak ada yang mustahil untuk diraih.



Ragam kegiatan usaha produktif Srikandi: wanatani, batik ecoprint dan kerajinan limbah plastik.

Pendamping Mengukir Prestasi

Ketahuilah dirimu, ketahuilah musuhmu. Seribu pertempuran, seribu kemenangan - Sun Tzu, ahli strategi perang. Dalam kisah Bharatayuda, kemenangan Pandawa atas Kurawa tak lepas dari sang penasihat utamanya, Batara Kresna. Ia adalah ahli strategi mumpuni dan diplomat ulung. Sang avatar Dewa Wisnu itu memahami kekuatan dan kelemahan Kurawa, menggenggam masa lalu, dan meneropong masa depan. Dengan strateginya, Kresna menjadikan Pandawa sebagai penegak kebenaran dan keadilan untuk membasmi angkara Kurawa.

Wiracarita dunia pewayangan itu kontekstual dengan kisah Kelompok Wanita Tani Srikandi. Secara simbolis, peran Kresna tergambar dalam sosok penyuluh kehutanan pendamping, sementara Pandawa tercermin pada kelompok Srikandi. Secara faktual, aktivitas Srikandi tak lepas dari pendampingan. Hubungan Srikandi





dengan sang pendamping serupa Pandawa dengan Kresna. Penyuluh tak hanya mendampingi, namun juga membantu mengelola, memandu (*mentoring*), dan mengobarkan semangat. Dalam mencapai tujuan, tak jarang Ia menemui hambatan yang terkadang melemahkan semangat. Ibaratnya, ada kawan dan ada lawan. Lawan yang harus ditaklukkan kelompok masyarakat Welahan adalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kondisi stagnan.

Mungkin pantas mengingat nasehat *Don't judge a book by its cover*: Jangan melihat yang zahir. Di balik sosoknya yang sederhana, penyuluh pendamping ini menyanggah berbagai prestasi yang membanggakan. Sejak 2006, kiprah penyuluh pendamping Srikandi telah memperoleh apresiasi. Tidak hanya tingkat lokal, ia juga mengantongi penghargaan nasional. Pada 2019, penghargaan dan trophi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Proklamasi Kategori Utama sebagai pendamping dan admin Proklamasi Welahan. Belum lagi kiprahnya sebagai narasumber nasional dalam pendampingan Proklamasi pada 2021 – 2022. Ia menyadari peran-

nya dalam menjembatani pembangunan kehutanan di tapak dengan masyarakat. Dengan kata lain, ia menjadi perantara. Ia berdiri di antara pembangunan kehutanan dengan masyarakat. Tak heran, setiap saat berada di tapak, Ia menerjemahkan bahasa langit kehutanan menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Komunikasi yang cair tentu akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Menurutnya peran strategis penyuluh kehutanan diuji ketika dituntut untuk memberikan alternatif solusi dan menjawab permasalahan dalam pembangunan kehutanan. Seorang penyuluh harus mampu mengemban peran itu, memahami potensi dan karakter masyarakat binaanya.

Bekerja langsung dengan masyarakat, seorang penyuluh dituntut untuk memiliki beragam kapasitas: mendampingi, memotivasi, dan menjaga harapan. Terlebih lagi, penyuluh juga mengemban tugas menautkan kelompok dengan sumber informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lain. Segenap upaya itu demi pemerataan kesejahteraan dan mem-

persempit ketimpangan ekonomi masyarakat. Harapannya, tentu saja, masyarakat berdaya, kelembagaan menjadi kuat, dan hutan lestari bisa tercapai. Sejahtera dan mandiri bersama. Nampaknya, pesan Sun Tzu di atas secara tak sadar telah diterapkan penyuluh dalam mendampingi Srikandi. Dengan mengetahui potensi diri dan peluang, kemiskinan, keterbelakangan, dan stagnasi, secara perlahan dapat dikalahkan.

Dalam konteks ini, Srikandi mengajarkan pelajaran penting: penyuluh kehutanan berperan strategis dalam menciptakan perubahan sosial. Itu juga berarti penyuluh tak hanya bekerja di level prakondisi masyarakat agar tahu, mau, dan mampu berperan dalam ranah kehutanan. Penyuluh mesti melampaui level itu: tetap mendampingi masyarakat hingga mandiri dalam usaha berbasis kehutanan. Dengan begitu, cakupan kerja penyuluh kehutanan amat luas: pemberdayaan, kemandirian usaha, menyentuh pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait. Penyuluhan adalah investasi sosial dalam melestarikan hutan sebagai aset negara untuk kesejahteraan

masyarakat.

Investasi sosial perlahan-lahan bakal menumbuhkan perubahan sosial. Tumbuhnya perubahan sosial menjadi sumber energi bagi penyuluh pendamping. Keinginan masyarakat Welahan untuk mengubah kehidupan sosial ekonomi menjadi lebih baik menjadi penyemangat tersendiri bagi penyuluh kehutanan. Dari generasi ke generasi, masyarakat menggantungkan hidupnya dari pertanian. Masyarakat menjadi kelompok rentan karena ketidakstabilan pendapatan, ditambah lagi, luas kepemilikan lahan yang kurang dari standar minimal. Demi membangun kepercayaan, penyuluh harus berusaha selalu hadir memberikan pendampingan dan motivasi saat masyarakat membutuhkan solusi dengan rembug gayeng yang nguwongke. Posisi pendamping sebagai mitra selayaknya teman tanpa rasa ewuh pekewuh. Inilah yang membuat penyuluhan menjadikan proses yang dinamis bernuansa kekeluargaan.

Dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat diperlukan ketelatenan. Proses ini perlu diawali dengan membangun kesepahaman dan kekompakan, menggali isu dan potensi unggulan. Dalam pendampingan, titik beratnya berada pada kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Metodenya, bisa temu lapang, kaji terap dan tiru, maupun bimbingan teknis. Meningkatnya pendapatan akan meneguhkan rasa percaya diri kelompok masyarakat untuk menuju kemandirian. Tentu saja, hidup berserikat tak luput dari suka dan duka. Sukanya, antusiasme kelompok dalam berdiskusi setinggi semangat mereka, masukan untuk pengelolaan kelembagaan dan usaha langsung dijalankan kelompok. Itu terlihat ada tindak lanjut setelah pendampingan. Di sisi lain, dukanya jika pertemuan dilaksanakan malam hari dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Menurut penyuluh pendamping Srikandi, kelompok yang hebat adalah kelompok yang aktif, kreatif, produktif dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan, kelola usaha, yang berkontribusi nyata bagi anggota dan masyarakat. Jika hutan lestari, masyarakat akan mukti. Tugas penyuluh adalah menjaga dan melestarikan

hutan sehingga ekonomi bisa meningkat seiring membaiknya lingkungan, sosial dan budaya.

Leadership Srikandi

Angin dan ombak selalu di sisi navigator paling kuat - Edward Gibbon, sejarawan Inggris. Di sisi lain, selain pendamping tentunya ada pemeran utama dalam kelompok Srikandi. Sosok leader yang kuat dan mampu berkolaborasi diperlukan untuk memimpin kelompok. Ibarat Pandawa, *leader* Srikandi harus bisa bekerja sama dengan pendampingnya dan menjaga hubungan baik dengan masyarakatnya. Di rumahnya yang asri, Sekretaris Kelompok Srikandi menuturkan masa-masa perjuangannya. "Di balik sukses organisasi, pasti ada tim yang solid. Sayangnya, tim solid tidak dapat terbentuk dalam waktu singkat. Dan, untuk menjaga kekompakan pun pekerjaan yang cukup sulit". Kelompok berisi banyak anggota dengan karakter dan pemikiran yang berbeda-beda. Pasti akan ada salah satu orang yang mencapai titik lelah.

Merujuk ungkapan Edward Gibbon

di atas, mengelola kelompok mirip-mirip melayarkan kapal di samudra luas. Sang nahkoda tidak bisa mengendalikan angin dan badai. Namun, ia bisa mengatur haluan dan layar kapal. Pun, 'bahtera' Srikandi dalam mengarungi samudra kehidupan. Segala keputusan, pergerakan, maupun langkah pengembangan membutuhkan *leadership*. Itulah cara memimpin untuk membawa kelompok mencapai kesuksesan. *Leadership* penting untuk membangun tim yang solid. Visi dan target tentu harus dicapai dengan kerja keras. Itu tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, semua tergantung pada kerja tim. Dengan kepemimpinan yang baik, kesolidan dan kerja sama tim juga akan terbentuk baik pula. Sehingga, halangan dan rintangan dapat diatasi kelompok.

Dalam perjalanannya, Srikandi menjajal dan menguji--*trial and error*--berbagai strategi atau pilihan kegiatan. Srikandi mencari-cari yang pas bagi kelompok. Berbagai usaha pilihan masyarakat secara nyata telah meningkatkan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kunci kesuksesan pembentukan tim Srikandi





Pendampingan berbagai kegiatan Srikandi oleh Penyuluh Kehutanan.

adalah keterbukaan dan transparansi. Setiap ada masalah, terutama berkaitan dengan keuangan, diselesaikan dalam pertemuan terbuka dan transparan melalui musyawarah untuk mufakat.

“Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada memiliki tim yang membuat kita seperti keluarga. Dengan hubungan baik, anggota pasti akan bersemangat dalam mengerjakan apapun bersama-sama. Tim yang kompak akan berbagi beban dan membagi kesedihan,” tutur Sekretaris Srikandi-Indaryati. Srikandi sedikit banyak telah membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Anggota yang mempunyai usaha bisa dikembangkan dan dipasarkan kepada masyarakat luas melalui wadah kelompok.

Mengubah Nasib

Change your mind and your life will follow - Karen Casey. Ungkapan dari Karen Casey tersebut seolah menjiwai upaya perubahan yang dilakukan Srikandi. Menyadari berbagai keterbatasan serta keinginan meningkatkan pendapatan, terbentuklah Kelompok Wanita Tani dan

Kelompok Tani Hutan. Dua wadah ini ikhtiar untuk menurunkan pertolongan dari Langit dalam mengubah nasib.

Tidak hanya itu, semangat Kartini pun menggelora di dada setiap perempuan Srikandi. Saat kesetaraan gender berhembus di luar sana, di Welahan telah menjadi tindakan nyata. “Kita tidak perlu sungkan untuk mengembangkan keahlian dan kreativitas karena kaum laki-laki dan perempuan adalah sejajar. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berkarya. Hanya saja, tanpa mengesampingkan kodrat sebagai wanita. Jangan sampai kaum perempuan hanya dianggap sebagai *kanca wingking*—teman di dapur—saja,” demikian Indar dengan penuh semangat.

Tiap anggota telah menjadi hero bagi kelompok, keluarga, dan masyarakat. Betapa tidak, perubahan yang lebih baik telah mewujud di Welahan. Tidak hanya penghasilan meningkat, lingkungan hidup pun lebih lestari. Satu hal yang tak bisa dilupakan: kolaborasi. Kelompok Srikandi memperoleh uluran tangan dari

banyak pihak. Bagi gayung bersambut, sumbangsih para pihak itu dapat berse-nyawa dengan jiwa kelompok. Tujuan kerja bersama dengan stimulus dari para pihak lain adalah menaklukkan kemiskinan dan melestarikan lingkungan hidup.

Bergerak melangkah maju sudah jelas tak bisa sendirian. Urun daya dari pihak luar telah membantu Srikandi memberdayakan kemampuan internalnya. Seperti energi yang terus bergerak, perubahan yang lebih baik membutuhkan komitmen bersama: pelopor, penggagas, dan pembawa perubahan. Merekalah *local heroes*. Mereka dibutuhkan sebagai pembaharu. Mereka istimewa lantaran memberikan dampak positif. Merenungkan Srikandi mengingatkan pernyataan tokoh bisnis Henry Ford: *Datang bersama adalah awal, tetap bersama adalah kemajuan, bekerja bersama adalah kesuksesan*. ●

Sulistiyanto, S.ST

Penyuluh Kehutanan Ahli,
CDK Wilayah VII, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah

SERBA SERBI ADMIN LOMBA

DIBALIK KESUKSESAN LOMBA WANA LESTARI

Salah satu kunci keberhasilan Lomba Wana Lestari terletak pada administrator aplikasinya. Beranekaragam pengalaman, masukan bahkan harapan para administrator dalam mengawal proses lomba wana lestari. Siap, Sigap, dan Tanggap merupakan sikap kunci yang harus dimiliki administrator dalam membantu, melayani dan berkontribusi bagi suksesnya lomba Wana Lestari.

“Dokumennya sudah kami pastikan sesuai aturan, tapi saat dibuka tidak muncul dan unggah berkas seringkali gagal”

“Kami sudah selesai input dan unggah, mohon dikonfirmasi apakah berkas sudah masuk semua?”

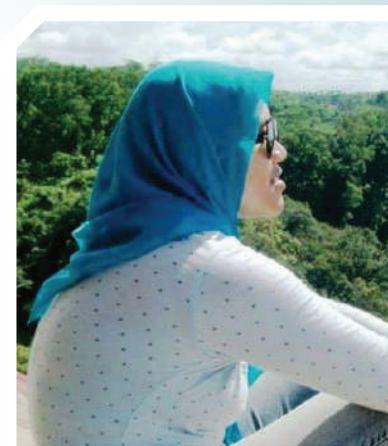
Begitulah kira-kira pernyataan para administrator saat penginputan dokumen lomba pada Aplikasi Wana Lestari. Lomba Wana Lestari diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan agar dapat terwujudnya peningkatan motivasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Lomba Wana Lestari adalah suatu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menilai prestasi perorangan, kelompok atau aparat pemerintah dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Seiring berkembangnya teknologi informasi, mulai tahun 2017 Pusat Penyuluhan mengembangkan aplikasi yang berbasis *online* untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data terkait Lomba Wana Lestari. Tujuan Aplikasi Wana Lestari

antara lain mengefisienkan, mempercepat, memudahkan, dan menghemat biaya operasional.

“Aplikasi Lomba Wana Lestari sangat membantu pelaksanaan penilaian lomba baik saat verifikasi dokumen maupun lapangan. Dengan penggunaan aplikasi ini dapat dicapai efisiensi waktu dan sangat hemat penggunaan kertas” tegas Cucu Setiawati, salah satu Administrator pusat Aplikasi Wana Lestari. Aplikasi ini memuat seluruh kategori yaitu Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Pencinta Alam (KPA), Kader Konservasi Alam (KKA), Hak Pengelolaan Hutan Desa, Pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, dan Pengelola Hutan Adat.

Administrator Wana lestari terbagi menjadi dua yaitu admin pusat dan provinsi. Kapasitas admin tidak sekedar memasukan data saja, namun ada banyak hal yang menjadi tugas admin. Lantas apa sih tugas admin wana lestari dan apa saja pengalaman mereka, berikut cerita pengalaman, suka duka, masukan bahkan harapan admin wana lestari. ●



Yunia Efrinawati, S.Hut - Jawa Tengah. Berkecimpung dengan wana lestari sejak 2015 dan menjadi admin wana lestari sejak 2017. Tahun 2017 merupakan tahun pertama menggunakan aplikasi, tugas pertama yaitu *scan* dan unggah berkas, kadang jika sinyal kurang mendukung terjadi gagal unggah dan itu menjadi tantangan tersendiri. “Jika mendapat kabar bahwa lampiran berkas nominator Jawa Tengah kurang lengkap, itu menjadi beban tersendiri karena dirasa usaha sudah optimal. Sebaliknya, rasa bangga dan senang muncul jika mendapat kabar bahwa nominator Jawa Tengah menjadi juara nasional”, jelasnya. ●

SERBA SERBI ADMIN LOMBA



Denny Purnomo, S.Hut - Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2017 Denny sudah menjadi tim verifikasi lapangan dan mempersiapkan kandidat pemenang wana lestari tingkat nasional. Tahun 2022 merupakan tahun pertamanya sebagai admin Aplikasi Wana Lestari. Tantangan sebagai admin antara lain kelengkapan administrasi nominator tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga perlu dirapikan dan diatur sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kesalahan unggah dokumen dapat mengakibatkan pengurangan nilai skor. Tantangan semakin bertambah karena pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan 5 kategori untuk bersaing tingkat nasional, antara lain Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM, Kelompok Tani Hutan, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa sehingga dokumen yang disiapkanpun lebih banyak. Walaupun demikian, rekan-rekan di KPH sangat membantu pekerjaan admin. "Usaha dan kerja keras secara tim, baik rekan-rekan di KPH dan admin provinsi terbanyak ketika semua kategori yang diajukan tingkat nasional diverifikasi lapangan oleh Kementerian LHK. Kebahagiaan dan kebanggaan mencapai puncaknya ketika diantara kategori yang masuk tingkat nasional bisa meraih terbaik pertama tingkat nasional", ujar Denny. ●

I Ketut Gede Intan K, S.Hut - Bali. Sejak tahun 2017 menjadi admin Wana Lestari, disamping sebagai Tim Verifikasi Lapangan tingkat provinsi. Selama perjalanannya banyak suka duka, tantangan dan hambatan yang dilewati dalam rangka mempersiapkan kandidat sebagai juara dalam Lomba Wana Lestari. Salah satu tantangan yang dihadapi Intan yaitu bagaimana menyiapkan dan menginput dokumen digital sebagai berkas pendukung sesuai dengan format yang ditentukan pada aplikasi. "Awalnya memang berat karena dokumen administrasi yang harus disiapkan sangat banyak, namun dengan bantuan teknologi hal tersebut bisa diatasi, ditambah lagi bantuan teman-teman KPH dan Tim Admin Pusat Penyuluhan yang tentunya juga sangat gerak cepat dalam membantu mengatasi kendala dalam input dokumen ke dalam aplikasi membuat segalanya menjadi lancar", ungkap Intan dengan semangat. Adapun hambatan yang dialami antara lain belum seluruh kategori lomba dapat diajukan, kondisi lapangan, kesiapan dokumen dan mental baik KTH maupun Penyuluh Kehutanan yang semula diusulkan namun kemudian dibatalkan. Intan berharap lomba ini tidak hanya menjadi sebuah ajang mencari gengsi tapi lebih kepada sebuah promosi keberhasilan pembangunan kehutanan yang dapat menjadi magnet bagi daerah lain untuk saling berkunjung baik dalam bentuk studi banding, webinar, dan lain-lain ●



Dessy Novita Sari, S.Hut - Jawa Timur. Tahun ini merupakan kali kedua Dessy menjadi admin wana lestari. Menurutnya, aplikasi wana lestari sangat membantu dalam unggah file serta berkas-berkas yang diperlukan serta telah didukung dengan fitur-fitur yang memudahkan admin. "Menjadi admin merupakan hal yang sangat berkesan bagi saya karena dapat ikut menghantarkan pemenang tingkat provinsi menuju ke tingkat nasional", tutur Dessy ●



SERBA SERBI ADMIN LOMBA



Eli Sugianto, S.Hut, M.Si - Pusat Penyuluhan. Salah satu tugas admin pusat yaitu mengunduh dokumen juara I provinsi, memasukan nilai hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan, merekap nilai hasil verifikasi dokumen serta verifikasi lapangan. Eli menjelaskan bahwa "Kegiatan ini akan terasa ringan apabila di dukung dengan jaringan internet yang stabil. Sebagai admin pernah mengalami hal benar-benar membuat tegang karena waktu sudah mendesak, perangkat tidak dapat memproses pengunduhan dokumen pemenang lomba. Beruntung ada admin lain yang dapat membantu pengunduhan dokumen. Itulah pentingnya admin lomba setiap kategori ada dua orang, sehingga bila terjadi masalah dapat segera diatasi".

Birowo Aji Wicaksono, S.Hut - Pusat Penyuluhan. "Merasa beruntung karena di tahun kedua diberikan kesempatan menjadi salah satu admin pusat pada pemberian penghargaan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari yang merupakan penghargaan penting bagi insan penyuluhan kehutanan di Indonesia. Secara tidak langsung membuka jendela baru pengetahuan saya tentang bagaimana kiprah penyuluhan di Indonesia, saya selalu dibuat terkesima oleh cara pemenang lomba membuat solusi dan cara bangkit dari permasalahan yang dihadapi", tutur Birowo. Menurutnya ada beberapa keterbatasan sehingga tidak semua provinsi ikut dalam Lomba Wana Lestari. Harapan ke depan mudah-mudahan semua provinsi dapat ikut berpartisipasi karena wana lestari merupakan salah satu alternatif "insentif" dalam bentuk penghargaan bergengsi untuk mengapresiasi kinerja atau bahkan mendorong semangat insan penyuluhan kehutanan di setiap penjuru daerah.



Cerita pendamping diatas merupakan pengalaman yang berkesan dan sulit dilupakan. Admin pusat maupun provinsi harus berperan sebagai konsultan yang siap, sigap, teliti, dan responsif. Keterampilan seperti ini sangat dibutuhkan oleh Admin. Selain itu juga harus cepat tanggap menghadapi perubahan yang terjadi pada aplikasi. Admin harus cakap menjadikan dirinya tempat bertanya, menampung permasalahan atau kendala yang dihadapi dan harus mampu

memberikan alternatif solusi.

Para admin mengharapkan agar aplikasi wana lestari perlu terus dikembangkan mengikuti kebutuhan pengguna dan perkembangan zaman. Mungkin saat ini masih banyak admin provinsi yang masih mengeluhkan tentang bagaimana rumitnya mengunggah dokumen ke aplikasi Wana Lestari, sehingga aplikasi perlu dikembangkan kearah yang lebih memudahkan pengguna dalam mengisi maupun mengunggah dokumen online.

Pengembangan ini dapat dilakukan di sisi UI (*user interface*) yaitu tampilan visual dan UX (*user experience*) yaitu bagaimana pengalaman pengguna saat memakai aplikasi agar menjadi lebih *user friendly*. Selain itu, perlu adanya bimbingan teknis tatap muka untuk meningkatkan kepahaman penggunaan aplikasi wana lestari. Harapan ke depan semoga para admin aplikasi dapat terus membantu, melayani dan berkontribusi bagi suksesnya Lomba Wana Lestari. ●

MAKNA LOGO PKSM

Logo PKSM dirasa sangat perlu ditetapkan untuk mewakili identitas seorang PKSM yang diharapkan akan memberikan kesan baik, kepercayaan serta sebagai ajang promosi bagi kiprah PKSM di tengah-tengah masyarakat. Logo PKSM dapat dipergunakan oleh PKSM untuk mengenalkan diri kepada khalayak diseluruh Indonesia. Penetapan Logo PKSM oleh Pusat Penyuluhan BP2SDM KemenLHK merupakan salah satu bentuk pengakuan dari Pemerintah atas kiprah positif dari para PKSM dalam pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Siapa itu PKSM dan Mengapa Logo PKSM itu Penting

PKSM merupakan tenaga penyuluh kehutanan yang berasal dari pelaku utama yang berhasil atau masyarakat lainnya yang dengan kemauan sendiri dan mampu melakukan penyuluhan kehutanan. Ciri yang menjadi pembeda dari PKSM dengan tenaga penyuluh lainnya adalah keswadayaan dalam melakukan aktivitas penyuluhan pembangunan Kehutanan kepada masyarakat. Kiprah para PKSM di lapangan sudah banyak diketahui dan diakui oleh banyak pihak baik terkait pengembangan wirausaha komoditas seperti madu, aren, kopi, bambu, wisata alam, jamur, maupun berkiprah sebagai pendamping program perhutanan sosial, desa konservasi maupun rehab DAS dan KBR, dan lain sebagainya.

Mengutip penuturan dari Dr. Ir. Yumi, M.Si salah seorang pakar di bidang pe-



nyuluhan kehutanan bahwa para PKSM yang telah berhasil atau sukses dalam mengembangkan usaha berbagai komoditas kehutanan di lapangan merupakan *eco-sociopreneur* yaitu wirausaha-wirausaha yang sangat peduli dengan masalah sosial sekitarnya dan kelestarian lingkungan.

Keberadaan PKSM sebagai *eco-sociopreneur* maupun tenaga penyuluh kehutanan, di era digital sekarang ini perlu membangun brand tersendiri sebagai suatu entitas yang ada di masyarakat. Logo PKSM dipandang perlu diterbitkan untuk mewakili identitas brand PKSM yang diharapkan memberikan kesan baik, kepercayaan serta sebagai ajang promosi bagi kiprah PKSM di tengah-tengah masyarakat. Logo PKSM dapat dipergunakan oleh PKSM untuk mengenalkan diri kepada khalayak diseluruh Indonesia dan penetapan Logo PKSM oleh Pusat Penyuluhan BP2SDM KemenLHK, merupakan salah satu bentuk pengakuan dari Pemerintah.

Lomba logo PKSM

Lomba logo PKSM telah dilakukan melalui *instagram* dan *facebook* Pusat Penyuluhan BP2SDM KemenLHK, dari Bulan April sampai dengan 22 Mei 2022, dengan membatasi peserta yaitu hanya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan Penyuluh Kehutanan PNS. Sebanyak 44 buah desain logo telah terima dari 18 orang peserta lomba (11 PK PNS dan 7 PKSM) yang berasal dari 11 provinsi yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Papua.

Adji Rachmad, S.Hut, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dari Kalimantan Timur terpilih sebagai pemenang lomba logo PKSM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Penyuluh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KemenLHK dengan nomor: SK.19/LUH/TU/DTL.0/6/2022 tanggal 7 Juni 2022. ●



Adji Rachmad, pemenang lomba logo PKSM bertemu dengan Kepala Pusat Penyuluhan.

Makna logo PKSM

Logo PKSM merupakan simbol dari keberadaan PKSM baik aktivitas, perjuangan, harapan, kiprah dan prestasi yang ditorehkan dilapangan, sebagaimana gambaran berikut ini :

1. Batang dan Kanopi (sebagai huruf P) simbol semangat, peneduh dan kekokohan.

Simbol ini memberi harapan dan citra bahwa PKSM adalah orang yang bersemangat dalam melakukan aktivitas penyuluhan, memberikan ketenangan dan keteguhan kepada masyarakat di lapangan;

2. Cabang dan Ranting (sebagai huruf K) simbol penyuluhan yang kompleks.

Simbol ini memberikan informasi bahwa aktivitas yang dilakukan dan tantangan yang dihadapi oleh PKSM dalam melakukan penyuluhan sangatlah kompleks;

3. Liana (sebagai huruf S) simbol keeratan.

Simbol ini memberikan kesan positif dan kepercayaan bahwa PKSM dalam bekerja selalu berjejaring saling mendukung dan memberikan informasi terkait pembangunan LHK dan pemberdayaan masyarakat;

4. Banir dan akar (sebagai huruf M) simbol penjaga semangat dan keutuhan.

Melalui simbol ini diharapkan PKSM dalam melakukan aktivitas penyuluhan tetap semangat dalam memotivasi masyarakat dan selalu menjaga keutuhan dan kekompakan PKSM dan kelompok binaannya;

5. Karakter gambar sebuah pohon yang tumbuh subur simbol kesejahteraan, kemandirian dan kelestarian.

Simbol ini selaras dengan aktifitas penyuluhan yang dilakukan PKSM kepada masyarakat dengan penekanan tetap menjaga semangat, mendorong kemandirian dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan tercipta kelestarian lingkungan di mana PKSM berada;

6. Tulisan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang berwarna Cokelat menyerupai tanah sebagai simbol dukungan.

Dengan simbol ini PKSM senantiasa mendukung setiap program pembangunan LHK yang perlu melibatkan masyarakat.



Pesan dan Harapan

Kehadiran logo PKSM di dunia penyuluhan kehutanan dewasa ini semoga memberikan warna baru dalam mendukung semangat membangun dan mensejahterakan bagi semua pihak. Sejalan dengan slogan atau yel-yel yang selalu bergema pada setiap pertemuan PKSM yaitu "PKSM BERSERI – Berdaya, Semangat, Mandiri". Semoga PKSM semakin handal dan berdaya saing serta semakin membumi dalam mewujudkan harapan bersama yaitu masyarakat sejahtera dan hutan lestari. ●

Ahmad Zainal Abidin, S.Hut

Penyuluh Kehutanan Ahli
Pusat Penyuluhan BP2SDM KemenLHK



Talkshow Festival
Pesona Kopi
Agroforestry Kopi
KTH Tembus Pasar
Internasional, Jakarta
25 Januari 2022



Bimbingan Teknis
Sekolah Lapangan
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Wisata
Alam di KTH Bina Tani
Kreatif, Subang 8-10
Juni 2022





Apel Siaga Penyuluh Kehutanan bersama Menteri LHK dalam rangka Pencegahan Karhutla, Banjir dan Longsor Jakarta 15 Juni 2022



Temu Teknis dalam Menghadapi Pencegahan Karhutla, Banjir dan Longsor Jakarta 15 Juni 2022



Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan dalam rangka Perlindungan Satwa Liar dan Pencegahan Karhutla, Banjir dan Longsor, Malang 15 Juli 2022





Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Tentang Penyusunan Desain Infografis Materi Penyuluhan pada Media Elektronik, Malang 14 Juli 2022



FGD Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Lingkungan Hidup Lingkup Provinsi DIY, Yogyakarta 22 Juli 2022



Temu Karya Teladan Waa Lestari Tahun 2022, Jakarta 16 Agustus 2022



Temu Penyuluh Kehutanan Wonosobo dengan Kepala Pusat Penyuluhan di Wanawiyata Widyakarya APHR Wonosobo, Wonosobo 22 Agustus 2022





Temu Teknis PKSM
Komoditas Wisata
Alam, Kebumen 13-15
September 2022



Koordinasi dan Diskusi Pusat Penyuluhan dan DPP
IPKINDO, Hutan Kota Mutiara Gading City Bekasi
6 Oktober 2022



Pertemuan Besar ke 4 SL Pemanfaatan Jasling Wisata Alam, Strategi
Pemasaran Melalui Media Sosia, Subang 13-14 Oktober 2022



MEDIA INFORMASI PUSAT PENYULUHAN



 @pusluhklhk

 @pusluhklhk

 Pusluh KLHK

 PUSLUH KLHK

 pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id

Ikuti media informasi Pusat Penyuluhan untuk memperoleh informasi terkini seputar penyuluhan.



**Proses shooting konten media informasi
Pusat Penyuluhan**



TALKSHOW: Pengembangan Usaha KTH Sebagai UMKM Berdaya Saing

Kementerian LHK • 23,1 K subscribers • 122 likes • 12 views • 12 views • 12 views



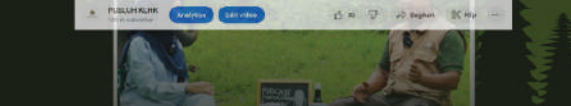
PODCAST PUSLUH EPISODE 3 | CERITA INSPIRATIF PKSM LIA AMALIA, JAMUR TIRAM TEMBUS PASAR INTERNASIONAL

PUSLUH KLHK • 10 K subscribers • 27 likes • 12 views • 12 views • 12 views



PODCAST PUSLUH EPISODE 2 | NGOBROL TIPS BUDIDAYA JAMUR TIRAM: SANGAT MENGHASILKAN DAN ZERO WASTE

PUSLUH KLHK • 10 K subscribers • 27 likes • 12 views • 12 views • 12 views



PODCAST PUSLUH EPISODE 1 | NGOBROL TIPS BUDIDAYA JAMUR TIRAM: SANGAT MENGHASILKAN DAN ZERO WASTE

PUSLUH KLHK • 10 K subscribers • 27 likes • 12 views • 12 views • 12 views

Podcast dan Talkshow